

# Agama dalam pusaran konflik dan perdamaian

*by Abdulloh Fuadi*

---

**Submission date:** 06-Apr-2023 02:55PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2057363000

**File name:** Agama\_dalam\_Pusaran\_Konflik\_dan\_Perdamaian.pdf (2.81M)

**Word count:** 50109

**Character count:** 324772

Dr. Abdulloh Fuadi, MA

**Agama  
Dalam Pusaran  
KONFLIK &  
PERDAMAIAN**

Sanabil



**AGAMA DALAM PUSARAN  
KONFLIK DAN PERDAMAIAN**



Halaman Sengaja Dikосongkan



Dr. Abdulloh Fuadi, MA

**AGAMA DALAM PUSARAN  
KONFLIK DAN PERDAMAIAN**

  
**Sanabil**

*Abdulloh Fuadi ~ iii*

**Agama dalam Pusaran Konflik dan Perdamaian ©**  
Sanabil 2021

Penulis: Dr. Abdulloh Fuadi, MA  
Editor : Dr. Jumarim, M.H.I  
Layout : Erwin Padli  
Desain Cover: Mustahiq, S.Pd

*All rights reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian  
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital  
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis  
dari penulis dan penerbit.

ISBN: 978-623-317-186-1  
Cetakan 1: Oktober 2021

Penerbit:  
Sanabil  
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram  
Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362  
Email: sanabilpublishing@gmail.com  
[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Daftar Isi .....	v
Kata Pengantar Dekan .....	viii
Prakata Penulis .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	15

### BAB II PEMBAHASAN

A. Agama diantara Konflik dan Perdamaian .....	30
1. Pertautan Konflik dan Agama .....	30
2. Agama sebagai Sumber Perdamaian .....	41
3. Deklarasi Perdamaian Religius .....	56
a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islami ....	57
b) Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	72
c) Sila Tata Antar-Makhluk .....	82
B. Agama-Agama Dunia sebagai Organ Perdamaian .....	85
1. Potensi dan Daya Agama-Agama Dunia .....	85
2. Deklarasi Perdamaian Antar Pemeluk Agama .....	108
a) KTT Perdamaian Dunia Milenium Pemimpin Agama dan Spiritual: Komitmen untuk Perdamaian Global .....	109
b) Piagam Dewan Pemimpin Agama Dunia: Hasil dari KTT Perdamaian Dunia Milenium .....	113
c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Agama-Agama Dunia	

.....	121
d) Piagam Prakarsa Perserikatan Agama-Agama .....	130
e) Agama dan Kekerasan .....	135
<b>C. Kompleksitas Sistem Makna Agama bagi Tatanan Dunia ..</b>	<b>140</b>
1. Agama diantara Pemelihara dan Pengubah Tatanan Dunia.....	140
2. Deklarasi Perdamaian Dunia .....	162
a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia .....	162
b) Menuju Deklarasi Etika Global .....	178
c) Deklarasi Universal Tentang Etika Global .....	182
 <b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>192</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>199</b>



## KATA PENGANTAR DEKAN

*Alhamdulillah*, dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan Buku Ajar dan Referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan *blended learning* sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini.

Penerbitan Buku Ajar dan Referensi melalui program Kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil dosen dan buku ajar yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di lemari, tanpa terpublish, sehingga tidak *accessible* secara luas, baik hardcopy maupun secara *online*. Demikian juga buku ajar, yang selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output pembelajaran di sisi lain.

Kompetisi buku Referensi dan Buku Ajar pada tahun 2021 berjumlah 95, masing-masing buku referensi 75 judul dan buku ajar 20 judul. Di samping itu, 95 buku tersebut juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2021 menghasilkan 95 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam *Islamic studies* konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode *humanities studies* kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (*natural sciences*) yang berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitkan pada Tahun 2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk kalangan dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang dikompetisikan dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan *zauqnya*, *performance* buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di 'ruang' inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca.



Semoga agenda ini menjadi *amal jariyah* dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan umat pada umumnya.

Mataram, 25 Oktober 2021

Dekan



**Dr. Jumarim, M.H.I**

NIP. 197612312005011006



Halaman Sengaja Dikosongkan

## PRAKATA PENULIS

Studi konflik dan perdamaian secara ilmiah akademik telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama pada era pasca kolonial. Variabel agama dalam jenis studi ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dibandingkan variabel lain semisal etnis, ras, suku, warna kulit, golongan, atau kelompok. Hal ini dikarenakan agama memiliki konstruk berpikir yang didukung oleh anasir-anasir tertentu yang nilainya sangat fundamental bagi kehidupan manusia, semisal teks kitab suci. Hal yang demikian tidak dimiliki oleh variabel yang lain. Karena itulah, beragamnya anasir-anasir fundamental yang melingkupi agama menjadikan kajian seputar agama dalam pusaran konflik dan perdamaian menjadi sesuatu yang mesti mendapatkan porsi akademik tersendiri. Buku ini berupaya menguak sekaligus menyingkap tiga hal sekaligus, yaitu: jejaring makna agama dalam wacana dan studi konflik dan perdamaian; agama-agama dunia bertindak sebagai organ perdamaian; dan, peran agama sebagai pemelihara dan pengubah tatanan dunia. Urgensi tema ini adalah terutama terkait dengan perkembangan peradaban manusia yang tampaknya rumit dan pelik untuk diprediksi, apalagi bila menyangkut isu agama. Maka diskusi lanjutan tentang wacana konflik dan perdamaian sangatlah diperlukan, mengingat jenis studi ini membutuhkan beragam alternatif sudut pandang dari berbagai pihak karena sifatnya yang begitu multi dimensi dan trans disiplin keilmuan.

Mataram, 1 September 2021

Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Secara akademis, studi perdamaian adalah sebuah kajian ilmiah baru yang lahir sekitar setengah abad yang lalu. Jenis studi ini (*peace studies*) dekat dengan jenis studi lain yang serupa, yaitu studi konflik (*conflict studies*). Ia juga berdekatan dengan studi keamanan (*security studies*) yang tampaknya lebih mapan dan telah memiliki tradisi akademik yang terasah. Meskipun tergolong baru, tetapi studi perdamaian dan juga studi konflik memiliki daya tarik tersendiri. Ragam variabel yang mengitarinya menjadikan jenis studi ini multi dimensi sekaligus interdisipliner. Keilmuan psikologi, sosiologi, antropologi, filsafat dan lain-lain turut andil memperkaya dan memperluas wacana. Di samping itu, menurut Johan Galtung dan Charles Webel, jenis studi ini juga menghadapi tantangan yang serupa dengan studi kesehatan,<sup>1</sup> yaitu melampaui garis demarkasi yang hampir tanpa batas.

Dalam kesehatan, memperlakukan teman dan musuh haruslah sama, setara dan tidak boleh memihak. Dokter dan perawat hanya berfokus pada bagaimana menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien, terlepas dari ikatan primordial apa pun. Demikian pula perlakuan dalam upaya perdamaian dan resolusi konflik. Akademisi, praktisi, dan aktivis perdamaian hanya berfokus pada bagaimana menciptakan perdamaian, sekaligus menihilkan kekerasan dan konflik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengalahkan jenis patriotisme apa pun. Ia bersifat trans nasional. Berkaca dari penjabaran ini, maka dapat dipahami bahwa jenis studi ini baru mulai berkembang pada era

---

<sup>1</sup> Johan Galtung and Charles Webel, "Peace and Conflict Studies: Looking Back, Looking Forward," in *Handbook of Peace and Conflict Studies* (London: Routledge, 2007), 397.

pasca kolonial. Dengan demikian, studi perdamaian memiliki paradigma khas yang berlainan dengan berbagai disiplin keilmuan lain yang notabene terkait erat dengan paradigma Barat era imperialisme yang mengandung bias-bias tertentu.

Visi besar studi perdamaian juga mesti dicamkan, yaitu mengatasi segala jenis pembunuhan, baik dalam skala kecil, terutama dalam skala besar semisal genosida. Terma meng-atas-i memiliki konotasi ganda. Ia bisa berarti sebagai pencegahan dalam wilayah-wilayah nirkekerasan, dan bisa pula berarti sebagai pedoman penuntun dalam upaya realisasi dalam wilayah-wilayah konflik. Dikarenakan sifatnya yang begitu multi dimensi dan trans disiplin keilmuan, maka jenis studi ini mestilah independen, kritis dan emansipatoris, termasuk menganalisa dan mengkritisi praktisi yang muncul dari jajarannya sendiri. Keberpihakan hanyalah tertuju pada hadirnya perdamaian. Keragaman variabel yang berada di seputar wacana perdamaian dan konflik menjadikan studi ini pelik sekaligus kompleks, semisal etnis, ras, suku, warna kulit, golongan, kelompok, dan tidak terkecuali agama.

Diantara jenis variabel tersebut, agama memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Agama memiliki konstruk berpikir yang didukung oleh anasir-anasir tertentu yang fundamental bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah teks kitab suci. Teks sakral ini dipegang oleh para pemeluk agama sebagai sebuah pedoman dan acuan yang mampu menggerakkan manusia melakukan sesuatu di luar nalar kemanusiaan itu sendiri. Keberpihakan kepada ujaran dan ungkapan di dalam teks kitab suci dipertaruhkan bahkan dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Hal yang demikian tidak ada pada variabel lain semisal etnis, ras, suku, warna kulit, golongan atau pun kelompok. Meskipun demikian tidak berarti bahwa perdamaian antar etnis, misalnya, lebih mudah dan lebih ringan bila dibandingkan dengan perdamaian antar agama. Tetapi beragamnya anasir-anasir fundamental yang melingkupi agama menjadikan kajian seputar agama dalam pusaran konflik dan perdamaian menjadi sesuatu yang mesti mendapatkan porsi akademik tersendiri.

Di samping hal tersebut, konsiderasi tentang jumlah pemeluk agama di dunia juga turut menjadi perhatian. *Pew Research Center* dalam laporannya tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeluk agama Kristen adalah kelompok agama terbesar di dunia, yaitu hampir sepertiga (31%) dari 7,3 miliar penduduk Bumi. Pemeluk agama Islam atau Muslim berada di urutan kedua, dengan 1,8 miliar orang, atau 24% dari populasi global, diikuti oleh orang-orang yang menganggap dirinya tak beragama, yaitu sebanyak 16%. Pemeluk agama Hindu menempati posisi berikutnya, yaitu 15%, dan diikuti oleh penganut agama Buddha sebanyak 7%. Penganut agama lokal, Yahudi, dan anggota agama-agama lain merupakan bagian yang lebih kecil dari penduduk dunia.<sup>2</sup> Dengan memperhatikan kapasitas pemeluk agama yang sedemikian besar, maka perhatian terhadap variabel agama dalam membicarakan perihal perdamaian dan konflik menjadi hal yang tak terbantahkan dan mutlak diperlukan.

Memasuki era pasca Pencerahan, agama mendapatkan perhatian kembali. *The return from exile* (kembali dari pengasingan) adalah frasa yang dipilih oleh Pavlos Hatzopoulos dan Fabio Petito dalam menandai dan menggambarkan hal tersebut.<sup>3</sup> Dalam masyarakat post sekuler, agama dapat memainkan peranannya dan berdampingan bersama dengan agen-agen sosial yang lain. Dalam upaya tersebut, agama harus menghadapi narasi sekularisme pada setidaknya tiga tingkatan yang berbeda: politik, sosial dan pribadi.

Narasi-narasi sekuler pada tiga level kehidupan tersebut terurai secara singkat sebagai berikut: Pada tataran politik, sekularisme berarti kemerdekaan negara dari agama. Hal ini berimplikasi kepada tiga hal: Pertama, pelaksanaan kekuasaan negara yang sah berlangsung dalam istilah sekuler; Kedua, semua warga negara dapat dengan bebas

---

<sup>2</sup> Pew Research Center, "The Changing Global Religious Landscape," April 5, 2017, <https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/>.

<sup>3</sup> Pavlos Hatzopoulos and Fabio Petito, "The Return from Exile: An Introduction," in *Religion in International Relations: The Return Form Exile* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 1.



melaksanakannya kepercayaannya, baik kepercayaan adanya Tuhan maupun kepercayaan tiadanya Tuhan; Ketiga, pemisahan yang rapi antara negara dan institusi agama. Pada tingkat sosial, komunitas agama menjadi sub-kelompok khusus yang mempengaruhi lebih sedikit tindakan sosial, hukum, politik, dan pendidikan. Batas-batas agama menjadi terpinggirkan dalam proses membangun jaringan sosial seseorang. Kategorisasi agama semakin berkurang dalam membentuk pemikiran, komitmen, dan loyalitas seseorang. Pada tingkat individu, agama berurusan dengan perubahan dalam pengalaman keimanan. Sekularisme mentransformasikan pengalaman beriman menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan masyarakat pluralis.

Sementara itu, narasi-narasi post sekuler pada tingkat politik menyebutkan bahwa masyarakat post sekuler membutuhkan akses yang sama ke ruang publik dan standar yang tepat tentang apa yang dapat ditoleransi atau tidak, karena agama tidak dapat bertentangan dengan hukum atau menggunakan hukum untuk melakukan pemaksaan. Pada tingkat sosial, masyarakat pasca-sekuler akan lebih mengakui pentingnya kontribusi apa pun dalam istilah agama, tanpa menerjemahkan kontribusi tersebut ke dalam bahasa sekuler. Meskipun demikian, masalah utama pasca-sekularisme adalah menemukan metode dan batasan agama-agama dalam menjalankan agendanya. Pada tingkat individu, terdapat persoalan tentang bagaimana agama dapat menghubungkan kerangka imanen dengan transendensi dalam masyarakat pasca-sekuler.<sup>4</sup>

Salah satu konsekwensi dari *returning from exile* itu, studi agama (*religious studies*) menjadi semarak dan semakin mendapatkan tempat tersendiri dalam kajian-kajian akademik ilmiah. Salah satu orang pertama yang mengusulkan pendirian sains agama adalah Orientalis abad 19, yaitu Max Müller, yang mengedit *The Sacred Books of the East*, diterbitkan dalam 51 volume antara tahun 1879 dan 1904. Sejak saat itu, studi agama sebagai disiplin akademis yang distingtif telah

---

<sup>4</sup> Roberto Baldoli, "Nonviolence and Religion: Creating a Post-Secular Narrative with Aldo Capitini," *Social Sciences* 7, no. 50 (2018): 2.

berkembang sedemikian rupa sehingga menjadikannya kontributor yang semakin penting. Pada tahap awal studi agama, kegembiraan para sarjana Barat dalam menyambut teks dan tradisi tersebut seringkali diliputi oleh tiga kesombongan, yaitu *scientific arrogance*, *monotheistic arrogance* dan *civilizational and imperial arrogance*.<sup>5</sup> Secara singkat, tiga bentuk kesombongan tersebut terurai berikut ini:

- *Scientific arrogance* (Kesombongan ilmiah). Banyak sarjana Barat yang berpendapat bahwa semua agama, terutama varietas non-Barat, merupakan produk dari takhayul primitif dan kesalahan sederhana. Pada saat yang sama Barat menganggap dirinya sebagai wilayah yang mengarusutamakan nalar dan sains.
- *Monotheistic arrogance* (Kesombongan monoteistik). Studi perbandingan yang mereka lakukan terhadap agama lain sering berujung pada kesimpulan bahwa agama-agama masyarakat suku adalah terbelakang, dan oleh karenanya dipandang lebih rendah dibandingkan dengan Kekristenan sebagai agama yang banyak dianut oleh para sarjana Barat tersebut, serta menganggap bentuk agama mereka sebagai yang paling rasional dan paling mulia secara etis.
- *Civilizational and imperial arrogance* (Kesombongan peradaban dan kekaisaran). Sarjana Barat menganggap bahwa masyarakat non-Barat mesti dibimbing dan diatur berdasarkan alur berpikir Barat, karena keunggulan mereka dalam berbagai bidang, semisal dalam ranah sains, filsafat, politik, ekonomi, maupun studi-studi akademik. Asumsinya adalah bahwa Barat memiliki yang tertua, paling masuk akal, dan paling mutakhir dengan implikasi yang sangat konkret.

Dalam proses berikutnya, kemunculan aliran fenomenologi agama tampaknya mengikis ketiga bentuk arogansi tersebut. Karakteristik metodologis yang utama dari aliran ini adalah: 1) *bracketing*

---

<sup>5</sup> Graeme MacQueen, "The Spirit of War and The Spirit of Peace: Understanding the Role of Religion," in *Handbook of Peace and Conflict Studies*, ed. Charles Webel and Johan Galtung (London: Routledge, 2007), 330.

(mengurung), yaitu penangguhan penilaian (*judgements*) sampai dapat dipahami makna dari fenomena keagamaan dalam agama tertentu, dan dalam realitas agama itu sendiri secara lebih luas; 2) Memperhatikan makna fenomena keagamaan bagi para pemeluk agama itu sendiri, bukan hanya bagi pengamat, dengan penekanan pada kebutuhan imajinasi dan empati di pihak pengamat. Hal ini dilakukan dalam proses penentuan makna; 3) Berdasarkan kajian yang luas, menciptakan tipologi yang memungkinkan kategori-kategori utama dari agama dijelaskan secara umum, semisal ritual, mitos, kitab suci, dan lain-lain. Saat ini dapat dinyatakan bahwa pengajaran studi agama di perguruan tinggi dan universitas selama beberapa dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh fenomenologi agama. Dari sudut pandang *peace studies*, studi agama (*religious studies*) menghadapi tantangan, baik secara intelektual dan moral, untuk membantu menciptakan dialog global yang mendalam untuk menciptakan sistem perdamaian yang dibutuhkan bagi dunia.

Hal tersebut dikarenakan informasi tentang agama pada saat ini hampir ada di setiap laman berita dan benak semua orang. Pada saat-saat tertentu, tajuk berita mengabarkan tentang kerusuhan antiminoritas yang didukung oleh biksu Buddha yang tiba-tiba kejam di Asia Selatan, peristiwa pemboman yang diklaim oleh jaringan Muslim pinggiran di Eropa, serangan oleh kelompok radikal Yahudi sayap kanan terhadap sebuah gereja Kristen di Tanah Suci, atau analisis mengapa orang Kristen evangelis kulit putih berbondong-bondong memberikan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kandidat politik yang sangat terpolarisasi di Amerika Serikat. Konflik dan kekerasan agama tampaknya terus meningkat, dan hal tersebut dapat berkontribusi pada penderitaan manusia.

Keilmuan sosial mengabarkan bahwa eskalasi konflik sebenarnya bergeser dan berubah, bukan bertumbuh.<sup>6</sup> Dalam hal yang demikian, agama hampir tidak pernah menjadi pendorong utama dari masalah semacam itu, meskipun dalam beberapa kasus memang demikian.

---

<sup>6</sup> Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organised Violence in A Global Era*, Third Edition (Cambridge: Polity Press, 2012).

Pemicu konflik bersifat multipel dan saling berhubungan, termasuk faktor struktural, politik, ekonomi, dan sosial, selain tentunya pengaruh agama. Ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki identitas agama, denominasi, atau sektarian yang berbeda, agama dapat ditarik sebagai elemen sekunder yang kuat, dan kadang-kadang dianggap dan dialami sebagai sentral. Meskipun demikian mesti dipahami bahwa keilmuan sosial adalah satu hal, sedangkan persepsi publik dan ketakutan manusia yang absah adalah satu hal lain.

Untungnya, terdapat pula pengakuan yang semakin meningkat bahwa sumber daya yang kaya untuk perdamaian ditemukan dalam setiap tradisi agama dan kepercayaan. Setiap agama telah menginspirasi para aktivis dan penegak perdamaian di dalamnya yang mengambil ajaran agama dan tradisi untuk membantu mencegah dan menyelesaikan konflik.<sup>7</sup> Dengan demikian, para praktisi, pembuat kebijakan, dan peneliti dapat berupaya lebih baik dengan potensi konstruktif yang dapat dilakukan oleh agama dalam membangun kohesi sosial dalam masyarakat yang terpecah-pecah. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pihak pendonor bantuan dari pemerintah dan organisasi multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah melibatkan aktor agama dalam berbagai program dan proyek, dengan menghasilkan jaringan yang tumbuh pesat sehingga dapat menghubungkan antara penegak perdamaian berbasis agama dengan para mitra mereka yang berbasis sekuler.

Namun demikian, masih terdapat kecenderungan diantara banyak pembuat kebijakan dan penegak perdamaian mengkaitkan agama dengan konflik dibandingkan dengan perdamaian, serta melihat beberapa tradisi agama dengan lebih skeptis. Saat ini, lensa kecurigaan paling sering jatuh pada agama Islam dan menjadi paradigma yang memotivasi atau mempengaruhi banyak kebijakan dan program yang berfokus pada agama ini. Realitas kompleks ini menciptakan

---

<sup>7</sup> Roger S. Gottlieb, *Liberating Faith: Religious Voices for Justice, Peace, & Ecological Wisdom* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2003).

lingkungan yang sangat peka bagi setiap orang atau organisasi yang berupaya menggapai kontribusi secara bersama-sama.

Dengan adanya berita buruk tentang agama yang secara teratur tampak menjadi berita utama, dialog transparan tentang alternatif perdamaian berbasis agama sangat dibutuhkan saat ini melebihi era sebelumnya. Orang beriman sejati melakukan aktivitas nyata yang rela berkorban demi perdamaian. Dengan demikian, sekiranya perlu mengeksplorasi kontribusi signifikan dari para penegak perdamaian berbasis agama, dengan cara yang tidak mengabaikan aspek-aspek yang menantang dari praktik keagamaan, tetapi menghadapinya secara langsung dalam konteks pengalaman praktis dalam kehidupan nyata. Kajian terkait ambivalensi agama, yang berarti potensinya untuk mendorong kekerasan atau perdamaian, tampak mengemuka dalam beberapa kajian dari para peneliti.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa pengkaji yang membahas keterlibatan agama dalam konflik seringkali tampak berada dalam dua wilayah, yang keduanya agak kontradiktif: pertama, sebagian dari pengkaji tersebut menyatakan bahwa agama merupakan penghalang bagi perdamaian. Bukti dari hal ini ditunjukkan oleh berbagai konflik bernuansa agama saat ini; kedua, sebagian pengkaji menyatakan bahwa agama secara intrinsik merupakan sesuatu yang baik. Kedua posisi tersebut tampaknya merupakan sesuatu yang tidak pas, yaitu bahwa pendapat pertama (agama adalah kekuatan negatif), didasarkan pada apa yang mungkin dialami oleh orang-orang dalam praktiknya, sedangkan pandangan terakhir (agama pada dasarnya baik), didasarkan pada apa yang diyakini oleh beberapa pengkaji sebagai sesuatu yang seharusnya. Posisi yang kontras semacam ini merupakan cerminan dari ketidaksesuaian umum antara teori dan praktik, yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

---

<sup>8</sup> R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2000); Marc Gopin, *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking* (New York: Oxford University Press, 2000).

Jika benar bahwa asumsi teoretis (agama adalah sesuatu yang baik) bertentangan dengan pengalaman (bahwa agama dalam praktiknya buruk), maka hal ini juga mencerminkan sifat ambigu agama itu sendiri. Ambiguitas tersebut adalah bahwa jika agama tidak berarti damai, tidak secara otomatis mengarah pada konflik. Dari perspektif ilmu sosial - yang berbeda dari perspektif teologis kaum beriman - agama merupakan konstruksi manusia, sebagai sesuatu yang tumbuh diantara komunitas manusia dan melayani kepentingan manusia, yang dalam banyak kasus bertentangan. Dengan demikian agama dapat menjadi alat di tangan manusia yang dapat digunakan untuk tujuan baik atau tidak baik, untuk maksud dan tujuan konstruktif atau destruktif, atau untuk mengupayakan hal-hal yang bersifat positif maupun negatif. Manusalah penentunya karena ia bertindak sebagai konstruktor yang aktif.

Karakter agama yang ambigu tersebut dapat terlihat dari agama sebagai sebuah sistem makna dengan karakter yang dapat mewujudkan harapan di satu sisi dan mara bahaya di sisi yang lain. Melalui hak pilihan manusialah agama bisa menuju ke satu arah atau ke arah lain.<sup>9</sup> Oleh karena itu, demi analisis ilmiah, penting untuk menguji agama sebagai fakta sosial yang dapat dianalisis dengan cara yang sama seperti elemen penting lainnya dalam masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, dll. Semua ini adalah hasil usaha manusia yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, dengan sedikit atau banyak keberhasilan, dan dengan tingkat kepentingan pribadi yang lebih besar atau lebih kecil. Dengan menganalisis agama dengan cara yang demikian, akan tampak bahwa agama juga berpotensi untuk digunakan dengan mengorbankan kelompok tertentu, atau digunakan untuk kebaikan bersama, sama seperti kekuatan sosial lainnya. Dari perspektif ilmu sosial, tidak ada yang ilahi tentang hasil akhir dari proses semacam itu, yang sepenuhnya merupakan pekerjaan manusia.

---

<sup>9</sup> Marc Gopin, "World Religions, Violence, and Myths of Peace in International Relations," in *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil (Leiden: Brill, 2005), 35.

Seperti dikemukakan di atas, hal ini disebabkan oleh konflik yang terjadi dewasa ini bahwa faktor agama tampaknya memainkan peran, dan terutama setelah peristiwa 11 September 2001, bahwa di Barat agama sering dikaitkan dengan kekerasan. Namun, pertanyaannya adalah: apakah dalam hal ini kita sedang berurusan dengan konflik agama dalam arti yang sempit, atau apakah agama sekadar menjadi instrumen yang cocok untuk mobilisasi politik, menyediakan sumber daya yang - seperti yang lainnya - dapat dieksploitasi secara efektif untuk tujuan duniawi? Untuk menjawab pertanyaan itu, sangat penting untuk menganalisis peran agama dalam masyarakat. Hal ini penting karena pertama, untuk dapat memahami keadaan dunia saat ini dengan lebih baik; dan kedua, untuk menganalisis sifat-sifat spesifik dan potensi agama. Barulah setelah itu menjadi mungkin untuk menentukan apakah agama benar-benar merupakan sumber konflik, atau apakah agama dapat dianggap sama sebagai sumber untuk perdamaian.

Dalam batas-batas tertentu, penulis melakukan kajian terhadap wacana di atas dalam kapasitas keilmuan dan sekaligus sebagai penganut tradisi agama tertentu. Dalam studi akademis tentang agama, menggabungkan pendekatan orang dalam dan orang luar - emik dan etik - bukanlah hal yang kontroversial. Beberapa kalangan, terutama di Barat, bahkan bersikeras perlunya akademisi untuk secara kritis menjauhkan diri dari objek studi mereka. Pengkaji agama disebut sebagai kritikus budaya karena tidak dalam urusan memelihara, meningkatkan, atau mengkritik komunitas yang dipelajari, karena hal tersebut adalah urusan anggota berbagai kelompok. Pengkaji agama juga tidak dalam urusan mengajukan teori final, definitif, dan total. Sebagai kritikus budaya, kontribusinya adalah pada klasifikasi, kategorisasi dan retorika sosial.<sup>10</sup> Tetapi bagaimanapun, beberapa cendekiawan non-Barat telah menunjukkan perlunya merefleksikan dalam pekerjaan akademis mereka kondisi khusus dimana mereka

---

<sup>10</sup> Russell T. McCutcheon, *Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion* (New York: SUNY Press, 2001), 239.



berkarya dan hidup, sedemikian rupa sehingga membuat pekerjaan mereka relevan dengan masyarakat yang bersangkutan. Hal inilah yang kemudian dirujuk dengan istilah *caring critic* (kritikus peduli).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Wacana seputar konflik dan perdamaian dalam tinjauan keagamaan memerlukan uraian dan tilikan yang sistematis. Setidaknya terdapat tiga pembahasan utama yang diajukan dalam penelitian ini untuk dielaborasi secara lebih luas dan mendalam. Ketiga pembahasan tersebut sekaligus bertindak sebagai rumusan masalah untuk acuan eksplorasi naratif. Tiga masalah yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jejaring makna agama dalam wacana dan studi konflik dan perdamaian?
2. Bagaimanakah agama-agama dunia bertindak sebagai organ perdamaian?
3. Bagaimanakah peran agama sebagai pemelihara dan pengubah tatanan dunia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan tiga poin di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan isu-isu yang terkait dengan agama dalam wacana seputar konflik dan perdamaian.
2. Mendiskripsikan potensi agama-agama dunia sebagai organ perdamaian, tidak hanya pada tingkat lokal, tetapi juga internasional.
3. Mengelaborasi peran agama yang begitu luas sekaligus rumit dalam perannya sebagai pemelihara dan pengubah sebuah tatanan, dalam kaitannya dengan wacana konflik dan perdamaian.

#### D. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang agama dalam pusaran konflik dan perdamaian ini menggunakan prosedur penelitian kepustakaan (*library research*) dalam proses penyusunannya. Dengan demikian, ragam informasi yang berasal dari buku dan artikel jurnal ilmiah menjadi rujukan utama dalam mendapatkan data penelitian. Peneliti berupaya memenuhi dua kriteria utama dalam pemilihan sumber data, yaitu: a) prinsip kemutakhiran (*recency*); b) prinsip relevansi (*relevance*).<sup>11</sup>

Pada praktiknya, peneliti menelusuri berbagai sumber data untuk mendapatkan berbagai informasi, baik yang terkait langsung dengan tema penelitian ini maupun yang tidak terkait secara langsung. Peneliti menggunakan *keywords* (kata kunci) sebagai acuan dalam penelusuran sumber data tersebut, semisal perdamaian, konflik, dan pertautan agama dengan kedua wacana tersebut. Yang peneliti lakukan untuk memastikan kemutakhiran data adalah dengan memperhatikan tahun terbit dari sumber data, terutama pada artikel-artikel jurnal ilmiah. Sedangkan pada buku, perhatian terhadap tahun terbit lebih dilonggarkan karena banyak buku babon atau buku induk yang terbit pada tahun-tahun yang lampau. Disamping hal tersebut, peneliti membuat patokan untuk memastikan relevansi sumber data. Relevansi tersebut mengacu kepada tiga pembahasan utama yang dieksplorasi dalam penelitian ini, yaitu agama diantara konflik dan perdamaian, agama-agama dunia sebagai organ perdamaian, dan prakarsa dunia mengelola konflik dan perdamaian. Relevansi sumber data juga mengacu kepada pendapat-pendapat dari para sarjana utama atau akademisi yang telah lama menekuni tema serupa.

Selain tentang kemutakhiran dan relevansi, sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang langsung berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan* (Jurnal Iqra', volume 08 no 01, Mei 2014), h. 69.

sumber sekunder merupakan sumber data tambahan yang dalam pandangan peneliti menunjang informasi yang terdapat pada sumber data pokok, dimana informasi pada buku atau artikel ilmiah tersebut mendukung dan menguatkan konsep-konsep yang ada di dalam buku atau artikel primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer berdasarkan pada tema pokok tentang tiga pembahasan utama yang diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekundernya memperluas dan mendalami secara elaboratif dan eksploratif tiga pembahasan utama tersebut. Dengan demikian, sinergitas antara sumber data primer dan sekunder tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian yang baik serta narasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Secara umum mesti disadari bahwa penelitian kepustakaan mempunyai beberapa ciri, diantaranya adalah: 1) Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya; 2) Data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi ke mana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan; 3) Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Karena itulah sumber Pustaka sedikit banyak mengandung bias (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya; 4) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik dan tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis.<sup>12</sup>

Mengacu kepada ciri-ciri di atas, penelitian kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini juga dilaksanakan di ruang perpustakaan. Tetapi dalam hal ini, makna perpustakaan bergeser

---

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 4–5.

maknanya, yaitu bukan sebuah bangunan fisik, tetapi lokus tempat penyimpanan data yang siap pakai. Lokus tersebut ada dalam dunia maya, maka makna perpustakaan pun dapat dipahami sebagai perpustakaan maya. Karena itulah, data pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan dokumen-dokumen digital. Penelusuran terhadap data pustaka digital tersebut dilakukan di dunia virtual dengan mengunjungi berbagai situs dan website yang menyimpan data pustaka yang sesuai dengan tema penelitian ini. Aktivitas penelusuran telah diupayakan dilakukan semaksimal mungkin sehingga diharapkan bisa mendapatkan data-data pustaka yang dikehendaki, yaitu yang sifatnya mutakhir, memiliki kapasitas dan kualitas tingkat global, serta segaris sebangun dengan tema penelitian.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian perpustakaan ini. Setidaknya ada tiga cara sebagai berikut:

- 1) *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain;
- 2) *Organizing* yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang telah ditetapkan;
- 3) *Finding* yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Tiga teknik pengumpulan data ini peneliti lakukan sebagai langkah praktis dan pragmatis, sehingga data-data dapat terkumpul dan dianalisa dengan baik.

Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian perpustakaan ini bergerak dalam tiga pola sebagai berikut:

- 1) Deduktif yaitu pemikiran yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan melakukan pola deduktif, peneliti menganalisa wacana yang cakupannya luas dan umum, untuk peneliti tarik

secara khusus sehingga menjadi sesuatu yang khas sesuai dengan tema yang sedang dibahas;

- 2) Interpretatif, yaitu menginterpretasikan suatu makna ke dalam makna normatif. Dengan melakukan pola interpretatif, peneliti menafsirkan makna dan nilai yang terdapat pada setiap data hingga menjadi sesuatu yang dapat dipahami secara baik;
- 3) Komparatif, yaitu membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Dengan melakukan pola komparatif, peneliti membandingkan ragam dan varian konsep yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Ketiga pola tersebut peneliti lakukan dalam rangka menganalisa berbagai data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil analisa yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **E. KERANGKA TEORITIK**

Membedakan kekerasan dan perdamaian terlihat sebagai sesuatu yang mudah, meskipun tentu saja tidak selalu mampu untuk diartikulasikan dengan tepat dalam kata-kata. Ini mungkin salah satu pertanyaan tertua dan terpenting yang dihadapi umat manusia. Untuk mengatakan bahwa banyak yang telah ditulis dan diteliti tentang topik ini tentu saja merupakan pernyataan yang sembrono atau bahkan meremehkan. Tetapi faktanya memang begitu banyak teori, studi, proposisi, dan pernyataan yang telah dikemukakan dalam bidang ini. Namun demikian, atau mungkin justru karena jangkauannya yang luas, maka masih terdapat ruang-ruang eksplorasi nan kirits dalam bidang ini, apalagi bila dikaitkan dengan agama.

Istilah perdamaian tidaklah mudah untuk didefinisikan. Setiap rumpun bahasa memiliki definisinya masing-masing terhadap sebuah kosa kata atau istilah. Ragam definisi tersebut terutama dipengaruhi oleh latar kultural, sehingga makna sebuah istilah seringkali mewakili pengalaman kemanusiaan yang dialami oleh komunitas suatu bahasa pada satu wilayah tertentu. Dalam rangka komunikasi yang efektif antar manusia, maka memang arti suatu kosa kata atau istilah dari

berbagai rumpun bahasa itu dapat dipahami bersama. Namun tiap-tiap rumpun bahasa pasti memiliki keunikan tersendiri dalam mengartikan sebuah kosa kata atau istilah, sebagai representasi khas dari sebuah komunitas bahasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah damai memiliki tiga makna, sebagai berikut: 1) tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman; 2) tenteram, tenang; 3) keadaan tidak bermusuhan, rukun. Sedang *Webster's New World College Dictionary* memaknai kata *peace* dalam lima definisi, sebagai berikut: 1) *harmony in personal relations*; 2) *freedom from quarrels and disagreement, harmonious relations*; 3) *peace is calmness and tranquility, a time when there are no wars going on or the state of having no war or conflict*; 4) *the absence of war or other hostilities*; 5) (*slang*) *shortened form of peace out, goodbye*. Uraian makna dari kedua rumpun bahasa di atas menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang unik dan khas bagi masing-masing tentang bagaimana memaknai sebuah istilah. Maka istilah perdamaian (*peace*) tidaklah tunggal maknanya. Mungkin perdamaian itu seperti kebahagiaan, keadilan, kesehatan, dan cita-cita manusia lainnya, yaitu sesuatu yang diklaim dan dipuja oleh setiap orang dan budaya, tetapi hanya sedikit yang mencapai dan mempertahankannya, setidaknya secara berkelanjutan. Mengapa kedamaian, keadilan, dan kebahagiaan begitu diinginkan, tetapi juga begitu tidak berwujud dan sulit dipahami?

Kemungkinannya adalah bahwa perdamaian berbeda dengan kebahagiaan, karena tampaknya perdamaian membutuhkan harmoni sosial dan hak politik, sedangkan kebahagiaan muncul sebagian besar merupakan hal yang terkait dengan masalah individu. Kemungkinan yang lain adalah bahwa perdamaian memang menyerupai kebahagiaan individu, yaitu selalu ada dan tersirat dalam tatanan psikologis manusia dan sesekali eksplisit dalam perilaku sosial dan norma budaya manusia. Kedamaian adalah prasyarat untuk kesejahteraan emosional manusia, tetapi keadaan pikiran yang damai tunduk pada gangguan kognitif dan ledakan agresif.

Berbagai kemungkinan tersebut, menyebabkan perdamaian seringkali baru bisa dikenali dan dirasakan justru dengan ketidakhadirannya. Akibatnya, Johan Galtung telah mengusulkan

perbedaan penting antara perdamaian 'positif' dan 'negatif'. Perdamaian 'positif' menunjukkan kehadiran simultan dari banyak keadaan pikiran dan masyarakat yang diinginkan, seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain. Sedang perdamaian 'negatif' secara historis menunjukkan 'tidak adanya perang' dan bentuk lain dari konflik manusia dengan kekerasan berskala luas.<sup>13</sup>

Dengan demikian, perdamaian adalah dialektis. Dalam kehidupan manusia di dunia, perdamaian bukanlah esensi abadi dan bukan substansi ideal yang tidak berubah, atau hanya nama tanpa referensi, bentuk tanpa isi. Perdamaian tidak bisa diwujudkan oleh metafisika esensialis atau dibuat begitu saja oleh dekonstruksi postmodernis dan skeptis. Perdamaian juga bukan sekadar ketiadaan perang di dunia yang penuh dengan konflik kekerasan yang tak berkesudahan. Maka Charles Webel pun mendefinisikan perdamaian sebagai berikut: *Peace is both a means of personal and collective ethical transformation and an aspiration to cleanse the planet of human-inflicted destruction* (Perdamaian adalah sarana transformasi etis, baik secara pribadi dan kolektif, dan aspirasi untuk membersihkan planet ini dari kehancuran yang disebabkan oleh manusia).<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka cara dan tujuan perdamaian berada dalam alur evolusi dialektis yang terus-menerus. Terkadang dapat mewujudkan dan berkembang tanpa kekerasan dalam keadilan sosial dan politik, tetapi di lain waktu dan lokasi mengalami kemunduran selama periode konflik kekerasan yang akut yang melibatkan banyak pihak. Maka sama halnya dengan sejarah dan kehidupan itu sendiri, perdamaian berada pada lingkungan yang terus berubah dan tidak stagnan.

Perpektif yang disampaikan oleh Johan Galtung tentang perdamaian positif dan negatif, dapat diukur secara kontinum. Pada satu spektrum tertentu, ada yang disebut dengan perdamaian kuat dan tahan lama. Hal ini setara dengan perdamaian positif, yaitu suatu kondisi dimana terdapat keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang relatif kuat, serta kekerasan dan kesengsaraan yang relatif sedikit di

---

<sup>13</sup> Charles Webel, "Toward a Philosophy and Metapsychology of Peace," in *Handbook of Peace and Conflict Studies* (London: Routledge, 2007), 6.

<sup>14</sup> Webel, 7.

tingkat sosial. Pada spektrum lain, ada pula yang disebut dengan perdamaian lemah atau rapuh. Hal ini senada dengan perdamaian negatif dimana mungkin tidak ada perang dan kekerasan meluas lainnya dalam budaya, masyarakat, atau negara-bangsa, tetapi di dalamnya juga terdapat ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan perselisihan pribadi serta ketidakpuasan yang meluas. Dengan memperhatikan kepada sejarah peradaban manusia, maka dapat dinyatakan bahwa sedikit budaya dan masyarakat manusia yang secara historis memenuhi syarat untuk disebut sebagai perdamaian yang kuat. Sementara di sisi lain, begitu banyak yang cenderung ke perdamaian yang lemah.

Johan Galtung menyebutkan ada enam hal yang akan mendukung preferensi untuk pendekatan perdamaian pada kehidupan manusia. Keenam hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Budaya persatuan umat manusia, pembacaan lembut agama-agama abrahmik, pembacaan arus utama hindu/buddhisme dan daoisme. Tidak ada pertempuran besar yang bertindak sebagai wasit terakhir, tetapi terdapat upaya abadi manusia untuk melampaui hal tersebut.
- 2) 'Ada Tuhan di dalam setiap orang', yang berarti adanya tujuan yang absah di setiap pihak, betapapun keras dan menjijikkannya. Cara untuk dapat mengidentifikasi tujuan yang absah itu adalah dengan cara melakukan penyelidikan secara bersama, dengan kata lain melalui dialog.
- 3) Keanekaragaman sebagai sumber pengayaan bersama mengandaikan munculnya rasa ingin tahu, saling menghormati, dialog, untuk saling eksplorasi dan belajar. Timbal balik dan simetri harus diperluas ke pihak lain manapun dengan tujuan yang sah sebagaimana ditentukan oleh legalitas, hak asasi manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Diversitas itu harus pula dipandu dengan kesetaraan. Maka keberagaman dengan ketidaksetaraan merupakan pemiskinan timbal balik, dan begitu pula kesetaraan dengan keseragaman. Dengan demikian, keberagaman dengan kesetaraan berarti kedamaian.



- 4) Preferensi untuk struktur kesetaraan. Dengan demikian, keamanan berada di sebelah kanan secara politis, dan perdamaian berada di sebelah kiri. Perdamaian merupakan proposisi yang berorientasi pada kesetaraan atau revolusioner. Demokrasi dan hak asasi manusia telah menjadi penyeimbangan. Timbal baliknya adalah norma. Jika seseorang menginginkan perdamaian, maka ia mesti memberikan kepada orang lain apa yang dia kehendaki, jika mereka juga menghendakinya.
- 5) Budaya dan praktik kekuatan penyeimbang tanpa kekerasan yang didasarkan pada identitas yang kuat, tingkat kemandirian yang tinggi dan keberanian yang sangat. Hal tersebut diperlukan guna melawan pencucian otak, penyuapan, dan ancaman.
- 6) Budaya dan praktik transformasi konflik yang dipraktikkan oleh semua orang, tidak hanya oleh kalangan tertentu saja. Hal ini senada dengan gaya hidup bersih dan sehat. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan yang sah di semua pihak dan menjembatani secara kreatif bila ada kontradiksi antara tujuan tersebut, yaitu membangun perdamaian. Hal semacam ini dilakukan oleh pihak-pihak itu sendiri atau yang ada di lingkungan internal, bukan dengan memanggil spesialis dari luar atau kalangan eksternal.<sup>15</sup>

Perdamaian mungkin tidak bisa sempurna atau tanpa akhir di dunia ini. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa perdamaian tidak masuk akal dan tidak ada dalam gen manusia. Secara historis, perdamaian, seperti juga halnya dengan keadilan dan kebahagiaan, adalah kondisi yang berubah dari sifat individu dan kolektif manusia, dari jiwa dan politik manusia. Terkadang perdamaian itu tidak atau kurang mewujudkan, tetapi pada saat-saat bersejarah lainnya perdamaian itu bersinar, setidaknya pada cakrawala imajinasi dan kehendak manusia yang paling jauh. Sebagaimana semua cita-cita dan kebutuhan

---

<sup>15</sup> Johan Galtung, "Peace by Peaceful Conflict Transformation – the TRANSCEND Approach," in *Handbook of Peace and Conflict Studies* (London: Routledge, 2007), 24.

manusia yang diinginkan, perdamaian telah menjadi potensi dalam diri manusia, bahkan jika mungkin sulit untuk dilihat dan tampaknya mustahil untuk dicapai. Pencarian perdamaian mungkin tampak pelik, rumit dan kompleks, tetapi justru hal tersebut adalah bagian dari daya pikatnya. Perdamaian memang seharusnya dan seyogyanya heroik, jika memang manusia hendak bertahan hidup di dunia.

Bila istilah perdamaian begitu luas makna dan cakupannya, maka demikian pula dengan istilah konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah konflik memiliki dua makna, sebagai berikut: 1) percekocokan, perselisihan, pertentangan; 2) ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama. Sedang *Webster's New World College Dictionary* memaknai kata *conflict* dalam lima definisi, sebagai berikut: 1) *conflict means to clash with someone or something*; 2) *to be in or come into opposition, differ*; 3) *to engage in warfare*; 4) *to be antagonistic, incompatible, or contradictory, be in opposition, clash*; 5) *to fight, battle, contend*. Sebagaimana gambaran pada pembahasan sebelumnya, hampir tidak mungkin untuk menawarkan gambaran yang tepat dari bidang penelitian tentang topik konflik ini. Namun demikian, dimungkinkan untuk mengidentifikasi struktur karakteristik tertentu, terutama saat istilah konflik ini sepadu padan dengan istilah kekerasan. Dalam beberapa kasus secara historis, kedua terma tersebut sebangun dan seruang. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan dan berbagai dampak yang ditimbulkannya, tampaknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dua hal, yaitu bentuk-bentuk kekerasan yang telah didiskusikan oleh para sarjana hingga saat ini, dan esensi dari pendekatan penjelasnya.

Deskripsi akademis menyatakan dan membedakan adanya lima bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, halus, struktural, dan sah / tanpa alasan. Bentuk pertama, yang disebut dengan kekerasan fisik, memiliki arti semua kerusakan fisik yang ditimbulkan pada tubuh manusia oleh orang lain, baik langsung, seperti dengan senjata atau benda, maupun tidak langsung, seperti mengabaikan fungsi perawatan. Niat untuk menyakiti korban sering kali disoroti, yaitu jika tidak

dilakukan, tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kekerasan, tetapi kecelakaan. Tentu saja, sebagai bentuk kekerasan yang nyata, jenis kekerasan ini tidak membutuhkan banyak penjelasan.

Bentuk kedua, yang disebut dengan kekerasan psikis, memiliki arti semua interaksi manusia yang mungkin tidak membahayakan seseorang secara fisik, melainkan mengancam kesejahteraan mental dan jiwanya. Kemunculan paling populer dari kekerasan psikis ini adalah apa yang disebut dengan *bullying* (perundungan / intimidasi) atau *mobbing* (pengeroyokan). Meskipun tampaknya kekerasan psikis tidak melibatkan cedera fisik secara langsung, tetapi hal tersebut dapat membawa konsekuensi pada fisik. Dampak yang paling parah adalah penyakit psikosomatis, kecenderungan menutup diri, sampai pada tindakan bunuh diri. Dari penjelasan tersebut nampak terlihat bahwa bukanlah hal yang sederhana untuk membedakan antara kedua bentuk kekerasan ini.

Bentuk ketiga, yang disebut dengan kekerasan halus, adalah bentuk khusus dari kekerasan psikis. Contoh dari kekerasan halus biasanya terjadi pada pasangan atau keluarga, yang disebut dengan pemerasan emosional. Hal ini mengacu kepada semua bentuk komunikasi yang memaksa satu orang tertentu dalam suatu hubungan untuk bertanggung jawab atas semua masalah. Hal tersebut kadangkala muncul dalam kalimat sederhana, seperti berikut: 'Jika kamu benar-benar mencintaiku, maka kamu pasti akan mau melakukannya; Jika kamu benar-benar ada di pihakku, maka kamu pasti tidak akan keberatan untuk melakukan itu'. Sedangkan bentuk yang paling brutal adalah ancaman yang keras, dan bahkan mambabi buta, seperti berikut: 'Jika kamu meninggalkan aku, maka aku akan melakukan hal ini; Aku akan membakar apa pun yang ada di sini; Kamu tidak akan pernah melihat seluruh anggota keluargamu lagi'.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang kekerasan fisik, kekerasan halus ini juga didasarkan pada niat. Konsekuensi yang ditimbulkan bisa serupa dengan yang telah disebutkan pada kekerasan psikis, diantaranya adalah penyakit psikosomatis dan kecenderungan

untuk bunuh diri. Kekerasan halus ini memiliki kekhasannya sendiri. Ia biasanya tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan, tetapi sebagai komunikasi normal yang bisa terjadi saban hari. Karena itulah dibutuhkan diskusi yang intens dalam membicarakannya. Jika tindakan tersebut terjadi sehari-hari dan memiliki potensi berbahaya atau risiko kecelakaan yang tinggi, maka tindakan preventif perlu untuk dilakukan guna meminimalkan risiko bahaya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa bentuk komunikasi yang berpotensi merugikan ini tidak dipertimbangkan secara serius, karena apa pun bentuk kekerasannya, resiko yang ditimbulkan tetap tidak jauh berbeda.

Bentuk keempat, yaitu disebut dengan kekerasan struktural, mengacu pada kondisi dimana struktur sosial memiliki dampak kekerasan pada orang-orang yang hidup di bawahnya. Dampak tersebut bersifat merugikan. Berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, istilah ini diciptakan oleh satu orang yaitu Johan Galtung.<sup>16</sup> Ia menggambarkan kekerasan struktural sebagai dampak penghambat struktur sosial pada perkembangan manusia menuju keadaan kesejahteraan pribadi. Contoh paling populer dari kekerasan struktural adalah kondisi yang disebut *ghettos* di kota-kota besar, dimana orang-orang terpapar polusi dan kebisingan tingkat tinggi. Contoh lain adalah kondisi kerja yang sangat monoton yang seringkali dikaitkan dengan risiko kesehatan yang tinggi.

Bentuk kelima, yang dapat disebut kekerasan yang absah atau tanpa sanksi, adalah semua kekerasan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah yang tidak dituntut dan tidak ada pembatasan. Bentuk ini menggunakan segala bentuk kekerasan, tetapi dilakukan oleh aparat negara, semisal polisi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan sejenisnya. Dikarenakan dilakukan oleh aparat negara, maka hal tersebut dianggap sebagai kekerasan yang absah atau tanpa sanksi. Meskipun demikian, kiranya perlu diperhatikan bahwa melegitimasi tindakan kekerasan

---

<sup>16</sup> Johan Galtung and Dietrich Fischer, *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research* (New York: Springer, 2013).

yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang, seperti hukuman penjara, dalam hal apa pun merupakan tindakan kekerasan yang tidak kentara. Jika seseorang diperlakukan dengan kejam, dan diumumkan secara terbuka bahwa penderitaan orang tersebut adil dan bahwa orang tersebut tidak pantas dikasihani, hal itu meningkatkan derajat penderitaan. Tidak peduli posisi apa yang dipilih terhadap kekerasan yang absah atau tanpa sanksi, satu hal yang harus diakui dalam setiap kasus adalah bahwa setiap tindakan kekerasan yang absah atau tanpa sanksi adalah tindakan yang sangat brutal.

Pembahasan tentang bentuk-bentuk kekerasan di atas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibedakan dengan mudah. Jadi, misalnya, ketika individu dirugikan oleh kekerasan struktural, hal tersebut meningkatkan kerentanan mereka terhadap tindakan kekerasan psikis. Dengan berdasarkan kesengsaraan ini, orang tersebut dapat terlibat dalam kekerasan fisik dan kemudian dihadapkan dengan kekerasan yang absah atau tanpa saksi. Maka mengabaikan salah satu bentuk kekerasan di atas akan menghalangi untuk memahami perilaku kekerasan yang dilakukan. Oleh karena itu, meskipun pembedaan diantara bentuk-bentuk kekerasan ini mungkin berguna untuk studi ilmiah akademis, tetapi hal tersebut tampaknya tidak terlalu mendekati kenyataan. Deskripsi singkat ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang dapat mempertimbangkan semua bentuk kekerasan yang dapat digambarkan dan selanjutnya dapat membuat pernyataan tentang kesamaan di antara ragam bentuk tersebut.

Seperti disebutkan sebelumnya, terlalu rumit untuk mencoba meringkas semua perspektif yang telah ada pada kajian-kajian ilmiah yang membahas topik ini. Tetapi bagaimanapun, tinjauan terhadap bidang ini memungkinkan untuk mengkategorikan berbagai teori

menjadi empat aspek inti, yang masing-masing menyoroti satu aspek sebagai faktor penting.<sup>17</sup>

Kerangka pertama menganggap kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, aspek niat atau motivasi yang telah disebutkan untuk perilaku kekerasan digarisbawahi sebagai faktor krusial. Perspektif yang termasuk dalam aliran teoritis ini mengasumsikan bahwa kekerasan selalu disengaja dan memenuhi tujuan tertentu dan, atau, berfungsi sebagai strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Secara lebih sederhana dapat dinyatakan bahwa inti dari aliran teoretis ini adalah kekerasan akan dipilih ketika tampaknya menjadi strategi yang paling menjanjikan.

Aliran kedua mengidentifikasi kekerasan sebagai akibat hilangnya kendali. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengendalikan manusia, atau kemampuan pengendalian diri, disorot sebagai faktor krusial. Perspektif yang termasuk dalam aliran teoritis ini mengasumsikan bahwa perilaku kekerasan hanya terjadi dalam kondisi tertentu dan, atau, dalam situasi tertentu. Contoh yang dapat diajukan adalah teori keseimbangan kendali. Pendekatan ini mengasumsikan dua bentuk kontrol, yaitu kontrol dalam, yang dipahami sebagai pengaruh individu terhadap pembentukan lingkungan sosialnya, dan kontrol luar, yang dipahami sebagai pengaruh lingkungan sosial yang membentuk individu. Selama kedua bentuk kontrol ini seimbang, maka tidak akan terjadi apapun. Tetapi ketika keseimbangan hilang, maka hasilnya adalah kekerasan. Maka harus dicatat bentuk kontrol atas keseimbangan mana yang tidak relevan. Selain itu, pengaruh kekerasan struktural dan absah atau tanpa sanksi secara eksplisit diperhitungkan, dengan menggarisbawahi bahwa keberadaan dua bentuk kekerasan ini akan berujung pada tindak kekerasan dalam level yang kuat oleh orang-orang yang terkena dampaknya.

---

<sup>17</sup> Markus Fath, "Violence and Nonviolence/Peace: Introduction to a Holistic Approach," in *Religion and Peace: Historical Aspects*, ed. Yvonne Friedman (New York: Routledge, 2018), 11.

Aliran teoretis ketiga menganggap kekerasan sebagai daya tarik. Dalam hal ini, afiliasi antropologis untuk kekerasan disorot sebagai faktor krusial. Perspektif yang termasuk dalam aliran teoretis ini mengasumsikan bahwa kekerasan adalah aspek fundamental dari sifat atau peradaban manusia. Oleh karena itu, hanya masalah waktu saja sebelum manusia bertindak dengan kekerasan. Selain itu, manusia dan peradaban manusia membutuhkan tingkat kekerasan tertentu untuk bertahan hidup. Peradaban dianggap berdasarkan kekerasan. Peradaban juga dianggap mereproduksi dirinya sendiri melalui kekerasan. Kesimpulan dari argumentasi ini adalah bahwa masyarakat tanpa kekerasan atau damai tidak dapat diwujudkan. Hal ini semacam utopia dan lamunan khayalan belaka. Dengan demikian, setiap upaya yang ditujukan untuk tujuan tersebut pada akhirnya pasti akan gagal, karena kekerasan telah menjadi *subject matter* dari pembentukan peradaban manusia.

Aliran keempat menganggap kekerasan sebagai status yang dapat diubah dalam proses perkembangan. Dalam hal ini, tinjauan jangka panjang dari perkembangan individu disorot sebagai faktor penting. Perspektif yang termasuk dalam kerangka teori ini mengasumsikan bahwa kekerasan adalah pola perilaku yang dipelajari manusia untuk digunakan selama perkembangan dari individu. Contoh yang dapat diajukan dalam kasus ini adalah pendekatan pelabelan. Teori ini mengasumsikan bahwa reaksi lingkungan sosial terhadap suatu tindak kekerasan dapat menjadi alat untuk memprediksi apakah suatu tindak kekerasan akan kembali muncul di masa mendatang. Pertanyaan krusialnya adalah: apakah lingkungan sosial menafsirkan tindakan kekerasan seseorang dengan karakteristik pribadinya? Jika seseorang diberikan label tertentu, misalnya sebagai pengganggu, nakal dan tidak bisa diatur, kemungkinan besar nantinya dia akan menunjukkan perilaku yang dilabelkan itu lagi. Dengan kata lain, individu tersebut menerima dan menginterpretasikan pada dirinya bahwa perilaku kekerasan adalah bagian dari kepribadiannya. Bagaimanapun, pertimbangan argumen ini menyiratkan bahwa jika kekerasan adalah

sebuah pola perilaku yang dipelajari oleh individu untuk dilakukan, maka sangat dimungkinkan juga untuk melupakan pola tersebut. Sebagai gantinya, individu ini dapat mempelajari pola perilaku non-kekerasan atau damai sebagai perkembangan berikutnya dari kepribadiannya.

Upaya penjabaran terhadap esensi dari empat aliran teoretis yang telah dikarakterisasi secara singkat di atas mengarah pada kesimpulan yang serupa dengan kesimpulan yang diperoleh tentang bentuk-bentuk kekerasan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan antara keempat faktor penting ini mungkin berguna untuk membangun kategori ilmiah akademis, tetapi nampaknya tidak membantu pada deskripsi yang realistis sebagaimana kenyataan di lapangan. Agak lebih realistis untuk menyatakan bahwa semua faktor ini, baik faktor motivasi dan niat, kemampuan untuk mengontrol diri, afinitas tertentu dari sifat manusia dan peradaban dengan kekerasan, maupun efek dari proses perkembangan jangka panjang, selalu memainkan peran penting dalam perbedaan antara kekerasan dan non-kekerasan atau perdamaian. Karena itulah, setiap upaya untuk memutuskan aliran teoritis mana yang lebih benar daripada aliran yang lain, nampaknya sia-sia dan tidak membantu sebagai refleksi analitis. Agak lebih bermanfaat untuk mencari model teoritis yang menunjukkan bahwa semua faktor di atas saling terkait. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, karena semuanya bersesuaian. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa dengan melihat dan memperhatikan lebih dekat elemen inti dari empat aliran teoritis di atas menyoroti perlunya pendekatan holistik terhadap berbagai bentuk kekerasan apa pun.

Selain empat perspektif di atas, terdapat tinjauan lain yang juga mengelaborasi berbagai penyebab konflik yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Tinjauan berikut terdiri dari konsep-konsep yang saling terkait yang merupakan struktur kausal rangkap empat, dalam



upaya manusia dalam memburu dan mencari kebenaran yang diperebutkan:<sup>18</sup>

Penyebab pertama adalah penyebab material, yang terdiri dari keterikatan ekologis dan geografis yang tak terhindarkan dari konflik. Tujuan dari penyebab ini adalah untuk mengungkapkan ekologi yang unik, geografi yang diperebutkan atau lokalitas, peta yang bersaing atau diperebutkan, dan tipologi aktual atau persepsi manusia tentang lokalitas yang sering terlibat dalam konflik kekerasan manusia. Penyebab material sebagai situs ontologis yang unik dalam waktu dan tempat yang tak terelakkan menjadi ciri kehidupan manusia.

Penyebab kedua adalah penyebab efisien atau agensi manusia, yang terdiri dari perilaku, kebutuhan, dan emosi manusia yang bersaing atau diperebutkan yang terlibat dalam konflik manusia dengan kekerasan. Penyebab ini juga mencakup sejarah yang diperebutkan dimana konfrontasi, serangan, dan pertempuran aktual terjadi yang sering menjadi ciri kelompok dalam konflik yang sebenarnya. Analisis emosional dari konflik kekerasan manusia adalah salah satu konstruksi kausal yang sering hilang, namun jelas rasa sakit hati atau kemarahan yang mendalam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap konflik manusia.

Penyebab ketiga adalah penyebab epistemik sebagai penyebab formal yang didefinisikan sebagai cara-cara manusia menggambarkan struktur yang dihasilkan. Penyebab formal dapat dicirikan sebagai klaim kebenaran yang menggambarkan dan membenarkan suatu pernyataan verbal. Oleh karena itu, yang termasuk dalam penyebab epistemik adalah klaim pengetahuan yang bersaing, sejarah yang diperebutkan, identitas, wacana dan narasi yang bersaing serta didefinisikan secara sosial oleh semua komunitas epistemik yang

---

<sup>18</sup> Thomas E. Boudreau, "When the Killing Begins: An Epistemic Inquiry into Violent Human Conflict, Contested Truths, and Multiplex Methodology," in *Critical Issues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice, and Pedagogy*, ed. Thomas Matyók, Jessica Senehi, and Sean Byrne (Lanham: Rowman & Littlefield, 2011), 25.

terlibat dalam konflik manusia dengan kekerasan, dimana hal tersebut digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan mereka termasuk diantaranya merendahkan dan melegitimasi pembunuhan terhadap manusia lain.

Penyebab keempat dalam suatu perjuangan mematikan bisa berupa kehendak untuk berkuasa atau bisa juga berupa kehendak untuk memberdayakan, tentunya dengan menggunakan metode intervensi dan transformasi resolusi konflik yang sesuai yang menguntungkan secara potensial semua pihak dalam konflik kekerasan manusia. Dalam hal ini, intervensi pihak ketiga dan upaya resolusi konflik dapat memainkan peran terbesar, terutama dengan memberikan kerangka pemahaman atau kerangka alternatif pemahaman kepada masing-masing pihak. Bisa juga dengan cara mencari kesamaan dalam narasi yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok yang bersaing.

Berdasarkan pemaparan tentang perspektif dan tinjauan berbagai penyebab konflik di atas, maka dapat dinyatakan bahwa alat penyelesaian konflik adalah mediasi. Dalam hal ini, terdapat lima poin yang terlibat dalam mediasi:

- 1) Resolusi Orientasi: Akar penyebab kekerasan biasanya konflik yang belum terselesaikan. Konflik harus diidentifikasi dan kemudian solusi harus ditemukan.
- 2) Tujuan dan Cara yang tidak selaras: seseorang cenderung menilai dirinya sendiri berdasarkan niat terbaiknya, yaitu tujuan, dan kemudian menilai musuhnya berdasarkan perilaku terburuk mereka, yaitu sarana. Maka langkah terbaik adalah mengidentifikasi niat atau tujuan terbaik mereka, kemudian melihat dan meninjau perilaku atau cara dirinya sendiri. Dua pekerjaan yang sangat diperlukan dan dibutuhkan ini seringkali paling baik dilakukan oleh mediator dari pihak luar, karena mediator bisa melihat kedua pihak secara seimbang.
- 3) Pemetaan konflik: Identifikasi para aktor, tujuan dan cara mereka, serta ketidaksesuaian mereka dengan empati.

- 4) Legitimasi: Uji tujuan dan cara untuk legitimasi dengan menggunakan hukum, Hak Asasi Manusia dan kebutuhan dasar sebagai standar dan patokannya, dengan cara tidak memihak manapun.
- 5) Menjembatani: Jelajahi realitas sosial baru dimana tujuan yang sah dan dikehendaki dari semua pihak mungkin cukup terpenuhi dengan kreativitas.<sup>19</sup>

Masalah yang berkaitan perdamaian dan konflik ini berada di masa mana pun, baik pada masa lalu, pada masa sekarang dan di masa depan. Terdapat trauma pada masa lalu, dan metode solusinya adalah konsiliasi. Jangkauan trauma ini bisa sangat panjang. Tidak hanya terhitung hari, bahkan mungkin dekade atau berabad-abad. Dikarenakan hal ini merupakan sesuatu yang melukai dan merusak tatanan sosial, maka diperlukan upaya-upaya mengobati dan menatanya kembali melalui pengakuan dan mempersiapkan segala sesuatunya demi masa depan yang kooperatif. Terdapat pula konflik masa kini, dan metode solusinya adalah mediasi untuk resolusi konflik. Konflik-konflik tersebut tidak harus diselesaikan cara kekerasan yang brutal dan membabi buta, tetapi untuk diurai. Terdapat pula tantangan di masa depan, dan metode solusinya adalah proyek pembangunan perdamaian, kerjasama, serta simbiosis yang menghasilkan harmoni dan keselarasan. Pada ketiga masa tersebut, agama turut andil sebagai pihak yang ikut terlibat. Agama memang bukan satu-satunya pihak, tetapi tak dapat dipungkiri ia menjadi salah satu pihak yang paling memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan.

---

<sup>19</sup> Johan Galtung, "Peace and Conflict Studies as Political Activity," in *Critical Issues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice, and Pedagogy*, ed. Thomas Matyók, Jessica Senehi, and Sean Byrne (Lanham: Rowman & Littlefield, 2011), 17.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. AGAMA DIANTARA KONFLIK DAN PERDAMAIAN**

Peradaban manusia telah menyaksikan ragam konflik dan upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dunia tidak hanya mewarisi keamanan dan kenyamanan hidup, tetapi juga kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan di berbagai bidang. Dalam kesemua hal itu, agama mengambil porsinya sendiri. Terkadang dalam sakal kecil dan samar-samar, tetapi tidak menutup kemungkinan menjadi garda terdepan sebagai mesin pendorong dan penggerakannya.

##### **1. Pertautan Konflik dan Agama**

Kecenderungan untuk mengasosiasikan agama dengan konflik sangat menonjol dalam kajian-kajian di Barat, dengan dilatarbelakangi oleh sejarah pemisahan gereja dan negara, dan pemisahan kekuasaan sekuler dan spiritual yang berlaku di masyarakat, sehingga menurunkan peran agama dalam ranah publik. Tetapi tampaknya apa yang disebut sebagai privatisasi agama mencapai batasnya pada peradaban dunia yang telah mengalami perubahan dramatis sejak akhir perang dingin. Perubahan ideologi yang dihasilkan oleh gerak sejarah tersebut telah menciptakan ruang baru untuk memperkenalkan kembali ideologi agama. Meskipun hingga saat ini perpecahan ideologis utama di dunia adalah antara ideologi sekuler, seperti antara kapitalisme dan Marxisme, tetapi sekarang ini hal tersebut lebih mungkin terjadi antara ideologi-ideologi agama. Contoh paling jelas dari yang terakhir ini adalah tumbuhnya rasa dan sikap antagonisme antara pemeluk Kristen dan Islam.

Perubahan ideologi yang terjadi sejak tahun 1990-an telah mengubah hubungan antara agama dan politik sedemikian rupa, sehingga menegaskan pembenaran pada gagasan yang telah tersebar

luas bahwa jika ada agama maka terdapat konflik. Hal ini tidaklah mengherankan, dalam artian bahwa setiap kali terjadi konflik politik, maka hal tersebut tercermin dalam ideologi dominan yang saat ini seringkali bersifat religius. Serupa dengan ideologi sekuler, ideologi agama memiliki pembenaran teologis tersendiri dalam menggunakan kekerasan yang merupakan bagian dari sejarahnya. Agama Kristen, misalnya, membanggakan sejarah bahwa gagasan tentang perang yang absah tidak hanya diterima secara umum, tetapi lebih khusus lagi dapat memberikan pembenaran bagi kelompok-kelompok revivalis Kristen saat ini untuk menyatakan perang terhadap musuh, baik dari kalangan agama maupun sekuler. Dalam konteks ini, dapat disebutkan pula bahwa teologi pembebasan Kristen seperti yang kebanyakan dianut oleh politik kiri adalah elaborasi modern dari teori perang yang absah tersebut.

Demikian pula dalam Islam, konsep jihad, yaitu suatu ide spiritual yang dapat diterapkan pada wilayah lahiriah dalam kondisi tertentu terutama untuk tujuan pembelaan diri, telah terbukti membantu dalam membenarkan dan merasionalisasi penggunaan kekerasan di zaman modern. Para pendiri Hamas, misalnya, telah memperluas gagasan pertahanan diri melampaui kesejahteraan fisik individu untuk mencakup pertahanan martabat dan harga diri mereka. Dalam Yudaisme juga, kelonggaran dibuat untuk kebutuhan berperang yang absah dalam keadaan tertentu dengan menafsirkan kembali sumber-sumber sejarah sedemikian rupa untuk membenarkan, misalnya, kekerasan saat ini terhadap orang-orang Palestina. Berdasarkan hal di atas, tampaknya semua tradisi agama-agama dunia, terutama agama yang berdasarkan kitab, memperbolehkan penggunaan kekerasan.<sup>20</sup> Gagasan yang demikian telah meninggalkan jejaknya dalam masyarakat sekuler yang melegitimasi penggunaan kekerasan dalam situasi luar biasa yang dikenal sebagai perang, termasuk perang melawan teror global saat ini.

---

<sup>20</sup> Mark Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence* (Berkeley: University of California Press, 2000).

Namun tidak ada bukti bahwa ideologi agama lebih berbahaya daripada ideologi lainnya. Jika memperhatikan sejarah dewasa ini, terlihat bahwa pertumpahan darah terbesar terkait dengan ideologi sekuler bukanlah agama. Konflik terbesar di dunia pada abad ke-20, yang mengakibatkan genosida dan pembantaian dalam skala yang sebelumnya tidak pernah terdengar, semuanya terkait dengan ideologi yang dalam beberapa kasus masih berakar pada nilai-nilai sekuler. Beberapa kejadian yang dapat dijadikan rujukan adalah pada ideologi rasis Nazi Jerman, yang mengakibatkan jutaan orang tewas selama Perang Dunia II; juga tentang jutaan orang mati yang dimotivasi oleh pembersihan ideologis Stalinis dan Marxis, terutama di bekas Uni Soviet, atau oleh rezim Pol Pot di Kamboja; rujukan serupa juga dapat diarahkan pada korban tewas yang tak terhitung jumlahnya di Cina, yang diilhami oleh ideologi politik Ketua Mao selama Revolusi Kebudayaan; dan yang terjadi baru-baru ini adalah peristiwa genosida Rwanda yang tidak akan diklaim oleh siapa pun sebagai sesuatu yang diilhami oleh agama. Tentu saja, kejahatan yang massif mungkin dilegitimasi secara agama, tapi hal tersebut adalah persoalan yang berbeda. Nyawa-nyawa yang melayang tersebut telah dengan sengaja dimusnahkan melalui pembantaian bermotif politik sejak awal abad ke-20. Hal ini dilakukan untuk tujuan pemaksaan utopia yang sebagian besar telah menggantikan agama. Sejumlah konflik yang bermotif politik telah secara signifikan menyebabkan pertambahan hilangnya nyawa manusia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bukti sejarah menunjuk ke arah yang berbeda dari yang diperkirakan banyak orang saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa semua ideologi, apakah itu buatan manusia atau diyakini diilhami secara ilahi, memiliki sifat ambigu, meskipun bentuk dari ambiguitas ini mungkin berbeda. Semua ideologi dapat digunakan dan pada kenyataannya difungsikan untuk melayani kepentingan manusia. Salah satu kepentingan utama tersebut adalah di bidang politik. Manipulasi politik terhadap agama mungkin adalah cara yang paling sering digunakan, atau dalam pandangan tertentu,

disalahgunakan pada masa sekarang. Manipulasi politik terhadap agama telah terbukti, misalnya, dalam perang Balkan di Eropa yang terjalin hubungan antara agama dan nasionalisme. Terlihat juga proses yang serupa di India dalam bentuk nasionalisme Hindu.<sup>21</sup> Contoh lain dari ekstremisme agama dari bagian lain dunia dapat dengan mudah ditambahkan, dan dari semua agama besar. Banyak sekali contoh agama yang digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan dengan cara kekerasan. Mereka memiliki kesamaan kapasitas yang telah terbukti untuk menciptakan malapetaka melalui penggunaan kekerasan, kadang-kadang secara besar-besaran dan massif. Dalam hal itu, ekstremis agama tidak berbeda dengan ekstremis ideologis lainnya. Mereka serupa, sebangun dan seruangan.

Penting pula untuk disadari bahwa ekstremisme agama sama sekali tidak eksklusif bagi satu agama tertentu saja. Sebagian besar agama dicirikan oleh keragaman pandangan dan kecenderungan yang bervariasi, dan sebagian besar pemeluk agama di dunia tidak berada di ujung yang ekstrem, melainkan di tengah, seperti kebanyakan orang mengambil posisi tengah dalam politik. Orang-orang yang berada pada posisi tengah seperti itu bisa menjadi sasaran ekstremis yang seagama dengan mereka, yang cara dan metodenya mereka tolak. Meskipun demikian, baik kubu moderat maupun ekstremis dalam kelompok agama tertentu mungkin memiliki tujuan politik yang sama, bahkan jika metode mereka berbeda. Dengan demikian, serangan 9/11 berperan penting dalam menyatukan opini Muslim pada beberapa masalah politik yang belum terselesaikan, termasuk diantaranya konflik Israel-Palestina, berlanjutnya kehadiran pasukan AS di Arab Saudi setelah Perang Teluk, dan karena itu mengontrol akses ke tempat-tempat suci Muslim, dan sanksi terhadap Irak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Chakravarthi Ram-Prasad, "Being Hindu and/or Governing India? Religion, Social Change and the State," in *The Freedom to Do God's Will: Religious Fundamentalism and Social Change*, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil (London: Routledge, 2003), 159.

<sup>22</sup> Tayseer Allouni, "A Discussion on the New Crusader Wars: The Unreleased Interview with Usamah Bin Laden," 2001,

Meskipun pasukan AS kemudian ditarik dari Arab Saudi, perang melawan Irak ternyata menciptakan masalah politik yang lebih besar. Muslim di seluruh dunia cenderung semakin merasa bahwa keluhan politik mereka tidak diakui oleh dunia Barat. Mereka melihat bahwa pemerintah Barat mendukung rezim yang menindas dan bahkan brutal, termasuk rezim Muslim, jika hal tersebut cocok bagi mereka. Mereka menyadari akan kekuatan dominan Barat di hampir setiap aspek kehidupan saat ini. Ekspansi global kekuatan Barat, berdampak memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin di dunia, menciptakan populasi besar yang terpinggirkan dan tersisih karena mereka memiliki sedikit akses ke sumber kekayaan dan kekuasaan. Pengalaman atau persepsi pengucilan semacam ini telah menjadi alasan utama munculnya ekstremisme agama di seluruh dunia.<sup>23</sup>

Sementara mengakui pentingnya masalah duniawi semacam ini, mestilah dihindari penjelasan secara reduksionis, yaitu perlunya untuk mengakui potensi yang melekat dalam agama dan imajinasi religius. Gagasan tentang kemartiran dan pengorbanan diri, misalnya, yang berkaitan dengan dunia yang diyakini ada di luar yang terlihat dan nyata ini, mengakar secara mendalam dan memberikan motif yang sangat kuat bagi mereka yang merasa tertarik padanya. Mark Juergensmeyer menciptakan istilah *performance violence* (pertunjukan kekerasan) untuk menjelaskan karakter teatral dan dramatis dari tindakan ekstremis religius. Terdapat berbagai pernyataan dramatis yang tidak dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan strategis tertentu, tetapi untuk mengesankan pada orang yang melihat tentang signifikansi simbolis mereka. Karena itu, pertunjukan kekerasan yang mereka lakukan dapat dianalisis dengan cara yang sama sebagaimana simbol,

---

<https://english.religion.info/2002/07/20/document-the-unreleased-interview-with-usamah-bin-laden/>.

<sup>23</sup> Chandra Muzaffar, "Religious Conflict in Asia: Probing the Causes, Seeking Solutions," in *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttill (Leiden: Brill, 2005), 64–66.



ritual, atau adegan sakral lainnya.<sup>24</sup> Dari perspektif ini, serangan 9/11 juga dapat dilihat sebagai adegan yang dimaksudkan untuk memberikan dampak pada orang yang melihatnya. Peran media, sebagai salah satu kekuatan globalisasi yang paling kuat, sangat penting dalam hal ini. Hal yang demikian juga bisa disematkan pada tindakan serupa pada konflik-konflik agama yang muncul di Kawasan Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan seperti itu dilakukan tidak hanya untuk menjangkau pemirsa tingkat lokal atau pun regional, bahkan dimaksudkan untuk dipertontonkan kepada penonton televisi di seluruh dunia.

Pemahaman tentang kekerasan terkait agama dalam artian adegan sakral dan pertunjukan publik, atau sebagai peristiwa sosial dengan aspek nyata dan simbolik, dapat membantu dalam analisis agama sebagai sumber konflik. Hal ini mungkin juga membantu, seperti yang diperlihatkan Daniel Míguez, dalam mempertimbangkan cara-cara menangani konflik agama. Argumennya ditujukan untuk menunjukkan bahwa konflik agama dapat dikelola selama masih dalam batas-batas tertentu yang mencegah terjadinya kekerasan. Dengan rujukan khusus ke Amerika Latin, ia menyarankan bahwa untuk menghindari jenis konflik terbuka yang dengan mudah mengarah pada kekerasan fisik, maka konfrontasi simbolis mesti diperbolehkan dan bahkan mungkin didorong. Alih-alih mencoba menghilangkan semua konflik, Míguez berpendapat bahwa upaya apa pun harus dilakukan, baik oleh orang beragama itu sendiri maupun oleh orang-orang di luar lingkaran mereka, seperti para pembuat kebijakan dan juga pihak-pihak yang berkepentingan untuk membangun perdamaian, untuk menjaga konflik tetap berada dalam koridor dan batas-batas, dengan memungkinkan adanya kutukan simbolis orang lain melalui ritual dan wacana.

Strategi religius populer yang didasarkan pada kontestasi simbolis tentang tatanan sosial memberikan orang-orang rasa harga diri dan

---

<sup>24</sup> Juergensmeyer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, 125–26.

martabat yang biasanya disangkal. Strategi semacam itu juga memberikan mereka seperangkat nilai alternatif daripada yang lazim berlaku dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Di Amerika Latin, seperti yang ditunjukkan Míguez, tatanan sosial sering diperebutkan melalui simbolisme agama. Dalam kasus seperti itu, agama biasanya lebih memainkan peran adaptif daripada peran konfrontatif. Salah satu contohnya adalah melalui mitologi setan, yang paling dikenal di Amerika Latin melalui karya Michael Taussig.<sup>25</sup>

Jenis mitologi semacam itu saat ini bergema dalam teologi perang spiritual yang begitu menonjol dalam wacana Pantekosta yang populer. Dapat pula dicatat dalam konteks ini bahwa konfrontasi simbolik sebagai cara untuk menghindari konflik kekerasan juga telah terjadi di belahan dunia lain. Lomba menyanyi di antara masyarakat Inuit, yang merupakan cara yang diterima secara budaya untuk mengutuk perilaku orang lain tanpa menggunakan kekerasan fisik, adalah salah satu contohnya. Popularitas sepak bola di seluruh dunia, serta olahraga populer lainnya, sering dijelaskan dengan istilah serupa. Poin penting di sini adalah bahwa semua tradisi agama memiliki sarana simbolis yang mereka miliki untuk melawan kejahatan yang nyata dan gamblang yang mungkin dialami oleh mereka yang menganutnya. Untuk merefleksikan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk menghindari konfrontasi kekerasan yang sebenarnya antar pemeluk tradisi agama yang berbeda adalah pertanyaan yang muncul sebagai masalah hidup dan mati di banyak masyarakat agama majemuk saat ini.

Dalam menganalisis situasi konflik, seseorang mesti menyadari sepenuhnya konteks sosio-politik dimana agama-agama memainkan perannya, bahkan seringkali sebagai peran negatif. Seperti yang ditunjukkan Chandra Muzaffar, seringkali bukan doktrin dan praktik agama yang bertentangan, melainkan para penganut yang

---

<sup>25</sup> Daniel Miguez, "From Open Violence to Symbolic Confrontation: Anthropological Observations of Latin America's Southern Cone," in *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil (Leiden: Brill, 2005), 94–95.

mempraktikkan ajaran agama tersebut. Ia menegaskan bahwa lebih dari sikap budaya, hal itu adalah interaksi kekuatan ekonomi yang telah memperburuk hubungan antar komunitas agama yang berbeda. Dia secara khusus menarik perhatian pada masalah migrasi, masalah yang diperdebatkan dengan hangat di hampir semua bagian dunia saat ini. Berdasarkan pengalaman Asia, Muzaffar menunjukkan bagaimana pembangunan yang tidak merata berdampak pada tren dan kecenderungan sosial-ekonomi, seperti terjadinya migrasi sejumlah besar orang yang tergabung dalam komunitas agama tertentu ke tempat lain yang ternyata tempat tersebut telah dihuni oleh orang-orang yang beragama lain. Dikotomi antara migran dan pemukim inilah, menurutnya, yang telah memperburuk ketegangan agama antara umat Muslim dan kaum Kristen di Asia.<sup>26</sup>

Contoh yang lain datang dari wilayah Afrika, yaitu di Kawasan Pantai Gading, yang biasanya direpresentasikan sebagai pertempuran antara bagian Selatan Kristen dan bagian Utara Muslim. Penjelasan semacam itu bukannya tanpa kebenaran, karena memang ada contoh orang Kristen dan Muslim yang bertikai satu sama lain di Pantai Gading, di tempat-tempat dimana mereka hidup bersama secara damai hingga kurang dari lima tahun yang lalu. Namun, ada cara lain untuk mempertimbangkan konflik ini yang lebih bermanfaat karena memiliki kekuatan penjas yang lebih besar, yaitu merujuk pada konflik kepentingan yang terjadi antara pemukim dan imigran. Hal yang demikian lebih merupakan paradigma sosial daripada paradigma budaya. Di bagian selatan Pantai Gading, para imigran dari Sahel biasanya diasosiasikan dengan Islam. Tapi ketika masjid mereka dibakar di selatan, maka hal itu bukan sebagai simbol Islam, tetapi sebagai simbol kehadiran para migran.

Berdasarkan hal di atas, maka bukanlah agama yang menjadi *subject matter* dari permasalahan, tetapi migrasi, baik tingkat regional maupun internasional, yang merupakan masalah politik yang benar-benar

---

<sup>26</sup> Muzaffar, "Religious Conflict in Asia: Probing the Causes, Seeking Solutions," 65–66.

kontroversial di seluruh dunia. Menempatkan konflik lokal dalam debat internasional tentang migrasi tidak hanya menghubungkannya dengan apa yang dianggap sebagai salah satu isu penting dalam politik saat ini, tetapi juga menjelaskan peran agama dalam konflik. Migrasi dan kehadiran komunitas migran, baik di Afrika, Eropa atau dimana pun, dilambangkan dengan perbedaan agama, yang dipahami sebagai bentuk *otherness* (keanehan). Hal ini bisa saja dieksploitasi secara politis untuk menciptakan dualitas kelompok, yaitu kelompok di dalam dan kelompok di luar, atau dengan kata lain menciptakan politik identitas. Dalam kasus-kasus semacam ini, agama tidak boleh disalahartikan sebagai masalah yang sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah tekanan untuk berbagi sumber daya dengan orang lain, entah hal itu ada di wilayah Afrika, Eropa, Asia, atau Amerika. Tanpa upaya mengurangi tingkat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di dunia, serta menunjukkan kesediaan untuk berbagi sumber daya dunia, maka akan selalu ada tempat berkembang biak bagi ekstremisme, baik dengan orientasi agama maupun sekuler.

Semua ini, sekali lagi, bukanlah untuk menyangkal potensi konflik yang melekat pada agama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana potensi ini dapat direduksi atau diubah sedemikian rupa untuk mengarahkannya menjadi instrumen perdamaian. Dalam pandangan ini, Gopin memberikan kritik serius terhadap teori dan praktik ilmu sosial konvensional mengenai resolusi konflik. Menurutnya, ilmu sosial konvensional itu tidak mampu memahami dan melibatkan komunitas religius yang selama ini menjadi sumber perilaku yang menimbulkan konflik. Kritiknya terutama ditujukan pada aliran pemikiran yang dikenal sebagai teori *Human Needs* (Kebutuhan Manusia), yang pada dasarnya menjelaskan konflik dalam istilah perampasan. Teori semacam itu, dalam pandangannya, mengabaikan motivasi individu orang beriman, dimana persepsi konflik juga diarahkan oleh kepentingan spiritual. Karenanya, menurut Gopin, penting untuk mengembangkan teori yang menjelaskan mengapa dalam beberapa keadaan orang bertindak dengan cara yang

merongrong pemenuhan kebutuhan dasar mereka, termasuk penghancuran diri. Dengan kata lain, tantangannya adalah untuk memahami *unpredictable and powerful nature of religious commitment* (sifat komitmen keagamaan yang tidak dapat diprediksi dan kuat).<sup>27</sup> Dia mengambil sikap kritis serupa terhadap pendekatan psikologis dalam penyelesaian konflik yang dia anggap sebagai *emotional reductionism* (reduksionisme emosional).

Pertanyaannya kemudian adalah: alternatif apa yang ada untuk mencegah dan mengubah konflik manusia? Pencarian jawabannya bisa saja ditemukan dalam diskusi tentang nilai-nilai kritis atau *lived moral values* (nilai-nilai moral yang dihayati) yang bersumber dari berbagai tradisi agama, yang mungkin menjadi dasar penyelesaian konflik antaragama. Terdapat sejumlah nilai kritis yang teridentifikasi dan ditemukan di banyak tradisi keagamaan dunia. Chandra Muzaffar melihat konteks umum yang dapat mengurangi potensi konflik. Tapi, seperti yang dia jelaskan, tidak hanya reformasi politik, ekonomi atau sosial saja yang akan mencegah perselisihan agama antar komunitas. Pemahaman keagamaan itu sendirilah yang harus berubah. Masalah sebenarnya, dalam pandangannya, terletak pada cara agama dipahami dan dipraktikkan. Untuk mempengaruhi perubahan dalam hal ini, pemahaman tentang agama perlu diperluas sedemikian rupa untuk meyakini dan memaklumkan kesatuan manusia yang paling hakiki. Potensi transformatif agama sesungguhnya terletak pada warisan spiritual dan moral bersama umat manusia.<sup>28</sup>

Tampaknya, salah satu mekanisme efektif dalam pengelolaan konflik terletak pada pembentukan hati nurani individu. Hal ini membutuhkan evaluasi kritis terhadap bahan yang digunakan untuk pelajaran agama, serta metode yang digunakan dalam proses pembentukan kesadaran. Hal ini menjadi prioritas dengan mengingat

---

<sup>27</sup> Gopin, "World Religions, Violence, and Myths of Peace in International Relations," 36–39.

<sup>28</sup> Muzaffar, "Religious Conflict in Asia: Probing the Causes, Seeking Solutions," 72–78.

dan mempertimbangkan bahwa konflik melibatkan laki-laki dan perempuan dari berbagai komunitas agama yang melakukan kekerasan atas nama agama masing-masing. Sifat ambigu pada agama menunjukkan bahwa ambiguitas semacam itu bukanlah karakteristik dari satu tradisi agama tertentu, tetapi merupakan fitur yang melekat dari semuanya. Hal tersebut juga tercermin pada tiga agama Ibrahim yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kitab-kitab suci yang mendasari tradisi-tradisi ini telah melahirkan teologi-teologi yang membenarkan dan membela penggunaan kekerasan, terutama terhadap mereka yang tidak memiliki keyakinan yang sama. Tetapi di sisi lain, tradisi-tradisi ini telah memberikan visi yang brilian dan menakjubkan bagi para penganutnya dalam upaya-upaya perdamaian.

Kecenderungan saat ini ke arah fundamentalisasi yang dapat diamati dalam Yudaisme, Kristen dan Islam tampaknya memberikan perdebatan teologis tentang penggunaan kekerasan dengan sebuah pembenaran baru. Sebagaimana gambaran dari konflik antara Israel dan Palestina, mungkin saat ini hal tersebut semakin berurusan dengan bentrokan antara liberalisme politik dan fundamentalisme agama di dalam masing-masing faksi yang bertikai, yang menunjukkan konflik internal, dan bukan hanya bentrokan antara kaum Yahudi di satu pihak dan kaum Muslim di pihak yang lain. Isu pelanggaran hak asasi manusia mengemuka melambiri konflik tersebut. Maka hubungan antara agama dan hak asasi manusia menjadi sudut pandang tersendiri dalam setiap konflik. Wacana ini tidak selalu berjalan dengan mulus dalam pembahasannya, karena ada beberapa aspek tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

Aspek-aspek tertentu yang dapat dianalisis tersebut antara lain adalah serangkaian dikotomi, misalnya individualisme versus kolektivisme, universalisme versus relativisme, dan hak versus tanggung jawab. Dalam ketiga hal tersebut, dapat teridentifikasi titik-titik konflik dan juga kohesi. Namun yang juga mesti dimengerti dan dipahami adalah bahwa mempertimbangkan hal ini pada tingkat teoritis adalah satu hal, tetapi dalam praktiknya adalah hal yang

berbeda. Karena itu dapat dinyatakan bahwa hubungan antara keduanya, yaitu agama dan hak asasi manusia, tetaplah kompleks. Meskipun demikian, masih terdapat jalan yang dapat dilalui oleh peradaban manusia dalam menanggulangnya, yaitu supremasi hukum dan pendidikan. Kedua hal ini dapat memberikan kontribusi yang penting dan fundamental bagi terciptanya budaya hak asasi manusia pada setiap ruang dan waktu. Fakta bahwa sebagian besar orang di dunia ini menganut sebuah agama atau aliran kepercayaan tertentu merupakan sebuah alasan penting untuk mempertimbangkan agama sebagai penyusun hak asasi manusia. Dilihat dari sudut pandang intelektual maupun praktis, tampaknya logis untuk menyatakan bahwa semua sumber daya manusia dalam suatu masyarakat harus digunakan untuk kebaikan umat manusia, tidak hanya sumber daya material dan intelektual, tetapi juga sumber daya religius dan spiritual. Meskipun dalam prakteknya agama sering kali menjadi penghalang bagi perdamaian, namun hal ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa demikianlah adanya. Agama juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempromosikan kerukunan dan perdamaian sosial, serta dapat memberikan alternatif tentang cara-cara transformasi semacam itu mungkin terjadi dan dilaksanakan.

## 2. Agama sebagai Sumber Perdamaian

Berbagai upaya peradaban modern dalam memelihara perdamaian dan menegakkan hak asasi manusia telah terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 merupakan contoh bahwa berbagai ideologi, baik yang bersifat sekuler maupun religius, dapat dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Deklarasi Universal tersebut dirancang oleh sebuah tim yang terdiri dari orang-orang dari tradisi agama yang beragam dan berbeda, namun mampu bekerja bersama-sama. Kelompok inti penyusun termasuk perwakilan dari berbagai negara seperti Australia, Chili, Cina, Prancis, Lebanon, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Karena itulah, ada pengaruh yang signifikan dari perancang Muslim serta sosialis Amerika

Latin tentang pencantuman hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dalam Deklarasi yang dilakukan.<sup>29</sup>

Di kalangan agama, upaya untuk membangun landasan yang sah bagi agama sebagai sumber perdamaian diupayakan terutama dengan menyoroti aspek-aspek kitab suci dan tradisi yang kondusif untuk penilaian positif agama dalam kehidupan publik. *Spirit of universal unity* (Semangat persatuan universal) terdapat di semua tradisi agama. Dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an, dapat ditelusuri bahwa terdapat konsep tentang persatuan fundamental berdasarkan iman dan perbuatan, dan pada saat yang sama diakui juga adanya keberagaman. Meskipun demikian, pandangan yang mengungkapkan sentimen universal semacam ini masih merupakan kecenderungan yang subordinat dalam agama. Hal ini merupakan tantangan besar bagi siapa pun untuk memperkuat kecenderungan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan selanjutnya menyebarkan elemen-elemen seperti itu dalam tradisi agama apa pun yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian konflik sosial dan politik, dan dengan demikian untuk membangun perdamaian. Hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus latihan bagi para pemeluk agama yang secara aktif terlibat di dalamnya. Sebagai bagian dari proses itu, beberapa deklarasi hak asasi manusia atau pernyataan serupa telah disusun selama bertahun-tahun yang secara eksplisit mendasarkan pada keyakinan agama tertentu, seperti Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi Bangkok, yang berisi pernyataan dari sekitar empat puluh negara dari kawasan Asia dan Pasifik, dan juga Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Agama-Agama Dunia. Apa pun yang mungkin terlintas pada benak banyak orang tentang perincian spesifik dari teks-teks semacam itu, kepentingan utamanya terletak pada kenyataan bahwa semua itu adalah hasil dari upaya sadar untuk mengakarkan nilai-nilai universal tertentu

---

<sup>29</sup> Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999).



dalam tradisi budaya dan agama. Maka seyogyanya gerakan-gerakan tersebut didukung dan ditopang dengan baik.

Dengan melihat secara seksama pada agama-agama kitab, yaitu agama yang mendasarkan diri pada otoritas tertulis seperti Taurat, Alkitab, atau Al-Qur'an dan kitab suci lainnya, terlihat bahwa pandangan dunia yang menjadi dasar dan melambiri tindakan kekerasan oleh kalangan tertentu pada saat ini tidak ada pada saat kitab-kitab tersebut diwahyukan atau ditulis. Dalam teks-teks suci tersebut, penggunaan kekerasan secara umum dapat diterima dan dimungkinkan tetapi dalam keadaan tertentu. Karena itulah, potensi positif agama mestilah dimanfaatkan, termasuk oleh para pemangku jabatan negara dan otoritas kebijakan. Dengan demikian perlu terus digali sumber dayanya, terutama elemen-elemen yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi penyelesaian konflik sosial dan politik.

Penekanan pada peran keteladanan dari para pemimpin agama sangatlah diperlukan. Hal ini tidak terbatas pada kerja sama dengan kolega dan sejawat dari pemeluk agama yang sama, tetapi juga harus terlihat bekerja sama dengan anggota komunitas agama yang berbeda. Eksplorasi nilai-nilai bersama, seperti keadilan dan kasih sayang, serta upaya untuk mempraktikkannya dalam kehidupan publik, akan meningkatkan kredibilitas agama dan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Pada sisi lain terlihat bahwa dimensi spiritual dari penegakan perdamaian sebagian besar diabaikan oleh kaum sekuler, yang menganggap hal tersebut hanya sebagai proses teknis belaka. Membawa dimensi spiritual ke dalam proses perdamaian sesungguhnya dapat menciptakan akses ke hal-hal mendasar dan fundamental yang lebih dalam dan efektif dari perilaku para pihak, dengan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi secara kritis sikap dan tindakan mereka sendiri.<sup>30</sup> Meskipun negosiasi dan mediasi biasanya merupakan proses yang bersifat rasional, tetapi perilaku

---

<sup>30</sup> Thanh\_Dam Truong, "Reflections on Human Security: A Buddhist Contribution," in *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttill (Leiden: Brill, 2005), 290.

konflik masyarakat seringkali didasarkan pada pertimbangan yang lebih emosional, dan dengan demikian tidak dapat diubah hanya dengan proses negosiasi yang sifatnya rasional dan kesepakatan-kesepakatan, atau perjanjian-perjanjian. Keputusan atau komitmen kognitif memang tidak selalu mudah diterjemahkan ke dalam perasaan dan tindakan, tetapi hal tersebut bukanlah menjadi halangan untuk dapat dilakukan dan diwujudkan.

Penegakan perdamaian bukan hanya tugas para pelaku agama. Hal tersebut membutuhkan upaya gabungan dari penganut agama dan sekularis, yang masing-masing dapat berkontribusi dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Meskipun beberapa pihak di Barat masih merasa bahwa membina hubungan antara keduanya dapat membahayakan pemisahan historis antara gereja dan negara, atau pemisahan kekuatan spiritual dan politik, keadaan dunia saat ini menunjukkan bahwa mungkin ada alasan untuk memikirkan kembali sifat yang tepat dari hubungan antara keduanya, tanpa mempengaruhi prinsip demokrasi. Mesti dipahami bahwa perkembangan peradaban terkini nampaknya menuntut untuk mempertimbangkan peran agama sebagai salah satu kecenderungan terpenting dalam masyarakat, dengan tingkat relevansi yang tinggi pada persoalan pembangunan dan hak asasi manusia.

Para aktor-aktor atau agen sekuler seyogyanya menganggap serius kecenderungan baru dalam masyarakat yang demikian. Kurang empatinya para aktor atau agen tersebut terhadap agama, nampaknya dikarenakan cara berpikir mereka dikondisikan oleh paradigma intelektual Barat. Mereka bisa disebut sebagai *unsuspecting victims of Western intellectual imperialism* (korban imperialisme intelektual Barat yang tak menaruh curiga). Membebaskan pikiran dari belenggu itu merupakan salah satu prasyarat untuk dialog antaragama, yang tidak hanya berkaitan dengan masalah metafisik, tetapi juga dengan tantangan kontemporer. Analisis yang tepat tentang agama sebagai kecenderungan sosial merupakan prasyarat dalam hal ini. Sebagaimana merenungkan sisi destruktif dari agama tidak membutuhkan seorang

analisis untuk menjadi seorang pemeluk agama, maka dengan cara yang sama, tidak perlu pula untuk percaya pada doktrin agama apa pun untuk menghargai bahwa agama dapat dikembangkan sebagai sumber yang positif. Di mata orang-orang beriman, kelompok agama adalah komunitas iman, tetapi di mata ilmuwan sosial mereka secara struktural tidak berbeda dari gerakan atau organisasi sosial lainnya. Organisasi sosial adalah kendaraan bagi ideologi, baik itu agama maupun sekuler, dalam menemukan dan menunjukkan ekspresi mereka. Faktanya, tidak ada lembaga dan institusi lain yang mampu membentuk cara pandang individu dan kelompok yang efektif seefektif agama. Pengakuan akan hal tersebut nampaknya tidak diperlukan karena telah menjadi kesadaran umum saat ini.

Sebagai upaya dalam memainkan perannya dalam peradaban manusia secara luas, sumber daya keagamaan mesti dilihat dan diperhaikan. Sumber daya tersebut terkandung dalam empat unsur utama, yaitu: gagasan religius (isi keyakinan), praktik keagamaan (perilaku ritual), organisasi sosial (komunitas religius), dan pengalaman religius atau spiritual (sikap psikis). Berbagai dimensi agama ini semuanya dapat digunakan untuk melayani manusia yang berjuang untuk perdamaian.<sup>31</sup>

Gagasan-gagasan religius yang mengandung benih resolusi damai untuk konflik dapat digali dan diperkuat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ide-ide keagamaan dan dengan memberi mereka lapisan makna baru. Penafsiran ulang ide-ide agama menurut konteks sejarah dan sosialnya merupakan tanggung jawab utama para pemimpin agama dan spesialis lainnya. Organisasi Rabbi untuk Hak Asasi Manusia, contohnya, adalah upaya orang Yahudi untuk membatasi kecenderungan kekerasan di wilayah konflik Israel Palestina, dan untuk memobilisasi agama dalam rangka tujuan yang

---

<sup>31</sup> William E. Paden, *Religious Worlds: The Comparative Study of Religion* (Boston: Beacon Press, 1994); Peter Antes, Armin W. Geertz, and Randi R. Warne, eds., *New Approaches to the Study of Religion: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches*, vol. 2 (Berlin: Water de Gruyter, 2004).

positif. Salah satu fokus dari organisasi ini adalah pada penafsiran ulang tentang tradisi kenabian dan rabi, dengan menawarkan pendekatan teologis untuk masalah tanah dalam pemikiran dan kesadaran orang-orang Yahudi yang memutus hubungan eksklusif antara tanah dan gagasan kaum pilihan. Interpretasi semacam itu menyiratkan kesediaan untuk berkompromi, dan dengan demikian berbagi tanah dengan orang lain, dalam hal ini orang-orang Palestina.

Oleh karena itu, penafsiran ulang ide-ide agama menurut konteks historis dan sosialnya mencakup perkembangan teologi-teologi baru yang membahas isu-isu kontemporer. Dalam lokakarya internasional tentang agama dan hak asasi manusia di Ghana pada tahun 2002, disarankan bahwa teologi tentang 'yang lain' sangat dibutuhkan, serta teologi 'transformasi'. Hal ini adalah saran konkret yang berhubungan dengan ide-ide kunci dalam banyak tradisi agama. Gagasan tentang keluarga Ibrahim pada agama-agama kitab dapat pula membuka kemungkinan baru untuk dimasukkan yang dapat mengarah pada visi perdamaian.<sup>32</sup> Orang-orang tertentu dapat dijangkau hanya dengan menawarkan konstruksi mitis alternatif yang bersifat spiritual yang sama menariknya tetapi jelas lebih manusiawi dalam implikasi etisnya. Pemaknaan ulang makna mitis religius memiliki tugas menciptakan visi otentik yang layak untuk perdamaian dan keadilan sosial yang sesuai dengan keyakinan yang terlibat dan pada saat yang sama mendukung penegakan dasar peradaban masyarakat modern, hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu konsep yang bisa berpotensi menjadi bahan penyusun tersebut adalah konsep *shalom* atau *salaam* yang merupakan bagian dari tradisi keluarga agama-agama Ibrahim. Konsep *shalom* bukanlah cita-cita romantisme melainkan visi konkret yang terkait dengan perjuangan keadilan, pengampunan dan rekonsiliasi.

Perilaku atau ritual keagamaan juga mengandung potensi yang menjanjikan bagi upaya penegakan dan pemeliharaan perdamaian. Potensi-potensi ritual yang dikenal oleh para pemeluk agama dan

---

<sup>32</sup> F.E. Peters, *The Children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam* (Princeton: Princeton University Press, 2004).

tradisi perlu ditelusuri guna meningkatkan martabat dan status manusia. Sarana ritual tersebut dapat mengintegrasikan kembali para pelaku kekerasan ke dalam komunitas religius yang damai, serta dapat mendorong mereka ke arah perubahan hidup dengan pertolongan Tuhan. Para pelaku kekerasan, misalnya, dapat memberikan kesaksian publik tentang tindakan mengerikan yang pernah mereka lakukan selama konflik berlangsung. Kesaksian semacam itu yang merupakan pengakuan publik, memberikan kelegaan psikologis yang sangat besar kepada para pelaku kekerasan yang kebanyakan terdiri dari anak-anak muda. Pada saat yang sama mereka didorong oleh komunitas religius untuk memulai hidup baru secara lebih baik. Institusi agama dapat membuka cakrawala baru bagi mereka dengan memberikan bimbingan spiritual, semisal doa atau puasa, dalam rangka meningkatkan tekad bagi perubahan hidup. Penerimaan mereka oleh komunitas religius merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup karena perbuatan anti-sosialnya di masa lalu tidak dapat dengan mudah dilupakan dan dimaafkan.

Inisiatif serupa terjadi juga pada agama tradisional dalam proses rekonstruksi pasca-perang di Mozambik. Di luar Afrika, ritus perdamaian telah dicatat sebagai instrumen efektif penyelesaian konflik di Lebanon, yaitu ritual adat Sulha yang merupakan bagian integral dari tradisi komunal di seluruh Timur Tengah, Muslim, Kristen, Yahudi atau Druze. Penelitian antropologis Daniel Míguez di Southern Cone Amerika Latin menarik perhatian pada model lain untuk menghindari konflik kekerasan, yaitu konfrontasi simbolis.<sup>33</sup> Mengacu kepada hal-hal di atas, maka komunitas agama sebagai bentuk organisasi sosial dapat digunakan untuk mengubah konflik menjadi perdamaian. Pendekatan spiritual terhadap penyelesaian konflik merupakan pelengkap yang berharga bagi pendekatan yang bersifat sekuler, yang sering kali dimulai dari luar. Hal semacam ini menjadi penting terutama dalam keadaan genting yang biasanya memutuskan hubungan dan merusak

---

<sup>33</sup> Miguez, "From Open Violence to Symbolic Confrontation: Anthropological Observations of Latin America's Southern Cone."

kohesi sosial sampai pada tingkat yang mendalam, atau yang nampaknya tidak dapat diperbaiki lagi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan telah menjadi contoh bagi banyak negara lain. Meskipun komisi ini bukan sebuah inisiatif religius, tetapi didukung oleh berbagai komunitas agama yang ada di negara tersebut. Maka akan tampak ciri-ciri pendekatan religius dalam teknik penanganan dan prosedurnya.

Pengalaman religius juga sangat penting sebagai pondasi dan dalam penyebaran pesan-pesan agama, dan juga sebagai inspirasi yang kuat. Pengalaman tersebut bisa mengambil beragam bentuk, semisal mimpi, ilham, atau pengalaman keajaiban dalam hidup seseorang. Contoh-contoh semacam ini sangat berlimpah dalam sejarah agama-agama dan berlaku untuk berbagai tradisi keagamaannya. Dengan demikian, semua elemen konstitutif agama, mulai dari ide atau gagasan, perilaku, organisasi dan pengalaman religius, dapat dieksplorasi dan digunakan, tidak hanya oleh kaum beriman saja tetapi juga oleh pihak lain yang mungkin dilandasi oleh nilai-nilai sekuler. Bagian dari dunia yang toleran adalah penerimaan bahwa jalan yang berbeda dapat mengarah pada tujuan yang sama, dalam hal ini masyarakat yang manusiawi dan damai. Hal ini juga berlaku untuk debat syariah yang saat ini nampaknya menjadi perhatian berbagai kalangan di belahan bumi mana pun. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu bertentangan dengan standar universal hak asasi manusia, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Syariah secara keseluruhan harus ditolak atau tidak dapat disesuaikan dengan persyaratan zaman modern.<sup>34</sup>

Terdapat banyak individu dan kelompok yang menggunakan sumber daya religius mereka untuk memajukan tujuan perdamaian. Contoh terkenal adalah organisasi antar-agama seperti *World Conference*

---

<sup>34</sup> Abdllahi Ahmed An-Na'im, "Islamic Fundamentalism and Social Change: Neither the 'End of History' nor a 'Clash of Civilization,'" in *The Freedom to Do God's Will: Religious Fundamentalism and Social Change*, ed. Gerrie ter Haar and James J. Busuttil (London: Routledge, 2003), 45.

*on Religion and Peace* (Konferensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian), *Parliament of the World's Religions* (Parlemen Agama-Agama Dunia), dan juga organisasi perdamaian dalam satu tradisi agama seperti *Pax Christi* dan *Justice and Peace*, atau gerakan perdamaian yang bersifat politis tetapi telah diilhami oleh spirit agama seperti *All Party Hürriyet (Freedom) Conference* Konferensi Semua Partai Hürriyet (Kebebasan) di Kashmir, yang didirikan oleh seorang pemimpin muda Muslim yaitu Mirwaiz Umar Farooq. *Hague Appeal for Peace* (Seruan Perdamaian Den Haag) 1999, juga dapat dijadikan cermin keterlibatan banyak individu yang berpartisipasi berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Hal ini hanyalah beberapa contoh kecil yang memperlihatkan sumber daya agama dapat digunakan untuk memajukan perdamaian.

Dengan demikian, membangun budaya damai melalui dialog antaragama telah menjadi elemen penting dalam berbagai prakarsa perdamaian. Upaya-upaya tersebut mencakup penciptaan forum dialog antar pemimpin agama, atau pemimpin kelompok lokal. Dialog-dialog semacam itu merupakan bentuk keterlibatan sosial berbasis komunitas akar rumput yang dapat membantu menghentikan kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang berbeda. Dialog antaragama adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh kaum beriman yang peduli di sebagian besar tradisi agama saat ini. Hal ini pada umumnya menyatukan para pemeluk agama yang siap sedia untuk terlibat dalam dialog dan membuka pikiran dengan mendengarkan orang lain. Dialog di dalam internal agama masing-masing juga tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin jenis dialog ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melangkah melakukan dialog keluar. Perhatian perlu diberikan kepada dialog intra-agama. Dalam dialog tersebut, perwakilan dari ujung ekstrim dalam tradisi agama tertentu dapat membahas berbagai perbedaan yang ada pada internal mereka. Tidak mudah memang melakukannya, tetapi langkah ini penting dilakukan guna membangun kesadaran bersama di dalam internal agama sebelum

merangkul pemeluk agama lain dalam rangka upaya penegakan dan pemeliharaan perdamaian serta resolusi konflik.

Akar fundamentalisme agama, seperti yang ditunjukkan oleh Marty dan Appleby dalam karya-karya mereka,<sup>35</sup> juga terletak pada kurang amannya manusia, termasuk faktor-faktor psikologis seperti tidak adanya rasa memiliki yang sesuai. Tidak adanya rasa aman bagi manusia, dalam arti yang luas, merupakan sumber konflik dan kekerasan. Namun hal ini dibantah oleh Thanh-Dam Truong, yang menawarkan perspektif Buddhis tentang pertanyaan terkait konflik kekerasan dan perdamaian.<sup>36</sup> Dia mengacu pada ajaran spiritual khusus yang berhubungan dengan upaya individu untuk mengendalikan pikiran mereka sendiri. Elemen pentingnya adalah saling ketergantungan yang diekspresikan dalam berbagai bentuk empati. Dia membedakan tiga kondisi pikiran yang dirujuk dengan istilah bermanfaat, netral, dan tidak bermanfaat.

Pikiran yang tidak bermanfaat, menurut pemikiran Buddhis yang dijelaskan oleh Truong, yaitu pikiran yang tidak mampu memahami prinsip *interbeing*, yaitu prinsip yang berkaitan dengan antar makhluk. Oleh karena itu, perbuatan yang berasal dari pikiran yang tidak bermanfaat dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal ini berbeda dengan tindakan yang berasal dari pikiran yang bermanfaat yang menghasilkan sesuatu tanpa kekerasan. Pikiran yang demikian dapat meringankan penderitaan. Dengan kata lain, sebagaimana pendapat yang dilontarkan oleh Truong, ontologi Buddha memberikan visi tentang sifat manusia yang tidak diarahkan pada kekuasaan dan kendali, tetapi untuk memahami sifat keterkaitan, kunci empati dan kasih sayang. Kedua kualitas ini termasuk diantara nilai-nilai kritis yang

---

<sup>35</sup> Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., *Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education*, vol. 2 (Chicago: The University of Chicago Press, 1993); Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., *Fundamentalisms Comprehended*, vol. 5 (Chicago: The University of Chicago Press, 1995).

<sup>36</sup> Truong, "Reflections on Human Security: A Buddhist Contribution."



diidentifikasi sebagai nilai penting dan fundamental bagi teori dan praktik resolusi konflik.

Menurut Truong, konsep kesejahteraan manusia dan pengalaman aktualnya dibentuk oleh sejumlah faktor, tidak hanya politik dan sosial, tetapi juga budaya dan agama. Dalam perdebatan tentang kesejahteraan manusia di dunia, agama seringkali tidak dianggap mampu memberikan kontribusi yang positif. Namun, Truong berpendapat bahwa penting untuk menambahkan dimensi spiritual dalam perdebatan tentang kesejahteraan manusia. Menurutnya, pemikiran Buddhis dapat berkontribusi pada diskusi tentang perdamaian global dan kesejahteraan manusia di abad ke-21. Singkatnya, dia berpendapat bahwa kesejahteraan manusia adalah konsep sekuler yang membutuhkan dimensi spiritual. Sumber daya spiritual diperlukan untuk membangun perdamaian atau untuk kebaikan bersama lainnya. Pendekatan yang mengarah pada pendefinisian kesejahteraan manusia dalam istilah yang mengakui peran spiritualitas dapat menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap tentang penyebab penderitaan manusia. Tiga aspek kunci yang relevan dengan pembingkai agenda kesejahteraan kasih sayang atau welas asih seperti itu adalah pendekatan yang berpusat pada bio karakteristik dari teori Buddhis tentang sifat manusia, penekanan Buddhis pada kesadaran *interbeing* sebagai karakteristik umat manusia, dan gagasan tentang *prajna* (Menembus wawasan) sebagai sumber belas kasih.

Yang pertama dari keduanya (pendekatan *biocentred*) dapat berfungsi untuk mempromosikan persatuan dalam spiritualitas manusia, yang kedua (kesadaran akan *interbeing*) akan membantu mendukung ketidakterpisahan hak, sedangkan yang ketiga (gagasan *prajna*) dapat berkontribusi pada pengayaan teori orang dalam etika pembangunan. Welas asih, menurut Truong, adalah salah satu bentuk *prajna*. Hal tersebut dapat, atau harus dianggap sebagai ‘wawasan yang menembus’, digunakan untuk aturan yang adil dalam tatanan dunia global. Wawasan seperti itu akan merangsang jenis kebijakan yang akan membantu mempromosikan gagasan perbedaan sebagai *different*

*manifestation of the same processes* (manifestasi yang berbeda dari proses yang sama). Berkaitan dengan hal tersebut, peran hati nurani dalam konflik dan perdamaian menjadi penting. Maka diperlukan kesadaran untuk mempertimbangkan secara seksama dan kritis konten-konten atau pesan-pesan religius yang ditransmisikan dalam rangka pembentukan hati nurani.

Hal di atas menunjukkan bahwa dimensi agama tidak boleh dilepaskan dari masalah sosial dan politik yang sering melatarbelakangi kekerasan yang terkait agama. Solusi keagamaan mesti memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, selayaknya kebutuhan identitas dan martabat, dengan ditangani oleh formulasi kontemporer dari tradisi agama. Orang-orang sekuler mesti menyadari berbagai fungsi agama, yang memberikan motif yang sangat kuat bagi orang-orang beriman untuk bertindak dengan cara yang mereka lakukan. Agama memberikan orientasi dalam hidup dan titik acuan moral dan budi pekerti. Hal ini juga merupakan jangkar budaya yang memberikan identitas sosial dan menempatkan mereka dalam konteks sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan, baik secara material maupun psikologis. Masalah inti dalam hubungan antara orang beriman dan non-beriman, atau agamawan dan sekularis, adalah kurangnya pemahaman di kalangan sekularis tentang arti agama bagi orang-orang beriman dan kekuatan spiritual yang mereka peroleh dari spiritualitas. Maka terdapat kebutuhan untuk memahami konstruksi psikologis individu unik yang hidup dalam sistem makna yang mendalam dan primordial, dan di saat yang sama mengekspresikan perhatian tak terbatas di luar batas mereka sendiri. Ketika pemahaman seperti itu muncul, perdaban manusia sedang dalam perjalanan untuk menemukan model keberadaan bermakna yang bisa diterapkan untuk keragaman budaya dan agama saat ini.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa agama itu sendiri bukanlah melulu persoalan baik atau buruk. Agama hadir di mana pun dalam semua sisi kehidupan para pemeluknya. Agama adalah sebuah fakta sosial, maka alih-alih diabaikan dan dipinggirkan, ia dapat diubah

menjadi manfaat bagi umat manusia dengan mempertimbangkan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang konstruktif. Merenungkan sisi destruktif dari agama tidak mengharuskan seorang analis menjadi seorang yang beragama. Dengan cara yang sama, juga tidak perlu untuk percaya pada doktrin agama apa pun untuk menghargai upaya menyoroti aspek-aspek agama yang dapat dikembangkan sebagai sumber daya yang positif. Bukti menunjukkan bahwa mayoritas manusia di dunia memeluk agama atau memiliki kepercayaan pada agama dalam berbagai bentuk. Dalam arti bahwa mayoritas manusia percaya pada dunia tak kasat mata yang dihuni oleh sesuatu yang tak terlihat yang diyakini memiliki kekuatan efektif atas hidup manusia. Maka dari itu, kekuatan semacam itu mengungkapkan dirinya dalam kehidupan orang-orang yang beriman, dengan cara yang positif atau negatif. Agama menjadi kekuatan negatif bila digunakan untuk penindasan dan eksploitasi orang lain. Tapi ia menjadi positif jika digunakan untuk tujuan pemeliharaan kehidupan, atau sebagai inspirasi untuk menyelesaikan konflik dan membawa perdamaian bagi semua pihak.

Agama adalah instrumen yang ampuh di tangan orang-orang yang menggunakannya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang beriman saja, tetapi pihak lain juga dapat menggunakannya, seperti politisi, yang dapat memanipulasi agama secara efektif. Banyak politisi di dunia telah menemukan potensi ini dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Mesti dipahami juga bahwa ranah politik dan agama memiliki keterkaitan dan hubungan dengan kekuasaan, baik yang didefinisikan secara religius, dalam artian kekuatan spiritual yang terletak di ranah transendental, maupun dalam terminologi sekuler, yang terletak di ranah material. Oleh karena itu, para politisi merasa penting untuk mencoba memperluas pengaruh dan kendali mereka ke dalam ranah agama, dengan konsekuensi yang seringkali membawa malapetaka. Agama dan politik merupakan kategori yang berbeda tetapi bukan kategori yang terpisah dalam diskusi tentang konflik dan perdamaian di dunia. Kedua hal tersebut saling terkait, dalam arti keduanya

memanfaatkan sumber kekuatan yang sah, baik spiritual maupun politik. Oleh karena itu, para pemimpin agama dan politik berpotensi untuk bersanding atau bisa pula menjadi saingan. Maka tidak mengherankan apabila para pemimpin politik dan agama sama-sama memberikan perhatian dengan masalah konflik dan penegakan perdamaian.

Apa yang sedang dialami dunia terkait dengan konflik dan perdamaian, juga dialami oleh Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menjadi alasan kegagalan upaya perdamaian adalah kurangnya informasi mengenai latar belakang geografis, budaya, tingkat pendidikan, dan berbagai informasi lainnya pada masyarakat setempat. Keberadaan direktori penelitian tentang agama, konflik dan perdamaian memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat pada saat terjadi konflik horizontal, khususnya konflik yang bernuansa agama. Menyadari hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), telah berupaya memetakan dan mengklasifikasikan potensi tersebut ke dalam empat regio, yaitu regio Sumatera, regio Jawa dan Bali, regio Kalimantan dan Sulawesi, regio Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua. Segala potensi konflik dan perdamaian tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu konflik antar maupun intern kelompok, rekonsiliasi dan perdamaian pasca konflik, dan pola kerukunan hidup antar dan intern kelompok.<sup>37</sup> Pemetaan yang hampir serupa juga dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).<sup>38</sup> Kalangan perguruan tinggi juga turut andil dalam berbagai upaya tersebut.<sup>39</sup>

Kehadiran negara dalam setiap konflik dan penegakan perdamaian sangat diperlukan. Salah satu komponen negara yang menjadi tulang

---

<sup>37</sup> Komnas HAM, *Direktori Penelitian Agama, Konflik Dan Perdamaian* (Jakarta, 2005).

<sup>38</sup> Cahyo Pamungkas and Yogi Setya Permana, eds., *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2020).

<sup>39</sup> Moch. Nur Ichwan and Ahmad Muttaqin, eds., *Agama Dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi* (Yogyakarta: CR-Peace, 2012).

panggung segala upaya tersebut adalah kepolisian. Salah satu inovasi di bidang pemolisian modern adalah berupaya memodifikasi asumsi filosofis pemolisian. Inovasi tersebut dikenal dengan istilah *community policing* yang diterjemahkan dengan ‘pemolisian masyarakat’ atau ‘perpolisian masyarakat’. Inovasi ini, walau belum tersebar merata dan mengakar, telah menjadi bagian dari filosofi polisi Republik Indonesia. Ada dua pendapat mengenai asal-usul gagasan pemolisian masyarakat. Pertama, pemolisian masyarakat secara radikal berbeda dari pendekatan polisi yang klasik dalam hal pandangan atau asumsi dasar mengenai manusia. Pemolisian masyarakat hendak memodifikasi cara pandang mengenai manusia. Asumsinya adalah bahwa ketertiban manusia dapat dicapai bukan melalui aturan, instrumen pemaksa, dan sanksi koersif, melainkan dicapai berdasarkan saling-percaya atau *trust* polisi masyarakat dan kemitraan polisi dengan masyarakat di bidang pemolisian. Di lain pihak, menurut pendapat kedua, pemolisian masyarakat sebenarnya masih bertolak dari asumsi lama. Asumsi ini menyatakan bahwa ketertiban masyarakat bisa dicapai kalau ada aturan yang memaksa manusia bekerjasama dan membatasi perilaku-perilaku asosialnya.<sup>40</sup>

Selain upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan, perlu juga mempertimbangkan memasukkan unsur ‘intimidasi ilahi’ dan ‘intervensi ilahi’ dalam strategi penegakan perdamaian. Yang pertama, yaitu intimidasi Ilahi adalah ketika para mediator mengatakan sesuatu seperti, “Inilah yang Tuhan ingin Anda lakukan—bukankah Anda ingin menyenangkan Dia?”. Sedangkan yang kedua, yaitu intervensi Ilahi adalah ketika para mediator memaksakan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang bertikai dengan klaim bahwa mereka melakukan intervensi atas nama Yang Maha Kuasa. Ketika berbagai pendekatan gagal memfasilitasi interaksi antarpihak, bentuk intimidasi

---

<sup>40</sup> Rizal Panggabean and Ihsan Ali-Fauzi, *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama Dan Perdamaian* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 13–14.

dan intervensi semacam itu dapat berjalan dengan baik, karena orang-orang cenderung mematuhi Yang Suci.<sup>41</sup>

### 3. Deklarasi Perdamaian Religius

Peran agama yang demikisan sentral sebagaimana digambarkan di atas terkait dengan konflik dan perdamaian, mendorong kalangan agamawan untuk menyumbangkan pemikiran religiusitas mereka. Salah satunya adalah dalam bentuk deklarasi. Inovasi-inovasi semacam ini memang bukanlah sesuatu yang baru, tetapi kehadirannya pada perjalanan sejarah manusia dewasa ini dirasa lebih dibutuhkan, guna menegaskan bahwa agama dan tradisi kepercayaan memiliki potensi yang apik dalam menanggulangi dan menyelesaikan konflik, sekaligus menegakkan dan memelihara perdamaian dunia. Mesti dipahami pula bahwa penegakan perdamaian dan resolusi konflik tidak bisa terlaksana hanya dengan deklarasi, tetapi ia bisa dijadikan acuan dan rujukan, khususnya bagi para pemeluk agama masing-masing, bahwa agama juga memiliki pandangan yang signifikan bagi peradaban manusia secara keseluruhan.

Salah satu contoh deklarasi itu adalah Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam). Sebagaimana teks-teks suci dalam tradisi agama lainnya, teks-teks kanonik Islam mampu memiliki interpretasi ideologis yang beragam dan utama. Berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang persaudaraan, kebebasan dan persamaan umat manusia, para ahli hukum Muslim dari semua mazhab fiqih telah mengakui hak asasi manusia untuk hidup, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, martabat, keturunan, dan akal. Mereka juga menegaskan bahwa pimpinan masyarakat atau pemerintah harus memperhatikan dirinya sendiri dengan melindungi hak-hak tersebut. Perlindungan hak asasi manusia dari monopoli masyarakat dan negara

---

<sup>41</sup> Azis Anwar Fachrudin and Linah Khairiyah Pary, eds., *Agama Menggerakkan Perdamaian: Catatan Dari Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antariman* (Yogyakarta: CRCS, 2017), 22.

telah dipastikan melalui prinsip-prinsip Islam *masuliyah*, yaitu pertanggungjawaban kepala negara di hadapan hukum dan rakyatnya, dan *syura*, yaitu kebijakan publik partisipatif dalam urusan negara. Ada konsensus bulat di antara para sarjana Muslim tentang kesetaraan manusia terlepas dari ras, etnis atau kelas. Meskipun demikian, mesti diakui bahwa kritikan terhadap UIDHR tak terelakkan, terutama terkait dengan interpretasi tradisional terhadap hukum Islam itu sendiri, yang sebagian kalangan melihatnya diskriminatif.<sup>42</sup> Bagaimanapun, segala upaya ulama kontemporer haruslah diapresiasi sebagai bagian dari sejarah peradaban manusia.

- a) *Universal Islamic Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islami)

### **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA ISLAMI 21 DHUL QAIDAH 1401 (19 SEPTEMBER 1981)**

Ini adalah deklarasi bagi umat manusia, panduan dan perintah bagi mereka yang bertakwa kepada Tuhan. (Al-Qur'an, *Ali Imran* 3: 138)

#### **Pendahuluan**

Islam memberikan umat manusia kode yang ideal tentang Hak Asasi Manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan kehormatan dan martabat umat manusia dan menghilangkan eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan.

Hak Asasi Manusia dalam Islam berakar kuat pada keyakinan bahwa Tuhan, dan hanya Tuhan, sebagai Pemberi Hukum dan Sumber dari semua hak asasi manusia. Dikarenakan asal ilahiah inilah, tidak ada penguasa, pemerintah, perkumpulan atau otoritas yang dapat

---

<sup>42</sup> Nayeefa Chowdhury, "The Quest for Universal Human Rights: A Brief Comparative Study of Universal Declarations of Human Rights by the UN and the Islamic Council of Europe," *The International Journal of Human Rights* 12, no. 3 (2008): 350.

membatasi atau melanggar dengan cara apa pun hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan, juga tidak dapat mereka serahkan.

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan tatanan Islam dan wajib bagi semua pemerintah Muslim dan organisasi masyarakat untuk menerapkannya dalam bentuk harfiah dan dalam bentuk semangat di dalam kerangka tatanan itu.

Sangat disayangkan bahwa Hak Asasi Manusia diinjak-injak dengan impunitas (bebas hukum) di banyak negara di dunia, termasuk beberapa negara Muslim. Pelanggaran semacam itu adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan membangkitkan hati nurani lebih banyak orang di seluruh dunia.

Saya sangat berharap Deklarasi Hak Asasi Manusia ini akan memberikan dorongan yang kuat kepada umat Islam untuk berdiri teguh dan membela dengan tegas dan berani hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan.

Deklarasi Hak Asasi Manusia ini adalah dokumen fundamental kedua yang diproklamasikan oleh Dewan Islam untuk menandai awal abad ke-15 Hijriyah, yang pertama adalah Deklarasi Islami Universal yang diumumkan pada Konferensi Internasional tentang Nabi Muhammad (SAW) dan ajarannya, diadakan di London mulai 12 hingga 15 April 1980.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islami didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah dan telah disusun oleh para sarjana Muslim terkemuka, ahli hukum dan perwakilan dari gerakan dan pemikiran Islam. Semoga Allah merahmati mereka semua atas upaya mereka dan membimbing kita di jalan yang benar .

*Paris, 21 Dhul Qaidah 1401, Salem Azzam  
19 September 1981 Sekretaris Jenderal*

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang



paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Al-Qur'an, *Al-Hujurat* 49:13)

## PEMBUKAAN

BAHWA aspirasi purba manusia bagi tatanan dunia yang adil dimana orang dapat hidup, berkembang dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut, penindasan, eksploitasi dan perampasan, sebagian besar tetap tidak terpenuhi;

BAHWA rahmat Ilahi kepada umat manusia yang tercermin dalam kemurahan-Nya dengan rezeki ekonomi yang melimpah sedang disia-siakan, atau ditahan secara tidak merata atau tidak adil dari penduduk bumi;

BAHWA Allah (Tuhan) telah memberikan umat manusia melalui wahyu-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW kerangka abadi tentang hukum dan moral untuk membangun dan mengatur institusi dan hubungan manusia;

BAHWA Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Hukum Ilahi bertujuan untuk memberikan martabat dan kehormatan bagi umat manusia dan dirancang untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan;

BAHWA berdasarkan sumber dan sanksi Ilahi hak-hak ini tidak dapat dibatasi, dibatalkan atau diabaikan oleh pihak berwenang, perkumpulan atau lembaga lain, juga tidak dapat diserahkan atau disingkirkan;

Oleh karena itu kami, sebagai Muslim, yang mengimani:

- a) pada Tuhan, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Pencipta, Pemelihara, Penguasa, Satu-satunya Pemandu umat manusia dan Sumber segala Hukum;
- b) pada kekhalifahan manusia yang telah diciptakan untuk memenuhi Kehendak Allah di bumi;
- c) pada kebijaksanaan hidayah Ilahi yang dibawa oleh para Nabi, yang misinya mencapai puncaknya pada pesan Ilahi terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia;
- d) bahwa rasionalitas pada dirinya sendiri tanpa cahaya wahyu dari Tuhan tidak dapat menjadi penuntun yang pasti dalam urusan-urusan umat manusia atau memberikan nutrisi spiritual kepada jiwa manusia, dan, mengetahui bahwa ajaran Islam mewakili intisari dari tuntunan Ilahi dalam bentuknya yang utuh dan sempurna, merasa terikat pada kewajiban untuk mengingatkan manusia tentang status dan martabat tinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan;
- e) pada ajakan kepada seluruh umat manusia kepada ajaran Islam;
- f) bahwa menurut ketentuan perjanjian azali kita dengan Tuhan, tugas dan kewajiban kita memiliki prioritas di atas hak-hak kita, dan bahwa masing-masing dari kita berada di bawah kewajiban terikat untuk menyebarkan ajaran Islam dengan kata-kata, perbuatan, dan tentunya dengan segala cara yang lembut, dan membuatnya efektif tidak hanya dalam kehidupan individu kita tetapi juga dalam masyarakat di sekitar kita;
- g) pada kewajiban kita untuk menegakkan tatanan Islami:
  - i. bahwa semua manusia akan sederajat dan tidak ada yang menikmati hak istimewa atau menderita kerugian atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal atau bahasa;
  - ii. bahwa semua manusia dilahirkan bebas;
  - iii. bahwa perbudakan dan kerja paksa dibenci;

- iv. bahwa kondisi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga institusi keluarga harus dipelihara, dilindungi dan dihormati sebagai dasar dari semua kehidupan sosial;
- v. bahwa para penguasa dan yang diperintah sama-sama tunduk pada, dan sama di depan, Hukum;
- vi. bahwa ketaatan akan diberikan hanya kepada perintah-perintah yang sesuai dengan Hukum;
- vii. bahwa semua kekuasaan duniawi akan dianggap sebagai amanah suci, untuk dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Hukum dan dengan cara yang disetujui olehnya, dan dengan memperhatikan prioritas yang ditetapkan olehnya;
- viii. bahwa semua sumber ekonomi harus diperlakukan sebagai berkah Ilahi yang dianugerahkan kepada umat manusia, untuk dinikmati semua orang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah;
- ix. bahwa semua urusan publik akan ditentukan dan dilakukan, dan kewenangan untuk mengelolanya akan dilaksanakan setelah musyawarah bersama (*Syura*) antara orang-orang beriman yang memenuhi syarat untuk berkontribusi pada keputusan yang akan selaras dengan Hukum dan kepentingan umum;
- x. bahwa setiap orang akan melaksanakan kewajiban yang sebanding dengan kapasitasnya dan akan dimintai pertanggungjawaban secara proporsional atas perbuatannya;
- xi. bahwa setiap orang akan, dalam kasus pelanggaran haknya, dijamin atas tindakan perbaikan yang sesuai dengan Hukum;
- xii. bahwa tidak seorang pun akan dirampas hak-hak yang dijamin kepadanya oleh Hukum kecuali oleh otoritasnya dan sejauh diizinkan olehnya;
- xiii. bahwa setiap orang berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana terhadap

masyarakat secara keseluruhan atau terhadap salah satu anggotanya;

- xiv. bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk:
- (a) menjamin pembebasan umat manusia dari setiap jenis eksploitasi, ketidakadilan dan penindasan,
  - (b) memastikan bagi setiap orang keamanan, martabat dan kebebasan dalam hal-hal yang ditetapkan dan dengan metode yang disetujui dan dalam batasan yang ditetapkan oleh Hukum;

Dengan ini, sebagai hamba Allah dan sebagai anggota persaudaraan Islam sedunia, di awal abad Kelima Belas hijriyah, menegaskan komitmen kami untuk menegakkan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dicabut berikut ini, yang kami anggap diperintahkan oleh Islam.

#### *I. Hak atas Kehidupan*

- a) Kehidupan manusia adalah sakral dan tidak dapat diganggu gugat dan setiap upaya harus dilakukan untuk melindunginya. Secara khusus, tidak seorang pun boleh terkena cedera atau kematian, kecuali di bawah otoritas Hukum.
- b) Seperti halnya dalam kehidupan, demikian juga setelah kematian, kesucian tubuh seseorang tidak dapat diganggu gugat. Merupakan kewajiban orang beriman untuk memastikan bahwa tubuh orang yang meninggal ditangani dengan kekhidmatan.

#### *II. Hak atas Kebebasan*

- a) Manusia lahir bebas. Tidak boleh ada pelanggaran terhadap haknya atas kebebasan kecuali di bawah otoritas dan dalam proses hukum yang sesuai.



- b) Setiap individu dan setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut atas kebebasan dalam segala bentuknya - fisik, budaya, ekonomi dan politik - dan berhak untuk berjuang dengan segala cara yang tersedia melawan pelanggaran atau pencabutan hak ini; dan setiap individu atau orang yang tertindas memiliki klaim yang sah untuk mendukung individu dan / atau orang lain dalam perjuangan semacam itu.

2

III. *Hak atas Kesetaraan dan Larangan Terhadap Diskriminasi yang Tidak Diizinkan*

- a) Semua orang sederajat di hadapan Hukum dan berhak atas kesempatan dan perlindungan yang sama atas Hukum.
- b) Semua orang berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- c) Tidak seorang pun boleh ditolak kesempatannya untuk bekerja atau didiskriminasi dengan cara apa pun atau terkena risiko fisik yang lebih besar karena alasan keyakinan agama, warna kulit, ras, asal, jenis kelamin atau bahasa.

IV. *Hak atas Keadilan*

- a) Setiap orang berhak untuk diperlakukan sesuai dengan Hukum, dan hanya sesuai dengan Hukum.
- b) Setiap orang tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk memprotes ketidakadilan; untuk meminta bantuan hukum yang diberikan oleh Hukum sehubungan dengan cedera atau kehilangan pribadi yang tidak beralasan; untuk membela diri terhadap tuduhan apa pun yang lebih disukai terhadapnya dan untuk mendapatkan putusan yang adil di hadapan pengadilan yudisial independen dalam setiap perselisihan dengan otoritas publik atau orang lain.
- c) Merupakan hak dan kewajiban setiap orang untuk membela hak orang lain dan masyarakat pada umumnya (*Hisbah*).

- d) Tidak seorang pun boleh didiskriminasi saat berusaha membela hak-hak pribadi dan publik.
- e) Merupakan hak dan kewajiban setiap Muslim untuk menolak mematuhi perintah apa pun yang bertentangan dengan Hukum, tidak peduli oleh siapa perintah itu dikeluarkan.

V. *Hak atas Pengadilan yang Adil*

- a) Tidak seorang pun dapat diputuskan bersalah atas suatu jabatan dan dapat dikenakan hukuman kecuali setelah terbukti bersalah di hadapan pengadilan yudisial yang independen.
- b) Tidak seorang pun dapat diputuskan bersalah kecuali setelah pengadilan yang adil dan setelah kesempatan yang wajar untuk pembelaan telah diberikan kepadanya.
- c) Hukuman harus diberikan sesuai dengan Hukum, sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan dengan mempertimbangkan keadaan di mana hal itu dilakukan.
- d) Tidak ada tindakan yang dianggap sebagai kejahatan kecuali ditentukan seperti itu dalam kata-kata yang jelas dalam Undang-Undang.
- e) Setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya. Tanggung jawab atas suatu kejahatan tidak dapat secara langsung diberikan kepada anggota lain dari keluarga atau kelompoknya, yang tidak secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindakan kejahatan tersebut.

VI. *Hak atas Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan*

Setiap orang berhak atas perlindungan dari pelecehan oleh lembaga resmi. Dia tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri kecuali untuk membuat pembelaan atas dakwaan yang dibuat terhadapnya atau jika dia ditemukan dalam situasi

dimana pertanyaan tentang kecurigaan keterlibatannya dalam kejahatan dapat diajukan secara wajar.

VII. *Hak atas Perlindungan dari Penyiksaan* <sup>2</sup>

Tidak ada orang yang boleh disiksa dalam pikiran atau tubuh, atau direndahkan, atau diancam dengan cedera, baik pada dirinya sendiri atau pada siapa pun yang terkait atau dipegang olehnya, atau dipaksa untuk mengaku melakukan kejahatan, atau dipaksa untuk menyetujui tindakan yang merugikan kepentingannya.

VIII. *Hak atas Perlindungan Kebormatan dan Reputasi*

Setiap orang berhak untuk melindungi kehormatan dan reputasinya dari fitnah, tuduhan yang tidak berdasar atau upaya yang disengaja untuk memfitnah dan pemerasan.

<sup>2</sup>  
IX. *Hak atas Suaka*

- a) Setiap orang yang teraniaya atau tertindas memiliki hak untuk mencari perlindungan dan suaka. Hak ini dijamin untuk setiap manusia tanpa memandang ras, agama, warna kulit dan jenis kelamin.
- b) *Al-Masjid Al-Haram* (rumah suci Allah) di Mekah adalah tempat perlindungan bagi semua Muslim.

X. *Hak Minoritas*

- a) Prinsip Al-Qur'an "Tidak ada paksaan dalam agama" mengatur hak-hak agama minoritas non-Muslim.
- b) Di negara Muslim, agama minoritas memiliki pilihan untuk diatur sehubungan dengan masalah sipil dan pribadi mereka oleh Hukum Islam, atau oleh hukum mereka sendiri.

XI. *Hak dan Kewajiban Berpartisipasi dalam Perilaku dan Pengelolaan Urusan Publik*

- a) Dengan tunduk pada hukum, setiap individu dalam komunitas (*ummah*) berhak menduduki jabatan publik.
- b) Proses musyawarah yang leluasa (*Syura*) merupakan dasar dari hubungan administratif antara pemerintah dan rakyat. Orang juga memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan penguasanya sesuai dengan prinsip ini.

## XII. Hak atas Kebebasan Berkeyakinan, Berpikir dan Berbicara

- a) Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya selama dia tetap dalam batas yang ditentukan oleh Hukum. Namun, tidak ada seorang pun yang berhak menyebarkan kebohongan atau menyebarkan kabar yang mungkin menghina kesusilaan publik, atau terlibat dalam fitnah, sindiran, atau melontarkan fitnah yang mencerminkan nama baik kepada orang lain.
- b) Mengejar ilmu dan mencari kebenaran bukan hanya hak tapi kewajiban setiap Muslim.
- c) Merupakan hak dan kewajiban setiap Muslim untuk memprotes dan berjuang (dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Hukum) melawan penindasan bahkan jika hal tersebut berarti menantang otoritas tertinggi di suatu negara.
- d) Tidak boleh ada larangan dalam penyebaran informasi asalkan tidak membahayakan keamanan masyarakat atau negara dan dibatasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- e) Tidak seorang pun boleh menghina atau mengejek keyakinan agama orang lain atau menghasut permusuhan publik terhadap mereka; menghormati perasaan religius orang lain adalah wajib bagi semua Muslim.

## XIII. Hak atas Kebebasan Beragama



Setiap orang berhak atas kebebasan hati nurani dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya.

#### XIV. Hak atas Asosiasi Bebas

- a) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara individu dan kolektif dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya dan politik komunitasnya dan mendirikan institusi dan lembaga yang dimaksudkan untuk memerintahkan apa yang benar (*ma'ruf*) dan untuk mencegah apa yang salah (*munkar*).
- b) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan pendirian lembaga-lembaga dimana pemenuhan hak-hak ini dimungkinkan. Secara kolektif, komunitas berkewajiban untuk menetapkan kondisi yang memungkinkan anggotanya mengembangkan kepribadian mereka secara penuh.

#### XV. Tatanan Ekonomi dan Hak-Hak yang Berkembang Darinya

- a) Dalam upaya pencarian ekonomi, semua orang berhak atas manfaat penuh dari alam dan semua sumber dayanya. Inilah berkah yang dianugerahkan Tuhan untuk kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan.
- b) Semua manusia berhak mencari nafkah sesuai dengan Hukum.
- c) Setiap orang berhak memiliki properti / kepemilikan secara individu atau dalam hubungan dengan orang lain. Kepemilikan negara atas sumber daya ekonomi tertentu untuk kepentingan umum adalah sah.
- d) Orang miskin memiliki hak atas bagian yang ditentukan dari kekayaan orang kaya, sebagaimana ditetapkan oleh zakat, dipungut dan dikumpulkan sesuai dengan hukum.
- e) Segala sarana produksi harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (*ummah*) secara keseluruhan, dan tidak boleh diabaikan atau disalahgunakan.

- f) Untuk mendorong perkembangan ekonomi yang seimbang dan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, Hukum Islam melarang monopoli, praktik perdagangan terbatas yang tidak masuk akal, riba, penggunaan paksaan dalam pembuatan kontrak dan publikasi iklan yang menyesatkan.
- g) Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan asalkan tidak merugikan kepentingan masyarakat (*ummah*) dan tidak melanggar hukum dan nilai-nilai Islam.

#### XVI. Hak atas Perlindungan Properti

Tidak ada properti / kepemilikan yang dapat diambil alih kecuali untuk kepentingan umum dan pembayaran kompensasi yang adil dan memadai.

#### XVII. Status dan Martabat Pekerja

Islam menghormati pekerjaan dan pekerja, dan memerintahkan umat Islam tidak hanya untuk memperlakukan pekerja dengan adil tetapi juga dengan murah hati. Gajinya tidak hanya dibayar segera, tetapi juga berhak atas istirahat dan waktu luang yang memadai.

#### XVIII. Hak atas Jaminan Sosial

Setiap orang berhak atas makanan, papan, sandang, pendidikan dan perawatan medis sesuai dengan sumber daya masyarakat. Kewajiban komunitas ini berlaku khususnya bagi semua individu yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri karena cacat sementara atau permanen.

#### XIX. Hak untuk Berkeluarga dan Hal-Hal Terkait

- a) Setiap orang berhak menikah, berkeluarga, dan membesarkan anak sesuai dengan agama, tradisi, dan budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak dan

keistimewaan tersebut dan memikul kewajiban seperti yang diatur oleh Undang-Undang.

- b) Setiap pasangan dalam pernikahan berhak untuk dihormati dan diperhatikan oleh pasangannya.
- c) Setiap suami wajib menghidupi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
- d) Setiap anak berhak untuk dipelihara dan dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya, dilarang anak dipaksa bekerja sejak dini atau dibebani beban apapun yang akan menghambat atau membahayakan perkembangan alaminya.
- e) Jika karena suatu alasan orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap seorang anak, maka menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan biaya publik.
- f) Setiap orang berhak atas dukungan materi, serta perawatan dan perlindungan, dari keluarganya selama masa kanak-kanak, usia tua atau ketidakmampuannya. Orang tua berhak atas dukungan materi serta pengasuhan dan perlindungan dari anak-anak mereka.
- g) Ibu berhak atas penghormatan, perhatian, dan bantuan khusus dari pihak keluarga dan organisasi publik komunitas (*Ummah*).
- h) Di dalam keluarga, laki-laki dan perempuan harus berbagi kewajiban dan tanggung jawab mereka menurut jenis kelamin, anugerah alami, bakat dan kecenderungan mereka, dengan mengingat tanggung jawab bersama mereka terhadap keturunan dan kerabat mereka.
- i) Tidak ada orang yang boleh menikah di luar keinginannya, atau kehilangan atau kekurangan karakteristik hukumnya yang disebabkan oleh pernikahan.

## XX. Hak bagi Wanita Menikah

Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk:

- a) Tinggal di rumah tempat tinggal suaminya;
- b) Menerima sarana yang diperlukan untuk mempertahankan standar hidup yang tidak lebih rendah dibandingkan milik pasangannya, dan, jika terjadi perceraian, menerima selama masa tunggu menurut undang-undang (*iddah*) sarana pemeliharaan yang sepadan dengan sumber daya suaminya, bagi dirinya sendiri dan juga bagi anak-anak yang dia rawat atau pelihara, terlepas dari status keuangan, pendapatan, atau harta yang mungkin dia miliki sebagai haknya sendiri;
- c) Mengupayakan dan memperoleh perceraian pernikahan (*Kbul'a*) sesuai dengan ketentuan Hukum. Hak ini merupakan tambahan dari haknya untuk mengajukan cerai melalui pengadilan.
- d) Mewarisi dari suaminya, orang tuanya, anak-anaknya dan kerabat lainnya menurut Undang-Undang;
- e) Kerahasiaan yang ketat dari pasangannya, atau mantan pasangan jika bercerai, sehubungan dengan informasi apa pun yang mungkin diperolehnya tentang istrinya, yang pengungkapannya dapat merugikan kepentingannya. Tanggung jawab serupa ada padanya sehubungan dengan pasangan atau mantan pasangannya.

#### XXI. Hak atas Pendidikan

- a) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan alaminya.
- b) Setiap orang berhak atas pilihan profesi dan karier secara bebas dan atas kesempatan untuk mengembangkan sepenuhnya bakat alaminya.

2

#### XXII. Hak Privasi

Setiap orang berhak atas perlindungan privasinya.



### XXIII. Hak atas Kebebasan Bergerak dan Bertempat Tinggal

- a) Mengingat Dunia Islam yang sesungguhnya adalah *Ummah Islamiyyah*, maka setiap Muslim berhak untuk bebas keluar masuk negara Muslim manapun.
- b) Tidak seorang pun boleh dipaksa meninggalkan negara tempat tinggalnya, atau dideportasi secara sewenang-wenang darinya tanpa melalui proses hukum yang semestinya.

#### Catatan Penjelasan

1. Dalam rumusan Hak Asasi Manusia di atas, kecuali konteksnya menentukan lain:
  - a) Istilah 'orang' mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
  - b) istilah 'Hukum' berarti *Syariah*, yaitu totalitas tata cara yang berasal dari *Al-Qur'an* dan *Sunnah* dan hukum lain yang disimpulkan dari kedua sumber ini dengan metode yang dianggap valid dalam yurisprudensi Islam.
2. Masing-masing Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam deklarasi ini memiliki tugas yang sama.
3. Dalam menjalankan dan menikmati hak-hak yang disebutkan di atas, setiap orang harus tunduk hanya pada batasan-batasan yang diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyarakat moralitas, ketertiban publik dan kesejahteraan umum umat (*ummah*).

- b) *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam)

**DEKLARASI KAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
DALAM ISLAM  
5 AGUSTUS 1990**

Konferensi Menteri Luar Negeri Islam Kesembilan Belas (Sesi Perdamaian, Interdependensi dan Pembangunan), diadakan di Kairo, Republik Arab Mesir, dari 9-14 Muharram 1411H (31 Juli sampai 5 Agustus 1990),

Sangat menyadari tempat umat manusia dalam Islam sebagai wakil Allah di Bumi;

Menyadari pentingnya menerbitkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam semua aspek kehidupan;

Telah memeriksa tahapan persiapan dokumen draft ini yang telah dilalui, dan laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal;

Telah memeriksa Laporan Rapat Komite Ahli Hukum yang diadakan di Teheran dari tanggal 26 hingga 28 Desember 1989;

Setuju untuk menerbitkan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan menjadi pedoman umum bagi Negara Anggota di Bidang Hak Asasi Manusia;

Menegaskan peran peradaban dan sejarah Umat Islam yang Allah jadikan sebagai komunitas terbaik dan yang memberi umat manusia peradaban universal dan seimbang, dimana harmoni dibangun antara dunia dan akhirat, ilmu digabungkan dengan keimanan, dan untuk

memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat manusia yang bingung karena keyakinan dan ideologi yang berbeda dan bertentangan, dan untuk memberikan solusi bagi semua masalah kronis peradaban materialistik ini;

Sebagai kontribusi terhadap upaya umat manusia untuk menegaskan hak asasi manusia, melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegakkan kebebasan dan haknya atas kehidupan yang bermartabat sesuai dengan Syariah Islam;

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu materialistik masih, dan akan tetap, sangat membutuhkan keimanan untuk mendukung peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;

Meyakini bahwa hak dan kebebasan fundamental menurut Islam adalah bagian integral dari agama Islam dan bahwa tidak seorang pun berhak secara prinsip untuk menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagian, atau untuk melanggar atau mengabaikannya sejauh itu mengikat perintah Ilahi, yang terkandung dalam Kitab Wahyu Allah dan yang dikirim melalui Nabi terakhirnya untuk melengkapi pesan-pesan ketuhanan sebelumnya, dan bahwa menjaga hak-hak dan kebebasan fundamental itu adalah tindakan ibadah sedangkan pengabaian atau pelanggarannya adalah dosa keji, dan bahwa perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan adalah tanggung jawab individu setiap orang dan tanggung jawab kolektif dari seluruh umat;

Dengan ini dan atas dasar prinsip yang disebutkan di atas menyatakan sebagai berikut:

### *Pasal 1*

- a) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh ketundukan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia sederajat dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban dan tanggung jawab dasar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, kepercayaan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Agama yang benar adalah jaminan untuk meningkatkan martabat di sepanjang jalan menuju integritas manusia.
- b) Semua manusia adalah hamba Allah, dan yang paling dicintai oleh-Nya adalah mereka yang paling bermanfaat bagi hamba-Nya, dan tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik.

### *Pasal 2*

- a) Hidup adalah anugerah yang diberikan Tuhan dan hak untuk hidup dijamin untuk setiap manusia. Merupakan kewajiban individu, masyarakat dan negara untuk menjaga hak ini dari pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mengambil nyawa kecuali untuk alasan yang ditentukan syari'at.
- b) Dilarang menggunakan cara apa pun yang dapat mengakibatkan pemusnahan genosida umat manusia.
- c) Pelestarian hidup manusia sepanjang waktu yang dikehendaki Allah adalah kewajiban yang ditentukan oleh syari'at.
- d) Keselamatan dari cedera tubuh adalah hak yang dijamin. Adalah kewajiban negara untuk menjaganya, dan dilarang untuk melanggarnya tanpa alasan yang ditentukan syari'at.

### *Pasal 3*

- a) Dalam hal penggunaan kekuatan dan dalam kasus konflik bersenjata, tidak diperbolehkan membunuh orang yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Yang terluka



dan yang sakit berhak atas perawatan medis; dan tawanan perang berhak untuk diberi makan, berteduh dan diberi pakaian. Dilarang memutilasi atau memotong jenazah. Diwajibkan bertukar tawanan perang dan mengatur kunjungan atau reuni keluarga yang dipisahkan oleh keadaan perang.

- b) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman atau ternak, menghancurkan bangunan dan instalasi sipil musuh dengan cara menembaki, meledakkan atau cara lain apa pun.

#### *Pasal 4*

Setiap manusia berhak atas kesucian manusia dan perlindungan atas nama baik dan kehormatan selama hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi jenazah dan tempat pemakaman dari penodaan.

#### *Pasal 5*

- a) Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar membentuk keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada batasan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak ini.
- b) Masyarakat dan Negara harus menghilangkan semua hambatan pernikahan dan memfasilitasinya, dan harus melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.

#### *Pasal 6*

- a) Wanita setara dengan pria dalam martabat manusia, dan memiliki haknya sendiri untuk dinikmati serta kewajiban yang harus dilakukan, dan memiliki entitas sipil dan kebebasan finansial sendiri, dan hak untuk mempertahankan nama dan garis keturunannya.
- b) Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga.

*Pasal 7*

- a) Sejak saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberikan pengasuhan, pendidikan dan materi yang layak, higienis dan pengasuhan moral. Baik janin maupun ibunya harus dijaga dan diberi perawatan khusus.
- b) Orang tua dan mereka yang memiliki kapasitas serupa berhak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan bagi anak-anaknya, asalkan mempertimbangkan minat dan masa depan anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan prinsip syari'at.
- c) Kedua orang tua berhak atas hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat berhak atas hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan prinsip syari'at.

*Pasal 8*

Setiap manusia berhak untuk menikmati kelayakan yang sah dengan semua hak prerogatif dan kewajibannya, jika kelayakan tersebut hilang atau rusak, orang tersebut berhak untuk diwakili oleh walinya.

*Pasal 9*

- a) Pencarian ilmu adalah kewajiban dan penyediaan pendidikan adalah kewajiban masyarakat dan negara. Negara harus menjamin tersedianya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan akan menjamin keberagamannya untuk kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan manusia untuk mengenal agama Islam dan mengungkap rahasia semesta untuk kemaslahatan umat manusia.
- b) Setiap manusia berhak menerima pendidikan agama dan duniawi dari berbagai lembaga pengajaran, pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media, dll, dan dengan cara yang terintegrasi dan seimbang yang akan mengembangkan kepribadian manusia, memperkuat keimanan manusia kepada

Allah dan meningkatkan penghormatan dan pembelaan manusia terhadap hak dan kewajiban.

*Pasal 10*

Islam adalah agama yang benar-benar murni. Dilarang melakukan segala bentuk tekanan terhadap manusia atau mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk memaksanya pindah agama ke agama lain atau ke ateisme.

*Pasal 11*

- a) Manusia dilahirkan merdeka, dan tidak ada yang berhak memperbudak, mempermalukan, menindas atau mengeksploitasi mereka, dan tidak ada penaklukan selain kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- b) Semua jenis kolonialisme menjadi salah satu bentuk perbudakan yang paling jahat sama sekali dilarang. Rakyat yang menderita kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Ini adalah tugas semua rakyat Negara untuk mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk penghapusan segala bentuk pendudukan, dan semua Negara dan rakyat memiliki hak untuk mempertahankan identitas dan kendali independen mereka atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

*Pasal 12*

Setiap orang berhak, dalam kerangka syariah, untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya dan jika dianiaya, berhak mencari suaka di negara lain. Negara tempat pengungsian wajib memberikan perlindungan kepada pencari suaka sampai keselamatannya tercapai, kecuali suaka dimotivasi oleh tindakan yang dianggap oleh syariah sebagai kejahatan.

### *Pasal 13*

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang paling cocok untuknya dan yang melayani kepentingannya serta kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh diberikan pekerjaan di luar kemampuannya atau dia tidak boleh menjadi sasaran paksaan atau dieksploitasi atau dirugikan dengan cara apa pun. Ia berhak - tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan - atas upah yang adil untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan hari raya dan promosi yang layak diterimanya. Di pihaknya, dia harus berdedikasi dan teliti dalam pekerjaannya. Jika pekerja dan pemberi kerja tidak setuju tentang masalah apa pun, Negara akan turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan dan meminta penyelesaian keluhan, hak-hak dipertegas dan keadilan ditegakkan tanpa bias.

### *Pasal 14*

Setiap orang berhak untuk mencari nafkah yang sah tanpa monopoli, penipuan atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Riba secara eksplisit dilarang.

### *Pasal 15*

- a) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda yang diperoleh dengan cara yang sah, dan berhak atas hak milik tanpa mengurangi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diperbolehkan kecuali untuk persyaratan kepentingan publik dan pembayaran kompensasi yang cepat dan adil.
- b) Penyitaan dan perampasan properti dilarang kecuali untuk keperluan yang ditentukan oleh hukum.

### *Pasal 16*

Setiap orang berhak menikmati hasil kerja ilmiah, kesusasteraan, artistik atau teknisnya yang di dalamnya dia adalah pengarangnya; dan dia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang bersumber darinya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.

*Pasal 17*

- a) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, jauh dari kejahatan dan korupsi moral, yang mendukung perkembangan etika yang sehat dari pribadinya dan merupakan kewajiban Negara dan masyarakat secara umum untuk melaksanakan hak tersebut.
- b) Setiap orang berhak atas perawatan medis dan sosial, dan semua fasilitas umum yang disediakan oleh masyarakat dan Negara dalam batas-batas sumber daya yang tersedia.
- c) Negara harus menjamin hak individu atas kehidupan yang layak yang memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan medis dan semua kebutuhan dasar lainnya.

*Pasal 18*

- a) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keselamatan untuk dirinya sendiri, agamanya, tanggungannya, kehormatannya, dan hartanya.
- b) Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan relasi-relasinya. Tidak diizinkan untuk memata-matai dia, menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindunginya dari campur tangan sewenang-wenang.
- c) Kediaman pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua kasus. Itu tidak akan dimasuki tanpa izin dari penghuninya atau dengan

cara yang melanggar hukum, juga tidak akan dibongkar atau dibobol dan penghuninya diusir.

*Pasal 19*

- a) Semua individu sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara penguasa dan yang diperintah.
- b) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang.
- c) Kewajiban pada dasarnya bersifat pribadi.
- d) Tidak akan ada kejahatan atau hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam syari'at.
- e) Seorang terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam pengadilan yang adil dimana dia akan diberikan semua jaminan pembelaan.

*Pasal 20*

Tidak diizinkan tanpa alasan yang sah untuk menangkap seseorang, atau membatasi kebebasannya, untuk mengasingkan atau menghukumnya. Tidak diizinkan untuk menyiksanya secara fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman atau penghinaan. Juga tidak diizinkan menjadikan seseorang melakukan eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya atau dengan risiko kesehatan atau nyawanya. Juga tidak diizinkan untuk mengumumkan undang-undang darurat yang akan memberikan otoritas eksekutif untuk tindakan semacam itu.

*Pasal 21*

Menyandera dalam bentuk apa pun atau untuk tujuan apa pun secara tegas dilarang.

*Pasal 22*

- a) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- b) Setiap orang berhak mengadvokasi apa yang benar, menyebarkan apa yang baik, dan memperingatkan terhadap apa yang salah dan jahat menurut norma syari'at Islam.
- c) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Itu tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan sedemikian rupa yang dapat melanggar kesucian dan martabat para Nabi, merusak nilai-nilai moral dan etika atau menghancurkan, merusak atau merugikan masyarakat atau melemahkan keimanannya.
- d) Tidak boleh menimbulkan kebencian nasionalis atau doktrinal atau melakukan apa pun yang dapat memicu segala bentuk diskriminasi ras.

*Pasal 23*

- a) Otoritas adalah kepercayaan; dan penyalahgunaan atau eksploitasi jahat darinya secara eksplisit dilarang, untuk menjamin hak asasi manusia.
- b) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan publik di negaranya. Dia juga akan memiliki hak untuk memangku kantor publik sesuai dengan ketentuan syari'at.

*Pasal 24*

Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk pada syari'at Islam.

*Pasal 25*

Syariah Islam adalah satu-satunya sumber referensi untuk penjelasan atau klarifikasi pasal apapun dalam Deklarasi ini.

c) *The Precepts of the Order of Interbeing* (Sila Tata Antar-Makhluk)

**Sila Pertama**

Jangan menjadi penyembah berhala atau terikat pada doktrin, teori, atau ideologi apa pun, bahkan yang beragama Buddha. Sistem pemikiran Buddhis adalah cara membimbing; mereka bukanlah kebenaran mutlak.

**Sila Kedua**

Jangan berpikir bahwa pengetahuan yang Anda miliki saat ini adalah kebenaran mutlak yang tidak berubah. Hindari berpikiran sempit dan terikat pada pandangan saat ini. Pelajari dan praktikkan non-lampiran dari pandangan agar terbuka untuk menerima sudut pandang orang lain. Kebenaran ditemukan dalam hidup dan bukan hanya pengetahuan konseptual. Bersiaplah untuk belajar sepanjang hidup Anda dan untuk mengamati kenyataan di dalam diri Anda dan di dunia setiap saat.

**Sila Ketiga**

Jangan memaksa orang lain, termasuk anak-anak, dengan cara apapun, untuk mengadopsi pandangan Anda, baik dengan otoritas, ancaman, uang, propaganda atau bahkan pendidikan. Namun, melalui dialog penuh kasih, bantu orang lain untuk melepaskan fanatisme dan kesempitan.

**Sila Keempat**

Jangan hindari kontak dengan rasa sakit atau tutup mata Anda sebelum menderita. Jangan sampai kehilangan kesadaran akan adanya penderitaan dalam kehidupan dunia. Temukan cara untuk bersama mereka yang menderita dengan segala cara, termasuk kontak dan kunjungan pribadi, gambar, suara. Dengan cara demikian, bangunkan diri Anda dan orang lain pada realitas penderitaan di dunia.



**Sila Kelima**

Jangan mengumpulkan kekayaan saat jutaan orang kelaparan. Jangan menjadikan ketenaran, keuntungan, kekayaan, atau kesenangan sensual sebagai tujuan hidup Anda. Hidup sederhana dan bagikan waktu, energi, dan sumber daya dengan mereka yang membutuhkan.

**Sila Keenam**

Jangan mempertahankan amarah atau kebencian. Segera setelah kemarahan dan kebencian muncul, praktikkan meditasi welas asih untuk memahami secara mendalam orang-orang yang telah menyebabkan kemarahan dan kebencian. Belajar untuk melihat makhluk lain dengan mata kasih sayang.

**Sila Ketujuh**

Jangan kehilangan diri Anda dalam penyebaran dan lingkungan Anda. Belajar untuk melatih pernapasan untuk mendapatkan kembali ketenangan tubuh dan pikiran, untuk melatih perhatian penuh dan untuk mengembangkan konsentrasi dan pemahaman.

**Sila Kedelapan**

Jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan perselisihan dan merusak komunitas. Lakukan segala upaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik, betapapun kecilnya.

**Sila Kesembilan**

Jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi atau untuk membuat orang terkesan. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan dan kebencian. Jangan menyebarkan berita yang tidak Anda ketahui secara pasti. Jangan mengkritik atau mengutuk hal-hal yang tidak Anda yakini. Selalu berbicara dengan jujur dan konstruktif. Beranikan diri untuk berbicara tentang situasi ketidakadilan, meskipun hal itu dapat mengancam keselamatan Anda sendiri.

### **Sila Kesepuluh**

Jangan menggunakan komunitas Buddhis untuk keuntungan atau keuntungan pribadi, atau mengubah komunitas Anda menjadi partai politik. Namun, komunitas religius harus mengambil sikap yang jelas terhadap penindasan dan ketidakadilan dan harus berusaha untuk mengubah situasi tanpa terlibat dalam konflik partisan.

### **Sila Kesebelas**

Jangan hidup dengan pekerjaan yang merugikan manusia dan alam. Jangan berinvestasi di perusahaan yang menghilangkan kesempatan orang lain untuk hidup. Pilih pekerjaan yang membantu mewujudkan cita-cita welas asih Anda.

### **Sila Kedua Belas**

Jangan membunuh. Jangan biarkan orang lain membunuh. Temukan cara apa pun yang memungkinkan untuk melindungi kehidupan dan mencegah perang.

### **Sila Ketigabelas**

Tidak memiliki apa pun yang seharusnya menjadi milik orang lain. Hormati milik orang lain, tetapi cegah orang lain memperkaya diri mereka sendiri dari penderitaan manusia atau penderitaan makhluk lain.

### **Sila Keempat Belas**

Jangan menganiaya tubuh Anda. Belajar menanganinya dengan hormat. Jangan melihat tubuh Anda hanya sebagai instrumen. Pertahankan energi vital (seksual, nafas, roh) untuk realisasi Jalan. Ekspresi seksual tidak boleh terjadi tanpa cinta dan komitmen. Dalam hubungan seksual, waspadai penderitaan masa depan yang mungkin terjadi. Untuk menjaga kebahagiaan orang lain, hormati hak dan

komitmen orang lain. Sadar sepenuhnya akan tanggung jawab membawa kehidupan baru ke dunia. Renungkan dunia tempat Anda membawa makhluk baru.

*Thich Nhat Hanh, 1964*

## **B. AGAMA-AGAMA DUNIA SEBAGAI ORGAN PERDAMAIAN**

### **1. Potensi dan Daya Agama-Agama Dunia**

Agama memiliki dua warisan dalam sejarah manusia tentang perdamaian dan kekerasan. Baik kontribusinya terhadap kekerasan maupun kontribusinya pada nilai-nilai pro-sosial dan penciptaan perdamaian perlu dipelajari oleh para sarjana di dalam dan di luar agama perseorangan, dengan tujuan untuk berbagi informasi tentang hal tersebut seluas mungkin. Hal ini dapat menjadi dasar strategi kreatif pencegahan konflik dan resolusi konflik yang merupakan bagian integral dari sistem makna keagamaan yang berkembang.

Ada banyak sekali nilai-nilai agama di antara agama-agama global, yang dapat memberikan alat yang sangat diperlukan dalam mendingkai wacana keagamaan untuk terlibat dalam pencegahan konflik, manajemen konflik, kompromi, negosiasi dan rekonsiliasi. Hal-hal tersebut mesti dipelajari, dikatalogkan dan tersedia untuk semua pihak. Sangat dimungkinkan muncul strategi penciptaan perdamaian yang diilhami oleh etika agama dengan cara-cara interaksi yang dapat diterapkan di luar dunia religius, serta membantu dalam menangani lebih banyak jenis konflik yang sulit diselesaikan. Saat ini terdapat banyak konflik budaya dan etnis yang jumlahnya terus bertambah, yang karakternya sangat mirip dengan konflik agama, sehingga metode keagamaan untuk menciptakan perdamaian mungkin memiliki dampak yang jauh lebih luas jika diterapkan di luar batas-batas konflik agama yang ketat. Kisah-kisah penuh harapan dan heroik dari penegakan dan pemeliharaan perdamaian antaragama muncul dari individu-individu yang memiliki kombinasi ekspresi religiusitas mereka sendiri yang

sangat otentik bersamaan dengan penghormatan tanpa syarat atau cinta kepada orang-orang yang tidak beriman sebagai sesama manusia. Hal ini adalah kombinasi yang relatif jarang ditemui, tetapi bagaimanapun hal tersebut dapat dipupuk diantara pemeluk agama di seluruh dunia.

Jadi, sangat mungkin bahwa kunci masa depan bukan hanya kecanggihan teologis, meskipun hal tersebut tentu penting, tetapi juga semacam pelatihan emosional. Hal tersebut dapat menghantarkan orang-orang untuk merasa aman dan nyaman dalam keimanan masing-masing, sehingga tidak terancam oleh pihak lain. Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kepercayaan pada konsep Pencerahan, kepercayaan pada pasar, atau kepercayaan pada metode ilmiah dan pentingnya universalitas. Mereka juga dapat memimpin pencegahan konflik atau sebaliknya menjadi bagian dari masalah jika mereka merasa terancam oleh paradigma lain tentang kehidupan. Bagaimanapun, nampaknya konstruksi sekuler dan demokrasi mungkin tidak cukup untuk menciptakan komunitas global yang memiliki makna dan nilai bersama. Manusia sedang dalam perjalanan untuk menemukan model eksistensi bermakna yang dapat diterapkan untuk keanekaragaman budaya dan agama di dunia saat ini.

Peran yang dapat dimainkan oleh kaum agamawan dalam rangka penegakan perdamaian telah dibuktikan dengan, misalnya, pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Dunia Milenium Para Pemimpin Agama dan Spiritual (*a Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders*). Forum ini memiliki posisi tersendiri diantara gagasan dan gerakan perdamaian religius yang lain, karena difasilitasi oleh organisasi dunia yang merepresentasikan negara-negara di seluruh dunia, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2000, sekitar dua ribu pemimpin agama dan spiritual terkemuka dunia yang mewakili banyak tradisi kepercayaan, berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dan mengikuti KTT tingkat dunia tersebut.

KTT ini dilakukan oleh PBB dengan pertimbangan bahwa sejak akhir Perang Dunia II, saat PBB dibentuk untuk membebaskan dunia dari momok perang, konflik bersenjata telah merenggut sekitar 27 juta jiwa di seluruh dunia. Diperkirakan 85% dari korban ini adalah warga sipil, terutama anak-anak dan orang tua. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi lebih dari seratus konflik bersenjata di seluruh dunia, di lebih dari 70 lokasi yang berbeda di setiap wilayah seluruh dunia. Tujuan dari KTT Perdamaian Dunia Pemimpin Agama dan Spiritual tersebut adalah untuk menciptakan sebuah forum bagi para pemimpin terkemuka dari semua agama besar dunia dan tradisi kepercayaan agar supaya dapat berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan mereka bersama-sama berjanji komitmen untuk melakukan tindakan nyata untuk tercapainya perdamaian dunia. Komitmen ini telah diwujudkan dalam Deklarasi untuk Perdamaian Dunia yang ditandatangani oleh para peserta dan telah ditentukan tindakan-tindakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

Komitmen tersebut juga mencakup pernyataan-pernyataan tentang kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian, mempromosikan pengentasan kemiskinan dan memikul tanggung jawab bersama untuk memperluas akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk mencapai penghidupan yang aman dan berkelanjutan. Komitmen itu juga menjanjikan para penandatangan untuk mendidik komunitas mereka masing-masing tentang perlunya menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Maka dapat dinyatakan bahwa komitmen tersebut merupakan saksi atas kekuatan kata-kata. Ia adalah kekuatan yang dapat mengubah persepsi, membentuk perilaku dan mengubah sesuatu yang dideklarasikan dan dilakukan atas nama agama. Sebagai bagian dari perjalanan peradaban manusia, maka para pemimpin KTT tersebut telah menandatangani sebuah dokumen bersejarah. Dari sudut pandang organisasi global seperti PBB, hal ini merupakan

langkah pertama dalam mengembangkan cara agar agama-agama dunia dapat bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi.

Pada presentasi komitmen di KTT Agama tersebut, beberapa tokoh agama yang berkesempatan menyampaikan pernyataannya diantaranya adalah Francis Kardinal Arinze dari Vatikan; Abdullah al-Obaid, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia; Kepala Rabi Israel, Meir Lau; Yang Terhormat Kuni Kumiaki, Jingu Daiguji, Imam Besar, dari Kuil Agung di Ise; Pendeta Konrad Raiser, dan tokoh-tokoh yang lain. Komitmen tersebut dikembangkan berdasarkan masukan dari Dewan Penasihat Internasional KTT dan Kelompok Cendekiawan di Harvard Divinity School, serta mitra strategis KTT lainnya pada bulan-bulan sebelum KTT dilaksanakan. Kemudian komitmen tersebut diedarkan di kalangan pemuka agama untuk mendapatkan saran, masukan dan perubahannya. Karena itulah, komitmen tersebut mencakup masukan dari semua agama besar. KTT Keagamaan ini juga merancang inisiatif berkelanjutan untuk mengatasi konflik regional, kemiskinan dan masalah lingkungan. Selain penandatanganan Komitmen Perdamaian Global, hasil lain KTT Keagamaan ini adalah pembentukan Dewan Penasihat para pemimpin agama untuk mendukung PBB dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik. Maka dapat dinyatakan bahwa KTT tersebut merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa para pemimpin agama dan spiritual dari berbagai tradisi kepercayaan dunia berkumpul untuk membahas dan menjalin kemitraan perdamaian dengan PBB, serta untuk mengidentifikasi cara-cara agar komunitas agama di seluruh dunia dapat bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian, memberantas kemiskinan dan bergerak maju dengan inisiatif lingkungan.

Diperkirakan 83% populasi dunia menganut beberapa jenis sistem kepercayaan agama atau spiritual formal. Namun, sebagian besar juga mengandung keragaman yang sama besarnya. Misalnya, secara keseluruhan, agama Kristen adalah kelompok agama terbesar (34%). Di Amerika Utara saja ada 1.200 denominasi Kristen. Agama dan spiritualitas jelas merupakan kekuatan penting umat manusia dan juga

dicirikan oleh keragaman yang luar biasa kaya. Sentralitas kepemimpinan agama dan spiritual pada kepentingan bersama semakin diakui, terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian konflik. Karena banyak bentrokan lintas batas dan internal militer berakar pada perbedaan etnis dan keyakinan, kepemimpinan komunitas agama dan spiritual dipandang penting untuk mencegah konflik bersenjata dan menyelesaikannya saat hal tersebut terjadi, sehingga menciptakan komunitas yang damai dan toleran.

Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu yaitu Kofi Annan berbicara tentang dimensi religius dan spiritual yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB adalah permadani, tidak hanya jas dan sari tetapi juga kerah ulama, kebiasaan biarawati dan jubah lama; dari mitra, kopiah, dan yarmulkes. Ia menegaskan bahwa ada kesamaan dasar antara ajaran agama-agama besar dunia dan nilai-nilai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Annan juga menekankan bahwa peran kepemimpinan agama tidak hanya untuk advokasi umum, tetapi juga untuk tanggung jawab khusus resolusi konflik. Dalam berbicara tentang prospek perdamaian di masa depan, dia mendesak para pemimpin untuk mengembalikan agama ke peran yang sah sebagai pembawa damai dan penentram. Ia menyatakan: "Seperti yang Anda ketahui lebih baik daripada siapa pun, masalah konflik tidak pernah terletak pada Alkitab atau Taurat atau Alquran. Memang, masalahnya tidak pernah pada iman. Ini adalah masalah kesetiaan dan bagaimana kita berperilaku terhadap satu sama lain. Anda harus, sekali lagi, mengajari umat Anda cara-cara damai dan cara-cara toleransi."<sup>43</sup>

Sepanjang konflik yang terjadi di Rwanda, Bosnia, dan Kosovo, misalnya, berbagai upaya pribadi telah dilakukan untuk menggalang kepemimpinan agama untuk perdamaian. Pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II mengumpulkan para pemimpin Kristen, Muslim, Yahudi dan agama lainnya di Assisi untuk berdoa bagi perdamaian di

---

<sup>43</sup> The World Council of Religious Leaders, "About the Summit: The Goal of Religious and Spiritual Leadership," 2000, <http://www.millenniumpeacesummit.org/item1.html>.

Balkan. Pada tahun 1997, Konferensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian bertindak sebagai fasilitator di Bosnia untuk membuka dialog tentang kepemimpinan di antara komunitas Muslim, Ortodoks, Katolik Roma, dan Yahudi di negara itu. Pada tahun 1997, *Interfaith Center and the Temple of Understanding menyelenggarakan Interfaith Service of Commitment to the Work of the United Nations* tahunan pertama. Ibadah Antaragama juga dilaksanakan sebelum pembukaan Majelis Umum setiap tahun. Upaya-upaya pribadi seperti ini, yang seringkali terfokus pada satu konflik, telah membuahkan hasil dalam satu waktu dan tempat. Mereka memang belum naik ke tingkat yang lebih global, dan mengilhami advokasi antaragama yang berkelanjutan untuk perdamaian di tingkat internasional tertinggi.

Globalisasi dan teknologi komunikasi kontemporer telah banyak membantu perekonomian negara-negara di seluruh dunia dan untuk menciptakan rasa keterkaitan yang semakin besar di antara orang-orang. Namun kemajuan-kemajuan ini tidak mengurangi masalah-masalah yang mengganggu umat manusia. Kebrutalan perang dan keputusan kemiskinan adalah kenyataan saat ini seperti halnya di masa lalu. Penderitaan manusia berlanjut pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Untuk mengatasi penyakit ini, diperlukan upaya spiritual yang bersatu, yang dapat menggabungkan agama, banyak kelompok etnis dan bangsa di seluruh dunia dalam satu tuntutan untuk perdamaian.

Dengan demikian, satu pertemuan akan dapat memotivasi kepemimpinan, namun motivasi tersebut harus dipertahankan dan kepemimpinan harus dijalankan dengan hati-hati, jika efeknya diharapkan bisa bertahan lama. Momentum historis konflik harus dihadapi dengan momentum historis yang sama untuk perdamaian. Untuk memastikan bahwa semangat dan deklarasi KTT menciptakan momentum yang berkelanjutan, para peserta KTT membentuk Dewan Penasihat Internasional Pemimpin Agama yang berfungsi sebagai sumber daya bagi upaya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan konflik internasional. Pembentukan



Dewan Penasihat adalah langkah pertama menuju pengembangan Akademi Non-Kekerasan dan Etika Dunia. Dewan tersebut memiliki cabang global dan menyediakan penelitian, pendidikan, dan kepemimpinan tentang masalah etika dan mekanisme praktis untuk menjaga perdamaian dunia. Untuk tujuan ini, KTT Perdamaian Dunia adalah peristiwa bersejarah, karena ini adalah pertama kalinya pertemuan para pemimpin agama bergengsi dari seluruh dunia berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menandai era baru kolaborasi antara komunitas agama yang berbeda dan antara kepemimpinan politik dan spiritual dunia. Para pemimpin agama berbicara kepada penduduk dunia tentang bagaimana orang-orang dengan sistem kepercayaan yang beragam dapat hidup bersama dalam damai.

Era baru kolaborasi yang diresmikan oleh KTT Perdamaian Dunia Milenium Para Pemimpin Agama dan Spiritual di Majelis Umum PBB pada bulan Agustus 2000 itu memuncak dalam sejumlah hasil yang luar biasa. Pertemuan para pemimpin agama dan spiritual terkemuka dunia ini dalam seruan bersatu untuk perdamaian diharapkan akan memperkuat prospek perdamaian saat manusia memasuki milenium baru. Penandatanganan Komitmen untuk Perdamaian Global oleh beberapa ratus pemimpin internasional terkemuka dari berbagai tradisi agama telah dilakukan di KTT ini. Dua aspek utama dari Komitmen tersebut adalah: 1) Mengutuk semua kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dan 2) mengakui nilai keragaman agama dan etnis. Komitmen lainnya adalah mengakui kemitraan setara antara laki-laki dan perempuan, menyerukan program global reboisasi dan mencari kesetaraan ekonomi yang lebih besar. Dokumen ini telah beredar luas pada komunitas-komunitas agama di seluruh dunia.

Sebagai hasil dari KTT ini, terdapat inisiasi proses untuk membentuk Dewan Pemimpin Agama dan Spiritual Dunia untuk bekerja dalam kapasitas penasihat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya dalam upaya perdamaian dan pemeliharaan perdamaian. Hal ini akan membawa kehadiran agama

dan spiritual ke dalam transformasi konflik dan akan membantu mengatasi masalah kritis yang dihadapi masyarakat dunia. Ada konsensus umum diantara para pemimpin agama tentang perlunya Dewan semacam itu. Rincian misi, struktur, fungsi dan sumber pendanaannya dibahas oleh pertemuan para pemimpin agama dan ulama pada pertemuan pertama Dewan Pengarah.

Di samping hal di atas, terdapat pula pendirian inisiatif Pemimpin Agama dari Forum Ekonomi Dunia untuk membawa nasihat moral dan spiritual ke tantangan utama zaman modern, termasuk globalisasi dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang berkembang. Pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2001 di Davos, Swiss, KTT Perdamaian Dunia Milenium dan Forum Ekonomi Dunia mengumumkan peluncuran Prakarsa Keagamaan untuk melibatkan para pemimpin agama dunia secara lebih langsung dalam kerja Forum. Kemitraan dengan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB juga didirikan untuk membawa suara agama dan spiritual untuk memerangi intoleransi dan rasisme. Hal ini mengarah pada produksi sebuah buku, yaitu *Sacred Rights: Faith Leaders on Tolerance and Respect, for the Human Rights Commission*, dalam rangka mendukung Konferensi Dunia Menentang Rasisme.

Hasil yang lain dari KTT Perdamaian Dunia Milenium Para Pemimpin Agama dan Spiritual adalah pembentukan Komisi Global untuk Pelestarian Situs Suci yang didirikan bersama dengan UNESCO dan Dana Monumen Dunia. Fungsi komisi ini adalah mengikutsertakan umat beragama dalam mengamankan tempat-tempat suci yang terancam konflik dan intoleransi serta memulihkan yang rusak akibat perang. Hasil berikutnya adalah terjadinya dialog antaragama internasional di Iran. Dari pertukaran informasi di KTT, berlanjut ke pertukaran kunjungan bersejarah antara pemimpin Muslim dari Iran dan pemimpin Buddha dari Thailand, yang bersepakat komitmen untuk dialog lebih lanjut tentang perspektif agama mengenai pembangunan ekonomi. Juga diatur pertemuan tingkat tinggi antara para pemimpin Yahudi dan para pemimpin

Muslim Iran. Selanjutnya, pemerintah Iran telah mengundang *Millennium World Peace Summit* untuk bermitra dalam penyelenggaraan konferensi antaragama internasional di Iran. Terdapat pula Organisasi Kongres Internasional tentang Pelestarian Keanekaragaman Agama di New Delhi, India. Hal ini berkembang dari lokakarya selama KTT Perdamaian Dunia yang membahas ketegangan antara komunitas Kristen dan Hindu di India mengenai program pembangunan ekonomi yang terkait dengan konversi agama.

Beberapa kalangan, khususnya para akademisi, memberikan tanggapan mereka terhadap perhelatan *a Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders* di atas. Salah satu diantaranya adalah Janice Love.<sup>44</sup> Ia menegaskan bahwa para sarjana politik dunia mestilah peduli dan memperhatikan proses dan hasil KTT kaum agamawan yang difasilitasi oleh PBB ini. Sebagai sebuah disiplin akademik, kajian ilmiah seringkali kekurangan pemahaman yang kompleks tentang aktor agama, sistem kepercayaan, organisasi, dan praktik keagamaan. Karya-karya para sarjana harus menjelaskan sifat multidimensi dari tradisi keagamaan dan realitas hidup para pemeluknya.

Dalam sejarah panjang dialog antaragama, KTT yang serupa dengan ini telah berlangsung beberapa kali. Aktivitas dialog secara global masih dalam masa pertumbuhan, dan baru dimulai pada tahun 1890-an. Sebelum KTT ini, para pemimpin agama secara mandiri mensponsori berbagai pertemuan dan memilih peserta, kemudian mengumpulkan, misalnya, lebih dari 8.000 pemimpin di Parlemen Agama-Agama Dunia yang keseratus tahun 1993. Tetapi baru kali inilah KTT dialog antaragama dilaksanakan di bawah organisasi dunia Persatuan Bangsa-Bangsa, dengan Sekretaris Jenderalnya saat itu yaitu Kofi Annan. PBB mempromosikan gagasan dan mendanai pertemuan tersebut.

---

<sup>44</sup> Janice Love, "Religion in Politics: Reflections on the UN's Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders," *International Studies Perspectives* 2, no. 1 (2001).

Bagaimanapun, KTT tersebut juga menunjukkan risiko karena merupakan sesuatu yang mirip dengan acara keagamaan yang disponsori oleh negara, bahkan tidak menutup kemungkinan ada andil kapitalis global di dalamnya. Pemerintah China, misalnya, menekan Annan dan penyelenggara KTT untuk memveto partisipasi Dalai Lama, pemimpin spiritual dari 15 juta umat Buddha Tibet, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, dan seorang tokoh yang terkenal mempromosikan toleransi beragama. Pengecualian ini merusak artikulasi kuat dukungan KTT untuk kebebasan beragama dan menghasilkan liputan media yang lebih sekuler daripada acara itu sendiri. Kekurangan lain dari KTT ini adalah penekanan yang lebih banyak pada pidato daripada dialog, kemudian dominasi peserta laki-laki dibandingkan perempuan yang menempati sebagian besar ruang keagamaan tingkat lokal.

KTT adalah simbol yang kuat, baik bagi politik dunia maupun bagi sebuah kajian ilmiah. Pertemuan ini merupakan tren signifikan yang harus diperhatikan. Ketaatan pada agama dan gerakan spiritual meningkat di banyak bagian dunia. Dunia juga menyaksikan kebangkitan identitas etnis dan keragaman fundamentalisme. Untungnya, di samping kecenderungan tersebut, dunia juga melihat momentum yang tumbuh di KTT, yaitu upaya untuk meminimalisir perpecahan antar umat beragama yang telah berlangsung berabad-abad, dengan mempromosikan toleransi beragama melintasi perbedaan yang mendalam di dalam dan diantara tradisi. Proses di KTT ini telah menunjukkan bahwa mereka menarik prinsip-prinsip teologis dasar dari tradisi agama dengan menggunakan ritual keagamaan untuk merawat masyarakat yang terkoyak oleh perselisihan dan kekerasan, dan untuk terlibat secara serius dalam jenis dialog antaragama yang meninggikan rasa hormat dan pengertian, bukan konversi atau pengabaian warisan dan kepercayaan.

Salah satu hasil yang spektakuler dari KTT tersebut adalah terbentuknya Dewan Pemimpinan Agama Dunia (*World Council of Religious Leaders*). Dewan Pemimpin Agama Dunia adalah sebuah

badan independen yang bekerja untuk membawa sumber daya agama dalam rangka mendukung aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal perdamaian. *World Council of Religious Leaders* (WCRL) ini bukanlah bagian resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga tidak memiliki status dengan PBB. Pembentukan Dewan Pemimpin Agama Sedunia merupakan salah satu tujuan yang dinyatakan dalam KTT Perdamaian Dunia Milenium. Tujuan dari Dewan ini adalah untuk menjadi sumber daya bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya di seluruh dunia, negara-negara bangsa dan organisasi internasional lainnya, dalam menawarkan kebijaksanaan kolektif dan sumber daya tradisi iman menuju penyelesaian masalah global yang kritis. Peluncuran Dewan Dunia berlangsung di Bangkok pada tanggal 12-14 Juni 2002, di Buddhamonthon dan di UNESCAP. Para peserta mengadopsi Piagam yang menguraikan bidang-bidang utama yang menyatakan bahwa para pemimpin agama dapat memainkan peran aktif dalam mengurangi konflik dan menangani kebutuhan kritis umat manusia.

Dewan Pemimpin Agama Dunia bertujuan untuk menjadi model dan panduan bagi penciptaan komunitas agama-agama dunia. Institusi ini berupaya untuk menginspirasi siapa pun dari semua tradisi dan agama dalam menegakkan perdamaian dan menegaskan pentingnya saling pengertian. Dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dimiliki oleh semua tradisi agama dan dengan menyatukan komunitas manusia, Dewan tersebut berusaha membantu dalam pengembangan kualitas batin dan kondisi yang diperlukan untuk penciptaan masyarakat dunia yang lebih damai, adil dan berkelanjutan. Dewan Dunia akan mendorong tradisi keagamaan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bekerja sama lebih erat dalam membangun komunitas agama-agama dunia untuk bekerja demi kepentingan masyarakat global. Di dunia yang rapuh dan tumbuh semakin penuh kekerasan, semua pihak mesti berpadu untuk berdialog lebih lanjut dan membangun fondasi kepercayaan.

Pada periode berikutnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, muncul usulan pendirian *Inter-religious and International Peace Council* (IIPC). Maka pada bulan Oktober 2003 di New York diadakan pertemuan para aktivis dan pakar dalam organisasi antar negara, kerjasama antar agama, resolusi konflik, keamanan manusia dan pembangunan manusia, dari 25 negara di semua benua. Mereka mendiskusikan tujuan dan sasaran dari Dewan yang baru lahir, serta kemungkinan struktur organisasi, program dan inisiatif, dan juga membuat beberapa rekomendasi khusus tentang kegiatan langsung IIPC.

IIPC diresmikan pada awal Oktober 2003 sebagai prototipe badan PBB baru, untuk memperkaya kegiatan PBB dengan prinsip-prinsip spiritual dan moral. Usulan untuk membentuk Dewan Antaragama di Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Tujuan Deklarasi Milenium, yang menyediakan perdamaian dan keamanan internasional dan berkontribusi pada solusi masalah global. Dengan asumsi sifat spiritual esensial umat manusia, IIPC menyatakan bahwa setiap strategi perdamaian yang berhasil harus memperhitungkan dimensi spiritual yang substansial dari identitas, pengalaman, dan interaksi manusiawi.

Diharapkan bahwa dewan antar agama dapat secara signifikan memberdayakan kapasitas PBB untuk menangani akar penyebab konflik dan kekerasan dengan secara langsung menangani isu-isu agama. Dewan ini dapat memfasilitasi setidaknya tiga hal: Pertama, memanfaatkan sumber daya yang saat ini kurang dimanfaatkan dari agama-agama dunia dan organisasi mereka; Kedua, mengambil keuntungan yang diperlukan dari kesempatan saat ini untuk menangani terorisme dan kekerasan melalui dialog antar-agama; Ketiga, membangun reformasi PBB yang kreatif dan sangat dibutuhkan yang tidak hanya terbatas pada penataan kembali perimbangan kekuatan dalam sistem PBB yang ada.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Vladimir Petrovsky, "An Interreligious Council at The UN UN Charter Possibilities and Constraints," *International Journal on World Peace* 20, no. 4 (2003): 50.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendekatan berbasis nilai tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dewan antaragama menjadi suara semangat dan keimanan. Dewan memikul otoritas moral para anggotanya yang mewakili umat beragama di semua negara. Jika pernyataan bahwa setiap agama menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi adalah benar, maka dewan antaragama harus mewujudkan kemampuan praktis orang-orang dari berbagai agama untuk bekerja sama dan mengubah dunia menjadi lebih baik. Dewan mesti dibangun di atas prinsip-prinsip yang benar dan masuk akal. Artinya, dewan antaragama perlu menjadi sebuah struktur yang efektif dan dapat dikelola, dan tidak dibangun sebagai sebuah badan hierarkis. Model komunikasi jaringan dan dialog pluralistik tampaknya lebih tepat. Dengan mengingat hal ini, maka Dewan seyogyanya memiliki pedoman prinsip, semacam manifesto perdamaian, yang menekankan tujuan dibandingkan dengan struktur. Hal ini akan menjadi semacam bangunan dan ruang hati nurani dibandingkan dengan bentuk legitimasi legislatif.

Dengan demikian, pendekatan lunak dan keras terhadap reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jika diterapkan secara wajar dan terampil, dapat membuka peluang bagi Dewan Antaragama, baik sebagai bagian dari Keluarga PBB atau sebagai pemain eksternal, yang akan membawa PBB lebih dekat ke sebuah organisasi internasional ideal yang menangani kepentingan manusiawi semua orang dan menjadikannya benar-benar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pertemuan-pertemuan yang digelar antar pemeluk agama, dalam forum apapun saja terlepas dari level keorganisasian tingkat lokal atau internasional, terdapat banyak spektrum yang bisa dimasuki dan dijelajahi. Dalam agama apa pun, spektrum perspektif sangat dimungkinkan, termasuk diantaranya adalah mistisisme, agama yang terorganisir, dan fundamentalisme atau ekstremisme. Semua agama dimulai dengan seseorang yang memiliki pengalaman mistik yang didefinisikan sebagai *a direct experience of ultimate reality* (pengalaman



langsung dari realitas tertinggi).<sup>46</sup> Pengalaman ini melampaui panca indera dan memberikan pengalaman langsung tentang kehadiran Tuhan atau roh dalam berbagai cara. Orang-orang yang demikian kemudian berbagi pengalaman mereka dan kebijaksanaan tentang hidup serta makna dan tujuannya yang mereka peroleh dari pengalaman ini dengan orang lain, yang akhirnya mendorong terjadinya pembentukan agama di sekitar ajaran orang-orang yang tercerahkan itu. Begitu agama terbentuk, ajaran pendiri menjadi dasar kitab suci bagi agama. Kemudian ajaran tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi bagian dari pembelajaran sosial dan budaya. Ketika ajaran-ajaran ini kemudian ditafsirkan secara dogmatis atau ketika mengarah pada perilaku ekstremis seperti kekerasan terhadap orang lain, maka ajaran tersebut merupakan versi dari para fundamentalis atau ekstremis. Penting kiranya untuk dipahami bahwa semua agama berpotensi mengandung semua perspektif ini.

Meskipun demikian, tentunya ada pengecualian. Secara umum, mistikus dari semua agama dapat memahami dan menghormati satu sama lain, karena mereka berasal dari pengalaman batin langsung yang Ilahi, dan bukan dari perbedaan keyakinan yang dipelajari secara sosial, yang sering ditekankan oleh agama-agama yang terorganisir. Bagaimanapun, terdapat beberapa perdebatan mengenai apakah mistikus dari semua agama mengalami hal yang sama, atau apakah pengalaman mistik mereka dimediasi melalui budaya atau pembelajaran mereka. Bagi para fundamentalis atau ekstremis dari agama manapun, mereka cenderung percaya bahwa hanya satu interpretasi kitab suci yang benar, yaitu interpretasi milik mereka sendiri. Pandangan yang demikian mengarah kepada menghilangkan kemungkinan kebenaran yang datang dari agama lain atau dari perspektif lain dalam agama mereka sendiri. Hal ini yang menyebabkan beberapa orang menyarankan bahwa dunia tidak hanya membutuhkan

---

<sup>46</sup> Denise Lardner Carmody and John Carmody, *Mysticism: Holiness East and West* (New York: Oxford University Press, 1996).



dialog antar umat beragama, tetapi juga dialog antara madzhab, sekte atau denominasi yang berbeda dalam agama yang sama.<sup>47</sup>

Terlepas dari berbagai kemungkinan perspektif atau interpretasi kitab suci dalam agama tertentu, kiranya penting untuk dipahami bahwa semua agama menyatakan diri bahwa mereka mendukung perdamaian. Berikut ini adalah sekelumit contoh dari ragam perspektif agama dan tradisi spiritual dunia:

- “Seorang Muslim adalah orang yang berserah diri pada kehendak Allah dan merupakan pencipta perdamaian (Islam berarti menegakkan perdamaian, Muslim berarti orang yang menegakkan perdamaian melalui tindakan dan perilakunya).” (Islam)
- “Tuhan tinggal di dalam hati setiap makhluk. Dia memutar mereka berputar-putar di atas roda Maya. Berlindung sepenuhnya di dalam Dia. Dengan rahmat-Nya Anda akan menemukan kedamaian tertinggi, dan keadaan yang melampaui segala perubahan.” (Hinduisme)
- “Seluruh Taurat adalah untuk tujuan mempromosikan perdamaian.” (Yahudi)
- “Agar selaras dengan orang lain, Anda harus berdamai dengan diri sendiri.” (Budha)
- “Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.” (Kristianitas)
- “Jika seseorang bernyanyi tentang Tuhan dan mendengar tentang Dia, Dan membiarkan cinta Tuhan tumbuh di dalam dirinya, Semua kesedihannya akan lenyap, dan dalam pikirannya, Tuhan akan memberikan kedamaian abadi.” (Sikhisme)

Meskipun secara nyata komitmen perdamaian itu ada dan tertera, tetapi terdapat orang-orang dari agama yang berbeda yang secara historis dan terus berlanjut hingga hari ini, menggunakan kekerasan dan peperangan untuk menyelesaikan konflik. Pihak-pihak tersebut

---

<sup>47</sup> J.B. Banawiratma, *Dialog Antarumat Beragama – Gagasan Dan Praktik Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2010).

menggunakan agama untuk membenarkan tujuan non-agama mereka demi kekuasaan atau agresi. Berbagai agama memang memiliki tradisi perang suci dan membenarkan kekerasan untuk membela diri ketika diserang.<sup>48</sup> Penciptaan dunia yang lebih damai akan membutuhkan upaya yang berkomitmen dalam jangka panjang untuk menciptakan kondisi perdamaian.

Semua agama juga memiliki beberapa versi tentang aturan emas, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan sendiri. Setiap individu beragama mesti menyadari bahwa di dunia yang saling bergantung, prinsip-prinsip umum dalam semua agama dan prinsip-prinsip yang diterapkan seseorang pada anggota dari agamanya sendiri, perlu diterapkan tidak hanya pada kelompoknya tersebut, tetapi juga perlu diperlakukan pada kemanusiaan secara umum. Menyadari dan menerapkan hal ini dalam kehidupan seseorang dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam menciptakan masa depan dunia yang lebih baik.

Terdapat beberapa prinsip tentang cara-cara melakukan dialog antaragama atau antara orang-orang dari tradisi spiritual dan agama yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bersikap terbuka dan mau mendengarkan tanpa menilai perjalanan spiritual, pandangan, dan pengalaman orang-orang dari agama lain sebagai lawan berdebat tentang agama mana yang benar atau salah, yang menghambat pendengaran, pembelajaran, dan dialog nyata dalam situasi seperti itu.
- Jangan mencoba untuk mengubah siapa pun dari agama mereka ke agama Anda. Ini bertentangan dengan pentingnya menghormati agama orang yang beragam dan terbuka untuk belajar tentang mereka.
- Jangan mencoba untuk menciptakan satu agama dunia, tetapi hormati keragaman tradisi.

---

<sup>48</sup> Imran Iqbal, "Just Wars, Holy Wars and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges," *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 1 (2014).

- Biarkan orang-orang dari masing-masing agama berbicara sendiri, dari pengalaman mereka sendiri, tentang apa artinya menjalankan agama itu.
- Membiarkan kemungkinan beberapa spiritualitas umum yang mendasari semua keragaman agama melalui mana spiritualitas itu mengekspresikan dirinya.
- Sadarilah bahwa seseorang dapat memperkaya kehidupan spiritual-religiusnya sendiri dengan terbuka untuk belajar dari tradisi lain tanpa harus meninggalkan tradisinya sendiri.
- Sadarilah bahwa manusia, sepanjang sejarah yang telah direkam dalam berbagai budaya dan peradaban di seluruh dunia, telah berusaha untuk merenungkan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam, untuk menghormati yang tidak diketahui dan misterius, dan untuk terhubung dengan sesuatu yang spiritual dan abadi di luar dunia dan kehidupan material sementara di sini. Pencarian makna yang lebih dalam ini menghubungkan semua manusia.<sup>49</sup>

Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan di atas, maka segala gagasan mesti dibarengi dengan langkah-langkah praktis tentang bagaimana para pemeluk agama dari berbagai tradisi yang berbeda saling berkolaborasi dalam sebuah wadah. Salah satu hal yang dilakukan dalam rangka tujuan tersebut adalah pelatihan antar pemeluk agama. Berikut ini adalah gambarannya: Selama pelatihan antar pemeluk agama berlangsung, para peserta berbagi pengalaman mereka tentang pendekatan konflik dari perspektif agama dan bagaimana hal itu membantu mereka menjangkau rekan-rekan mereka. Dengan membingkai informasi dalam konteks agama dan memperoleh alat dan sumber referensi dari narasi agama, para peserta dimungkinkan untuk mendapatkan akses dan meningkatkan potensi dampak mereka pada para pihak. Dalam konteks intervensi antaragama, peristiwa sederhana yang terjadi dalam interaksi sehari-hari digunakan untuk membangun

---

<sup>49</sup> L. Groff, "Intercultural Communication, Interreligious Dialogue, and Peace," *Futures* 34 (2002): 710.

perdamaian. Misalnya, tindakan orang Yahudi membawa kursi agar orang Muslim bisa duduk dianggap sebagai isyarat rekonsiliasi dari Yudaisme ke Islam. Lokakarya pelatihan khusus untuk pembangunan perdamaian antaragama, yang berfokus pada seperangkat keterampilan dan konsep tertentu, merupakan alat yang lebih efektif untuk intervensi penegakan perdamaian dalam konteks antaragama dibandingkan dengan intervensi tipikal yang tidak mengakui keunikan konflik antaragama.

Tujuan pelatihan untuk penegakan perdamaian antaragama, seperti dalam resolusi konflik dan intervensi antarbudaya pada umumnya, adalah untuk memfasilitasi perubahan dari sikap dan perspektif peserta yang sempit, eksklusif, antagonis, atau berprasangka ke sikap yang lebih toleran dan berpikiran terbuka. Pelatih juga ingin memotivasi dan memberdayakan mereka yang memiliki sikap toleran untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan yang mempromosikan penyelesaian konflik secara damai. Ada beberapa langkah yang bisa dilalui untuk perubahan sikap, yaitu: Pertama, mencairkan sikap dan persepsi negative; Kedua, merumuskan kembali sikap baru berdasarkan informasi dan pengalaman baru; Ketiga, menegaskan sikap yang baru diperoleh melalui pengalaman dan tindakan positif. Pendekatan semacam ini telah menjadi pusat dari sebagian besar intervensi resolusi konflik.<sup>50</sup>

Selain hal diatas, terdapat pula hipotesis kontak yang merupakan pendekatan lain yang menjelaskan kondisi yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan sikap pada individu dan kelompok. Proses intervensi ini berguna untuk membantu peserta dalam kelompok pertemuan antar agama mengubah sikap dan persepsi mereka. Persepsi dan sikap individu berubah ketika mereka berinteraksi dengan atau mengalami latar budaya yang berbeda. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pengaturan pelatihan: Pertama, bagaimana faktor

---

<sup>50</sup> Mohammed Abu-Nimer, "Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding," *Journal of Peace Research* 38, no. 6 (2001): 686.

kognitif, afektif atau emosional, dan perilaku dapat mengubah sikap individu dalam pengaturan pelatihan; Kedua, seberapa efektif untuk menangani peserta sebagai individu atau sebagai perwakilan dari komunitas kolektif mereka; Ketiga, seberapa efektif pengalaman belajar yang sedang berlangsung dibandingkan dengan pembelajaran instrumental, yang didasarkan pada informasi dan pengetahuan baru atau tugas yang harus diselesaikan. Ketiga faktor tersebut mesti dipertimbangkan dalam merancang pelatihan penegakan perdamaian antar pemeluk agama dan mesti pula membahas peran dan dampak spiritualitas dan moralitas dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada perubahan sikap peserta.

Dalam pelatihan semacam ini, keterampilan dan strategi dapat disesuaikan dengan konteks peserta, meskipun asumsi dasar dari proses pelatihan adalah bahwa agama sebagaimana budaya berperan aktif dalam eskalasi dan deeskalasi konflik karena mempengaruhi masalah, pihak, strategi, hasil, dan intervensi. Tujuan pelatihan penegakan perdamaian antar pemeluk agama merupakan fungsi dari peserta dan harapan mereka. Dengan demikian, pelatihan semacam ini mencakup hal-hal berikut: Pertama, menggali beragam peran yang dilakukan oleh para aktor agama serta nilai-nilai dan asumsi yang mendasari yang membentuk metodologi pembangunan perdamaian; Kedua, mengembangkan kesadaran akan aspek konstruktif dan destruktif agama dan konflik serta bagaimana hal itu membatasi interaksi antaragama; Ketiga, mengkaji bagaimana kerjasama antaragama dapat menyelesaikan konflik; Keempat, mendorong peserta untuk mengevaluasi bagaimana agama telah membantu membangun pandangan dunia mereka dan bagaimana agama membentuk sistem nilai mereka.

Terdapat beberapa model dalam dialog antar pemeluk agama sebagaimana digambarkan di atas. Diantaranya adalah bahwa peserta memahami diri mereka terlibat dalam pencarian kebenaran. Semua pihak sedang dalam pencarian untuk sesuatu yang penting bagi perkembangan peradaban manusia. Setiap peserta berpikir bahwa

dirinya secara umum berorientasi ke arah yang benar dan yang lain, dalam beberapa hal, kurang berorientasi dengan baik. Bagaimanapun, ia menyadari bahwa ia bisa saja salah. Akibatnya ia menahan diri untuk tidak mengklaim kelengkapan kebenaran, seolah-olah hal tersebut adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang atau oleh sebuah tradisi, sembari ia berharap peserta lain akan bergabung dengannya untuk melakukannya. Terlepas dari beberapa kekuatan nyata dari model ini, setidaknya ada dua kesulitan dalam mengadopsinya untuk dialog antaragama.

Salah satunya adalah bahwa adanya asumsi telah mengetahui kebenaran, tetapi telah melupakannya. Pencarian kebenaran menjadi latihan untuk saling mengingat. Seseorang merangsang orang lain untuk mengingat bagian dari keseluruhan dan mereka melakukan hal yang sama untuk dirinya. Meskipun kebenaran dipahami secara berbeda di antara tradisi-tradisi Ibrahimi, dorongan utama dari tradisi-tradisi tersebut adalah untuk melihat wahyu dan pelaksanaannya sepenuhnya terbentang di depan, bukan di belakang. Hal tersebut mesti ditemukan, mungkin dalam dialog. Kesulitan lain dengan menggunakan model ini adalah asumsi bahwa salah satu peserta atau pihak dapat memainkan peran pengendali jalannya percakapan. Dialog antaragama harus jauh lebih demokratis dari hal tersebut. Ada kemungkinan bahwa masing-masing peserta secara masuk akal berasumsi bahwa dirinya lebih hampir benar daripada peserta yang lain, tetapi tidak ada yang boleh menganggap hal itu sebagai lisensi untuk mendikte pihak yang lain tentang topik apa yang akan dibahas, bentuk dialog apa yang harus diambil, dan apa yang seharusnya merupakan hasil yang tepat. Hal-hal ini harus diserahkan kepada peserta sendiri.

Model kedua untuk menafsirkan dialog antaragama adalah persahabatan. Manfaat dari pendekatan ini dirasa sangat besar. Gagasan persahabatan adalah sebagai dukungan lebih lanjut dari kebutuhan seseorang terhadap orang lain dalam mencari kebenaran. Persahabatan tidaklah menghalangi ketidaksepakatan. Tanpa hal tersebut, pencarian bersama rekan-rekan yang lain untuk kebenaran

lebih mungkin terhambat oleh kesalahan.<sup>51</sup> Karena itulah, kejujuran berbicara adalah ujian penting untuk membedakan antara teman sejati dan yang hanya menyanjung saja. Maka perselisihan tentang hal-hal yang menjadi perhatian mendasar bagi rekan sejawat tidak serta merta menghancurkan persahabatan. Para rekan tersebut memberikan cek terhadap kecenderungan seseorang untuk menipu diri sendiri dan memberikan sumber wawasan yang berada di luar cakrawala langsung dirinya. Dengan demikian, memahami dialog antaragama dalam hal pertukaran antar teman menawarkan alternatif. Secara bersama-sama, argumen-argumen yang muncul menjadi alasan yang menarik bagi kebijaksanaan untuk memahami peserta dialog antaragama sebagai teman yang tetap benar-benar berbeda. Masing-masing berjalan di sepanjang berbagai jalan menuju kebenaran yang sering bersinggungan, terkadang paralel, terkadang pula bertemu.

Kekurangan dari model di atas adalah bahwa dengan menerapkannya sebagai model dialog antaragama, seseorang tidak bisa berharap untuk berteman dengan semua mitra dialog. Persahabatan memang sesuatu yang ajaib. Hal ini juga melibatkan beberapa perasaan suka terhadap yang lain yang dapat dibedakan dari rasa hormat terhadap mereka. Mengingat hal itu, sulit untuk melihat bagaimana seseorang dapat mengatakan bahwa hanya temanlah yang dapat memberikan penilaian jujur yang diperlukan untuk mencegah seseorang tersesat. Karena itulah, mungkin lebih bijak untuk menyatakah bahwa dialog antaragama adalah kesempatan untuk mengembangkan persahabatan. Karena seseorang akan lebih siap menerima kritik keras dari teman, maka ia hendaknya mencari mereka dalam pertemuan seperti itu. Namun seseorang perlu pula menemukan cara untuk tetap terbuka terhadap kritik dari mereka yang dianggap menjengkelkan dan kasar. Di situlah model ketiga mungkin menawarkan beberapa panduan.

---

<sup>51</sup> David B. Burrell, *Friendship and Ways to Truth* (Indiana: University of Notre Dame Press, 2000), 5.

Model yang ketiga adalah dialog antaragama dalam garis pertemuan saudara kandung. Seseorang mestilah terikat pada saudara, terlepas suka atau tidak. Seseorang terkadang mencintai saudara, terlepas dari cara dia menganggap mereka menjengkelkan atau salah. Seringkali saudara justru melihat hal-hal yang tidak pantas tentang seseorang yang lebih suka ia abaikan. Dalam situasi terbaik, ikatan antara saudara dapat mencakup persahabatan dengan hubungan yang lebih komprehensif. Jika seseorang tidak merawatnya dengan penuh kasih, kemungkinan hal tersebut akan menghantui dirinya dengan kenangan tentang masa-masa yang lebih baik dan kesempatan-kesempatan yang tidak terpenuhi. Meskipun tidak semua anggota agama-agama besar dunia akan setuju, tetapi setidaknya Yahudi, Kristen, dan Muslim bersama dalam memahami manusia sebagai makhluk Tuhan, tidak peduli apakah mereka termasuk dalam tradisi agamanya sendiri atau tidak. Dalam banyak hal, terkadang saudara tidak setuju tentang karakter dan kehendak orang tua mereka. Dikarenakan masing-masing tradisi ini memahami Tuhan secara berbeda, maka menafsirkan ikatan bersama dalam hal hubungan saudara tidak akan menghilangkan ketidaksepakatan.

Apapun model dialog agama yang telah dinyatakan di atas, tampak bahwa keberatan yang dapat dikemukakan adalah bahwa percakapan yang dibayangkan bisa jadi merupakan bentuk-bentuk missionari atau dakwah yang terselubung. Titik permasalahannya adalah bahwa pihak-pihak yang dipaksa untuk mendengarkan tidak berpartisipasi dalam pertukaran ide yang tulus.<sup>52</sup> Missionari atau dakwah bukanlah percakapan diantara sesama pejalan atau musafir, tetapi merupakan kegiatan monolog. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, diantara adalah kemenangan dan superioritas. Karena itulah, kemungkinan yang bijak adalah bahwa mereka yang terlibat dalam dialog mestilah konsisten dengan tradisi dan keyakinan agama mereka sendiri, dan terbuka untuk saling memahami tanpa mempertahankan pikiran

---

<sup>52</sup> Jay Newman, *Foundation of Religious Tolerance* (Toronto: University of Toronto Press, 1982), 104.



tertutup, tetapi dengan kejujuran dan kerendahan hati bahwa dialog dapat memperkaya setiap pihak. Demi mendorong hal tersebut, kiranya perlu mengingat kembali setidaknya tiga kebajikan yang dihargai oleh semua anggota tradisi Ibrahim. Ketiga hal tersebut adalah kejujuran (*honesty*), empati (*empathy*), dan kerendahan hati (*humility*).

Kebajikan pertama dan mungkin paling jelas yang harus dilakukan oleh para peserta dialog antaragama adalah kejujuran (*honesty*). Meskipun demikian, ternyata istilah ini mengandung masalah, yaitu bahwa kata tersebut memiliki arti yang beragam. Dalam sumber-sumber alkitabiah dan rabi, kata Ibrani *emet* berkonotasi ketulusan, kejujuran, kesetiaan pada kata dan komitmen seseorang, dan integritas. Biasanya diterjemahkan sebagai kejujuran. Dalam Perjanjian Baru, jangkauan semantik dari *aletheia* termasuk mengatakan kebenaran, meskipun kata jujur biasanya dirujuk dalam terjemahan bahasa Inggris untuk *kalos*, yang berarti hati yang baik atau setia. Bersikap tulus, tanpa kemunafikan (*anypokeritos*) juga dipuji. Dalam Al-Qur'an, akar kata bahasa Arab *sidq* mencakup kejujuran dan kesetiaan pada kata atau komitmen seseorang.<sup>53</sup> Dengan begitu beragamnya makna kejujuran, maka seseorang tidak perlu memilih satu di antara rentang makna ini sebagai sesuatu yang lebih disukai. Mereka yang berpartisipasi dalam dialog antaragama jelas harus mempraktikkan semuanya. Seseorang harus dapat mempercayai apa yang dikatakan orang lain kepada dirinya dan percaya bahwa semuanya akan berbagi dan tidak akan melanggar komitmen bersama untuk mencari kebenaran. Hal ini pasti akan melibatkan evaluasi kritis dari keyakinan dan praktik lawan dialog berdasarkan norma-norma internal tradisi seseorang. Karena itulah, penting untuk bersikap tidak setuju tanpa meremehkan atau sombong, dan bahwa penting untuk menyatakan ketidaksetujuan untuk membantu masing-masing lebih mengenal atau lebih terbuka terhadap kebenaran. Dalam situasi yang demikian, sang kritikus harus bersedia pula merevisi penilaiannya jika terbukti didasarkan pada

---

<sup>53</sup> Toshihiko Izutzu, *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an* (Montreal: McGill University Press, 1966), 97.

kesalahpahaman. Jika kritikus tidak salah paham, maka dia harus cukup jujur pada dirinya sendiri dan cukup benar pada keyakinannya untuk tetap menentang ide dan praktik yang melanggar norma tradisinya.

Kebajikan kedua yang harus dikembangkan adalah empati (*empathy*). Yang dimaksud dengan empati adalah identifikasi imajinatif terhadap situasi eksistensial orang lain. Hal ini merupakan keterampilan afektif dan intelektual. Kebajikan ini memungkinkan seseorang untuk mengenali dan mencoba memenuhi kebutuhan orang lain. Karena itulah, ia mirip dengan welas asih, yang pentingnya diakui oleh ketiga tradisi Ibrahim. Semakin baik seseorang memahami dan berempati dengan masalah tertentu yang diidentifikasi oleh mitra dialog, maka semakin besar kemungkinan dia akan menghargai kesesuaian dan kepastian solusi tradisi mitra. Hal ini membutuhkan fleksibilitas intelektual yang cukup untuk membayangkan mode wacana dan norma yang cukup asing dalam rangka evaluasi.

Keutamaan ketiga yang akan membantu para peserta dalam dialog antaragama mempertahankan ikatan kebersamaan adalah kerendahan hati (*humility*). Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa orang yang benar-benar rendah hati mengakui ketergantungan radikal mereka pada Tuhan dan dengan jujur menilai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Hal ini membuat mereka relatif lebih bebas dari penipuan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, dan kesombongan yang berlebihan, dan dari tindakan cinta kasih terhadap orang lain. Ketiga tradisi abrahamik menganggap kebajikan ini sebagai yang terpenting. Kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama menuntut seseorang untuk mengakui keterbatasan dirinya sendiri. Kerendahan hati bukanlah pembenaran untuk sifat takut. Ia adalah penangkal kesombongan.

## 2. Deklarasi Perdamaian Antar Pemeluk Agama

Dialog antar pemeluk agama telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai tempat di seluruh dunia. Beberapa dialog tersebut bersifat lokal dan regional, tidak sedikit pula yang menjangkau cakupan

nasional bahkan internasional. Hasil yang didapatkan dari dialog antar pemeluk agama tersebut juga beragam, ada yang bersifat praktis pragmatis yang harus segera dilaksanakan dan diwujudkan dengan segera di lapangan, ada pula yang bersifat abstrak. Hal yang terakhir lebih bersifat mengikat dalam jangka panjang, dan merupakan seruan perdamaian kepada publik dan khalayak ramai. Salah satu hasil dialog antar pemeluk agama yang bersifat abstrak tersebut adalah deklarasi-deklarasi. Berbagai deklarasi perdamaian telah banyak dibuat. Kedudukannya memang tidak sekuat kitab suci yang mengikat para pemeluk masing-masing tradisi. Tetapi setidaknya deklarasi-deklarasi tersebut adalah dokumen kemanusiaan yang penting bagi terwujudnya perdamaian di seluruh belahan dunia. Sebagai sebuah dokumen kemanusiaan, maka ia adalah warisan bagi peradaban manusia selamanya yang tercetus dari para pemeluk agama-agama dunia.

- a) KTT Perdamaian Dunia Millennium Pemimpin Agama dan Spiritual

**KTT PERDAMAIAN DUNIA MILLENNIUM PEMIMPIN  
AGAMA DAN SPIRITUAL  
Komitmen untuk Perdamaian Global**

Kemanusiaan berada pada titik kritis dalam sejarah, yang membutuhkan kepemimpinan moral dan spiritual yang kuat untuk membantu menetapkan arah baru bagi masyarakat. Kami, sebagai pemimpin agama dan spiritual, mengakui tanggung jawab khusus kami untuk kesejahteraan keluarga manusia dan perdamaian di bumi.

*Bahwa* Perserikatan Bangsa-Bangsa dan agama-agama di dunia memiliki kepedulian yang sama terhadap martabat manusia, keadilan dan perdamaian;

*Babwa* kami menerima bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam segala aspek kehidupan dan anak-anak adalah harapan masa depan;

*Babwa* agama telah berkontribusi pada perdamaian dunia tetapi juga telah digunakan untuk menciptakan perpecahan dan menyulut permusuhan;

*Babwa* dunia kita diliputi oleh kekerasan, perang dan perusakan, yang terkadang dilakukan atas nama agama;

*Babwa* konflik bersenjata adalah tragedi mengerikan bagi kehidupan manusia yang hancur dan hilang, bagi dunia kehidupan yang lebih besar, dan bagi masa depan tradisi agama dan spiritual kita;

*Babwa* tidak ada individu, kelompok atau bangsa yang dapat lagi hidup sebagai mikrokosmos yang terisolasi di dunia kita yang saling bergantung, melainkan semua harus menyadari bahwa setiap tindakan kita berdampak pada orang lain dan komunitas global yang muncul;

*Babwa* dalam perdamaian dunia yang saling bergantung membutuhkan kesepakatan tentang nilai-nilai etika yang mendasar;

*Babwa* tidak akan ada perdamaian sejati sampai semua kelompok dan komunitas mengakui keragaman budaya dan agama keluarga manusia dalam semangat saling menghormati dan memahami;

*Babwa* membangun perdamaian memerlukan sikap penghormatan terhadap kehidupan, kebebasan dan keadilan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang;

*Bahwa* budaya damai yang sejati harus dibangun di atas penanaman dimensi kedamaian batin, yang merupakan warisan tradisi agama dan spiritual;

*Bahwa* tradisi agama dan spiritual merupakan sumber inti terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi keluarga manusia dan seluruh kehidupan di Bumi.

Mengingat hal-hal di atas, dan dengan maksud untuk melaksanakan tugas kita terhadap keluarga manusia, kami menyatakan komitmen dan tekad kami:

1. Untuk berkolaborasi dengan PBB dan semua pria dan wanita yang berkehendak baik secara lokal, regional dan global dalam mengejar perdamaian di semua dimensinya;
2. Memimpin umat manusia melalui perkataan dan perbuatan dalam komitmen yang diperbarui terhadap nilai-nilai etika dan spiritual, yang mencakup rasa hormat yang mendalam terhadap semua kehidupan dan terhadap martabat yang melekat pada setiap orang dan hak untuk hidup di dunia yang bebas dari kekerasan;
3. Mengelola dan menyelesaikan tanpa kekerasan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan agama dan etnis, dan mengutuk semua kekerasan yang dilakukan atas nama agama sambil berusaha menghilangkan akar kekerasan;
4. Menyerukan kepada semua komunitas agama dan kelompok etnis dan nasional untuk menghormati hak atas kebebasan beragama, untuk mencari rekonsiliasi, dan untuk terlibat dalam saling memaafkan dan penyembuhan;
5. Untuk membangkitkan dalam semua individu dan komunitas rasa tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan keluarga manusia secara keseluruhan dan pengakuan bahwa semua manusia tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin dan asal etnis memiliki hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan untuk mencapai penghidupan yang aman dan berkelanjutan;

6. Untuk mempromosikan distribusi kekayaan yang adil di dalam negara dan di antara negara-negara, memberantas kemiskinan dan membalikkan tren saat ini menuju kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin;
7. Untuk mendidik masyarakat kita tentang kebutuhan mendesak untuk merawat sistem ekologi bumi dan semua bentuk kehidupan dan untuk mendukung upaya untuk menjadikan perlindungan dan pemulihan lingkungan sebagai bagian integral dari semua perencanaan dan kegiatan pembangunan;
8. Untuk mengembangkan dan mempromosikan kampanye reboisasi global sebagai sarana nyata dan praktis untuk restorasi lingkungan, mengajak orang lain untuk bergabung dengan kami dalam program penanaman pohon regional;
9. Untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam seruan agar semua negara bangsa bekerja untuk penghapusan universal senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya demi keselamatan dan keamanan kehidupan di planet ini;
10. Memerangi praktik komersial dan penerapan teknologi yang merusak lingkungan dan kualitas hidup manusia;
11. Untuk mempraktekkan dan mempromosikan dalam komunitas kita nilai-nilai dimensi batin perdamaian, termasuk khususnya belajar, berdoa, meditasi, rasa kesucian, kerendahan hati, cinta, kasih sayang, toleransi dan semangat pelayanan, yang mendasar bagi penciptaan masyarakat yang damai.

Kami, sebagai pemimpin agama dan spiritual, berjanji komitmen kami untuk bekerja sama untuk mempromosikan kondisi dalam dan luar yang mendorong perdamaian dan manajemen non-kekerasan dan resolusi konflik. Kami mengimbau para pengikut semua tradisi agama dan komunitas manusia secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat yang damai, untuk mencari saling pengertian melalui dialog di mana ada perbedaan, untuk menahan diri dari

kekerasan, untuk mempraktikkan kasih sayang, dan untuk menjunjung tinggi martabat semua hidup.

Bawa Jain, Sekretaris Jenderal KTT Perdamaian Dunia Milenium Para Pemimpin Agama dan Spiritual

- b) *Charter World Council of Religious Leaders: An outcome of the Millennium World Peace Summit* (Piagam Dewan Pemimpin Agama Dunia: Hasil dari KTT Perdamaian Dunia Milenium)

**PIAGAM DEWAN PEMIMPIN AGAMA DUNIA:  
HASIL DARI KTT PERDAMAIAN DUNIA MILENIUM**

Bangkok, Thailand, Juni 2002

**BAB 1  
PEMBUKAAN**

Sebagai pemimpin agama dan spiritual dunia yang membentuk Dewan Pemimpin Agama Dunia, kami percaya bahwa agama dapat berfungsi sebagai kekuatan positif untuk mencapai perdamaian dunia, bahwa konflik antar kelompok agama dan spiritual dapat dihindari, dan bahwa kerukunan di antara mereka harus secara konsisten dipromosikan melalui diskusi dan dialog aktif. Kami mengakui bahwa sejarah umat manusia penuh dengan konflik – bahkan konflik kekerasan – yang mungkin dapat dihindari jika ada badan untuk mempromosikan saling pengertian dan rasa hormat yang sama di antara semua agama. Oleh karena itu, kami percaya bahwa adalah tanggung jawab kami untuk bekerja sama menghilangkan semua penyebab ketegangan di antara komunitas kami. Kami percaya kami memiliki kemauan dan keberanian untuk memimpin pengikut mereka untuk menerima perbedaan, untuk menjaga harga diri, dan untuk hidup dalam harmoni dengan komunitas yang beragam di dunia dan dengan umat manusia pada umumnya.

DENGAN TUJUAN INI, Dewan Pemimpin Agama Dunia dibentuk sebagai badan independen yang tersedia sebagai sumber daya, untuk bekerja sama dan bekerja sama dengan, dan untuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional dan nasional lainnya yang didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian dunia, kerukunan, toleransi, saling menghormati antar manusia, serta keadilan sosial dan ekonomi.

Tindakan pertama Dewan Dunia adalah:

- a) Menegaskan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- b) Menegaskan kembali komitmen terhadap Perdamaian Global yang ditandatangani oleh para pemimpin agama dan spiritual yang menghadiri Millennium World Peace Summit of Religious di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 2000.
- c) Menegaskan bahwa kita akan bekerja bersama untuk mempromosikan nilai-nilai dan praktik spiritual di seluruh dunia.

## BAB 2 MISI

Dewan Pemimpin Agama Dunia bertujuan untuk menjadi model dan panduan bagi penciptaan komunitas agama-agama dunia. Dalam semangat pelayanan dan kerendahan hati, ia berusaha untuk menginspirasi perempuan dan laki-laki dari semua agama dalam mengejar perdamaian, keadilan dan saling pengertian. Ini akan melakukan inisiatif untuk menyediakan sumber daya spiritual dari tradisi agama dunia untuk membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya dalam pencegahan, resolusi dan penyembuhan konflik dan dalam pemberantasan penyebab mereka dan dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan mempromosikan praktik nilai-nilai spiritual yang dimiliki oleh semua tradisi agama, dan dengan menyatukan komunitas manusia untuk waktu doa dan meditasi dunia, Dewan Dunia berusaha membantu dalam mengembangkan



kualitas batin dan kondisi eksternal yang diperlukan untuk penciptaan lingkungan yang lebih damai. , masyarakat dunia yang adil dan berkelanjutan.

### BAB 3 STRUKTUR

#### Pasal 3.1

Dengan maksud untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan dalam Pembukaan, Dewan Dunia akan membentuk struktur tiga tingkat seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Dewan Pemimpin Agama Dunia akan bermarkas di New York City, AS.
2. Dewan Pemimpin Agama Regional akan ditempatkan di samping kantor regional PBB. Mereka akan bekerja dengan para pemimpin agama terkemuka dan membangun jaringan dan badan keagamaan di daerah mereka.
3. Dewan Nasional Pemimpin Agama akan berkedudukan di setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masing-masing dewan ini akan otonom tetapi akan dihubungkan dengan Dewan Dunia.

Menyadari bahwa banyak kemajuan telah dicapai di bidang antaragama, Dewan Dunia akan bekerja dengan organisasi dan jaringan yang mapan dalam mendirikan struktur ini.

#### Pasal 3.2

Dewan Dunia akan terdiri dari para pemimpin agama dan spiritual terkemuka dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini akan memandu komposisi dan kegiatan Dewan Regional dan Nasional. Dewan Dunia akan menunjuk ketua bersama dari agama-agama tradisional serta tradisi-tradisi pribumi. Pengangkatan ketua bersama harus mempertimbangkan perwakilan agama dan distribusi geografis serta kesetaraan gender. Dewan Pemimpin Agama Dunia berkembang dari Millennium World Peace Summit, yang terdaftar di New York City

sebagai organisasi nirlaba 501c3. Dewan Dunia berkembang melalui konsultasi ekstensif yang dihadiri peserta KTT. Dengan demikian Dewan Dunia akan memelihara Sekretariat KTT Perdamaian Dunia Milenium, yang dikelola oleh seorang Sekretaris Jenderal dan ditugasi dengan tugas-tugas organisasi Dewan Dunia. Dewan Dunia akan menunjuk dua ketua bersama dari masing-masing dari lima agama besar serta tradisi pribumi, dengan total 12 ketua bersama. Co-chair akan mempertahankan posisi ini untuk jangka waktu dua tahun. Kelompok ini akan mengangkat seorang Ketua, secara bergilir menurut agama-agama, juga untuk masa jabatan dua tahun. Ketua dan ketua bersama, bersama dengan Sekretaris Jenderal, akan membentuk Komite Eksekutif dan akan membantu menetapkan kebijakan dan arahan Dewan secara keseluruhan. Komite Eksekutif akan memandu strategi dan tindakan Dewan. Pada saat krisis dunia atau regional, anggota Komite Eksekutif dapat menjadi juru bicara. Ketua sementara Komite Pengarah akan menjadi dewan Dewan Dunia untuk mengawasi jalannya dan administrasi Dewan Dunia. Dewan KTT Perdamaian Dunia Milenium saat ini akan dilipat menjadi dewan baru ini. Dewan ini akan berusaha untuk berkembang dengan induksi para pemimpin bisnis, politik dan agama. Dewan Pemimpin Agama Dunia akan mengembangkan anggaran rumah tangga dan konstitusinya sendiri, menggabungkan peraturan yang ada untuk KTT Perdamaian Dunia Milenium.

### Pasal 3.3

Dewan Regional akan terdiri dari para pemimpin terkemuka yang dicalonkan oleh Dewan Nasional. Mereka masing-masing akan memiliki co-presiden dan sekretaris, yang akan bekerja sama dengan Sekretariat di New York. Para copresident akan dinominasikan untuk masa jabatan dua tahun secara bergilir.

#### Pasal 3.4

Dewan Nasional akan terdiri dari para pemimpin agama dan spiritual di dalam negara. Dewan Nasional masing-masing akan memiliki seorang presiden dan seorang sekretaris, yang akan memiliki masa jabatan dua tahun secara bergilir.

#### Pasal 3.5

Dewan Dunia akan membentuk berbagai gugus tugas dan komisi untuk menangani isu-isu spesifik, dengan para sarjana dan ahli di bidangnya. Dengan demikian komisi ini dapat:

- a) Bertindak sebagai forum untuk membahas peristiwa dan area potensi ketegangan dan konflik agama di dunia;
- b) Mempertimbangkan dan mendengar perselisihan dan hal-hal yang berkaitan dengan agama apa pun;
- c) Mendengar perselisihan mengenai pelanggaran Piagam; dan
- d) Mengusulkan rekomendasi kepada Dewan Dunia mengenai setiap tindakan yang diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Internasional atau Nasional.

### BAB 4 KEANGGOTAAN

#### Pasal 4.1

Dewan Dunia berusaha untuk memasukkan perwakilan terkemuka dari tradisi agama utama, serta individu-individu luar biasa dengan status spiritual yang diakui. Ini akan berusaha untuk mengembangkan perwakilan yang seimbang di antara agama-agama karena tujuan utamanya adalah untuk membentuk badan yang kuat dari para pemimpin agama terkemuka yang dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah dunia yang kritis dalam konser dengan PBB, keterampilan dalam dialog antaragama diperlukan.

Jadi keanggotaan adalah dengan undangan. Rekomendasi dapat disampaikan kepada ketua bersama dan dewan. Dewan akan berusaha

mengembangkan perwakilan yang seimbang di antara agama-agama. Untuk membantu mencapai tujuan ini, ia juga akan berusaha untuk mengembangkan dewan dari setiap tradisi agama utama.

#### Pasal 4.2

Penerimaan anggota akan dipengaruhi oleh keputusan Dewan Dunia atas rekomendasi bersama Dewan Regional dan Dewan Nasional.

#### Pasal 4.3

Dewan Pemimpin Agama Dunia akan bertemu setidaknya setahun sekali. Ketua atau orang-orang untuk setiap pertemuan akan dipilih oleh Komite Eksekutif Dewan Dunia. Gugus tugas khusus atau komisi Dewan dapat bertemu lebih teratur. Setiap sepuluh tahun, Dewan akan mengadakan KTT Dunia, serupa dengan KTT Perdamaian Dunia Milenium Para Pemimpin Agama dan Spiritual di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 2000. KTT ini akan mencakup tinjauan sepuluh tahun kegiatannya.

Akan ada Majelis Dewan Daerah dan Dewan Nasional setiap lima tahun sekali. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Dewan Nasional di masing-masing daerah akan berkumpul untuk meninjau isu-isu kebijakan tentang kerukunan dan perdamaian umat beragama di setiap daerah, mengevaluasi tujuan lima tahun terakhir dan menetapkan tujuan lima tahun ke depan. Dewan Regional dan Nasional akan bertemu setidaknya setahun sekali atau lebih jika dianggap cocok.

## BAB 5 FUNGSI

#### Pasal 5.1

Dewan Dunia akan diberikan fungsi dan wewenang berikut untuk:

- a) Mempromosikan kerukunan beragama dan spiritual.
- b) Mencegah dan menyelesaikan ketegangan dan potensi konflik yang berkaitan dengan agama dan budaya.

- c) Mempromosikan rasa hormat terhadap perempuan dan anak-anak dan merawat yang rentan dalam masyarakat.
- d) Bekerja untuk mempromosikan aktif saling menghormati dan pelestarian keragaman agama.
- e) Mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikan konflik, mempromosikan rekonsiliasi dan mendorong penyembuhan di wilayah konflik.
- f) Mencari metode untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan nilai-nilai berbagi dan kasih sayang dalam upaya membantu PBB mencapai tujuan pengurangan kemiskinan.
- g) Mempromosikan Etika Lingkungan untuk membantu membalikkan degradasi lingkungan, untuk memobilisasi komunitas iman di sekitar keberlanjutan, konservasi dan penghormatan terhadap semua kehidupan.

#### Pasal 5.2

Untuk mencapai tujuan ini, Dewan Dunia akan:

- a) Membantu pembentukan kebijakan di tingkat regional, nasional, dan global.
- b) Membentuk sub-komite tentang topik-topik seperti resolusi konflik, isu-isu lingkungan yang penting secara lokal dan global, pencegahan kejahatan, pencegahan terorisme, dan kesetaraan gender.
- c) Membuat forum untuk debat dan dialog tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama apa pun.

#### Pasal 5.3

Dewan Dunia akan bekerja untuk menjalin hubungan aktif dengan:

- a) Badan-badan internasional seperti PBB dan Bank Dunia.
- b) Organisasi kemanusiaan internasional yang bekerja menuju keadilan sosial dan perdamaian.
- c) Pemerintah dan badan Pemerintah bereputasi internasional bekerja menuju harmoni.

- d) Organisasi non-pemerintah bereputasi internasional yang bekerja di wilayah tertentu untuk perdamaian dan keadilan sosial.
- e) Asosiasi bisnis dan profesional bereputasi internasional yang bekerja menuju perdamaian.
- f) Pemimpin buruh dan serikat buruh.

## BAB 6

### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERUBAHANNYA

#### Pasal 6.1

Semua keputusan Dewan Dunia akan mulai berlaku ketika mereka telah diadopsi oleh dua pertiga suara mayoritas. Dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh Dewan Dunia, komite eksekutif Dewan akan dapat bertindak dalam menanggapi krisis regional atau global tanpa harus menunggu pemungutan suara.

#### Pasal 6.2

Piagam ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang luas untuk pembentukan dan berfungsinya Dewan Dunia. Karena fungsi dan peran Dewan Dunia berkembang dari waktu ke waktu, Piagam ini dapat diubah atau diamandemen dengan tepat. Setiap perubahan pada Piagam ini harus direkomendasikan oleh dua pertiga dan diratifikasi dengan cara yang sama.

Selama setiap pertemuan Dewan, keputusan akan dibuat tentang waktu dan lokasi pertemuan berikutnya. Sekretariat akan bertanggung jawab untuk mengatur logistik setiap pertemuan, bekerja sama dengan tuan rumah lokal.

## BAB 7

### KOMUNIKASI

Kontak triwulanan akan dilakukan dengan semua anggota Dewan oleh Sekretariat untuk memperbarui mereka pada permintaan inisiatif dan

kegiatan anggota Dewan. Sebuah laporan tahunan akan diproduksi menjelaskan semua hasil Dewan untuk tahun itu.

Pada saat ketegangan atau konflik dunia meningkat, Sekretariat akan berkonsultasi dengan ketua bersama Dewan untuk mengeluarkan pernyataan atas nama Dewan untuk tujuan mengurangi situasi krisis. Pernyataan-pernyataan ini, yang kemudian akan dikeluarkan ke publik, akan murni untuk tujuan kemanusiaan, bukan politik.

## BAB 8 PEMBIAYAAN

Anggota Dewan akan memberikan beberapa kontribusi keuangan kepada Dewan, baik melalui organisasi mereka atau melalui dukungan para pemimpin bisnis. Sebuah dewan bisnis akan dibentuk, terdiri dari para pemimpin bisnis yang berkomitmen kepada Dewan dan/atau para pemimpin agama individu di Dewan.

Sekretariat akan menetapkan anggaran dan rencana lima tahun untuk Dewan, yang akan mencakup mencari dukungan keuangan dari organisasi keagamaan, yayasan, perusahaan, dan individu.

- c) *Universal Declaration of Human Rights by the World's Religions* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Agama-Agama Dunia)

### **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA OLEH AGAMA-AGAMA DUNIA**

Bahwa manusia dituntun menuju suatu kehidupan yang memiliki lebih banyak kehidupan daripada kehidupan itu sendiri melalui ilham manusiawi dan ilahi;

Bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948 mendasarkan dirinya pada yang hal di atas;

Bahwa setiap pengecualian agama dunia sebagai sumber positif hak asasi manusia adalah bukti buruk bagi kehidupan sehari-hari;

Bahwa berbagai komunitas yang merupakan bangsa-bangsa di dunia harus bertukar tidak hanya ide tetapi juga cita-cita;

Bahwa agama idealnya mendorong manusia untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan tidak hanya dalam masyarakat manapun;

Bahwa seseorang tidak harus mengidealkan yang aktual tetapi berusaha untuk mewujudkan yang ideal;

Bahwa tidak memberikan kompensasi kepada korban imperialisme, rasisme, kastaisme, dan seksisme itu sendiri adalah imperialis, rasis, kastais, dan seksis;

Bahwa hak tidak tergantung pada kewajiban dalam perlindungannya tetapi secara integral terkait dengannya dalam konsepsi dan pelaksanaan;

Bahwa hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin perdamaian, kebebasan, persamaan dan keadilan - dan untuk mengurangi penyimpangan darinya - ketika hal-hal tersebut datang dalam konflik atau hak itu sendiri;

Oleh karena itu, sekarang, pada peringatan ke lima puluh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ulang tahun ke lima puluh berdirinya Fakultas Studi Keagamaan, di Universitas McGill, Montreal, Quebec, Kanada.



Para penandatangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Agama-agama Dunia ini, sebagaimana yang dilakukan oleh para pewaris warisan religius kemanusiaan dengan ini mengusulkan hal-hal berikut sebagai standar pencapaian bersama bagi para pemeluk semua agama atau bukan pemeluk, pada tanggal 10 Desember 1998, karena semua orang adalah saudara di muka bumi.

*Pasal 1*

Semua manusia berhak untuk diperlakukan sebagai manusia dan memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap orang sebagai manusia.

*Pasal 2*

Setiap orang berhak atas kebebasan dari kekerasan, dalam bentuk apapun, individu atau kolektif; baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kasta atau kelas, atau yang timbul dari sebab lain apa pun.

*Pasal 3*

1. Setiap orang berhak atas makanan.
2. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, panjang umur, dan layak huni, serta berhak atas makanan, pakaian, dan tempat berteduh untuk menopangnya.
3. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mendukung dan menopang kehidupan, umur panjang, dan kelayakan hidup semua.

*Pasal 4*

1. Tidak seorangpun boleh menjadi budak atau hamba, kerja paksa, kerja terikat atau pekerja anak. Perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuknya.
2. Tidak seorangpun akan menundukkan siapa pun pada perbudakan atau penghambaan dalam bentuk apa pun.

#### *Pasal 5*

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, baik secara fisik maupun mental, baik atas dasar sekuler atau agama, di dalam atau di luar rumah.
2. Tidak seorangpun boleh menundukkan siapapun pada perlakuan seperti itu.

#### *Pasal 6*

1. Setiap orang berhak atas pengakuan dimana pun sebagai pribadi di hadapan hukum; dan oleh semua orang dimana pun sebagai manusia yang pantas mendapatkan perlakuan manusiawi, bahkan ketika hukum dan ketertiban telah rusak.
2. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang lain sebagai manusia baik di mata hukum maupun di mata sendiri.

2

#### *Pasal 7*

Semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apa pun atas dasar ras, agama, kasta, kelas, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Merupakan hak setiap orang untuk diperlakukan demikian dan kewajiban setiap orang untuk memperlakukan orang lain demikian.

#### *Pasal 8*

Setiap orang memiliki kewajiban untuk mencegah berlanjutnya kesalahan sejarah, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

#### *Pasal 9*

1. Tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang oleh negara atau siapapun. Upaya untuk menarik masuk pada agama yang bertentangan dengan keinginan orang tersebut sama dengan penahanan sewenang-wenang, begitu

juga penahanan terhadap anak-anak remaja oleh orang tua, dan di antara pasangan yang bertentangan dengan keinginan mereka.

2. Merupakan tugas setiap orang untuk menjamin kebebasan setiap orang.

#### *Pasal 10*

Setiap orang berhak atas pengadilan publik dalam menghadapi tuntutan pidana dan merupakan kewajiban negara untuk memastikannya. Setiap orang yang tidak bisa menjadi pengacara harus disediakan oleh negara.

#### *Pasal 11*

Setiap orang yang dituntut dengan pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

#### *Pasal 12*

1. Setiap orang berhak atas privasi. Hak ini termasuk hak untuk tidak mengalami gangguan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang; milik sendiri, atau keluarga, rumah, atau korespondensi seseorang.
2. Setiap orang berhak atas nama baik seseorang.
3. Merupakan kewajiban setiap orang untuk melindungi privasi dan nama baik setiap orang.
4. Setiap orang berhak agar agamanya tidak direndahkan di media atau akademik.
5. Menjadi kewajiban para pengikut setiap agama untuk memastikan bahwa tidak ada agama yang direndahkan di media atau akademik.

#### *Pasal 13*

1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di mana pun di dunia.
2. Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di kawasan dunia tersebut.

*Pasal 14*

Setiap orang berhak untuk mencari dan mengamankan suaka di negara manapun dari segala bentuk penganiayaan, agama atau lainnya, dan hak untuk tidak dideportasi. Merupakan kewajiban setiap negara untuk menyediakan suaka semacam itu.

*Pasal 15*

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
3. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mendorong munculnya tatanan konstitusional global.

*Pasal 16*

1. Setiap orang berhak untuk menikah.
2. Anggota keluarga memiliki hak untuk mempertahankan dan menjalankan agama atau kepercayaan mereka sendiri.
3. Setiap orang berhak untuk berkeluarga.
4. Setiap orang berhak untuk meninggalkan dunia dan bergabung dengan monasteri, asalkan seseorang melakukannya setelah membuat pengaturan yang memadai untuk tanggungannya.
5. Pernikahan dan monastisisme adalah dua inovasi kelembagaan umat manusia yang paling sukses dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.
6. Ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Merupakan tugas setiap orang untuk memberikan perhatian khusus kepada ibu dan anak.
7. Setiap orang harus mempromosikan pandangan bahwa seluruh dunia merupakan keluarga besar.

*Pasal 17*

1. Setiap orang berhak untuk memiliki properti, sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain. Asosiasi juga memiliki hak serupa untuk memiliki properti.
2. Setiap orang berhak untuk tidak dirampas propertinya secara sewenang-wenang. Merupakan kewajiban setiap orang untuk tidak merampas properti orang lain secara sewenang-wenang. Properti harus dipahami sebagai properti material serta intelektual, estetika dan spiritual.
3. Setiap orang berkewajiban untuk tidak merampas properti siapa pun atau mengambilnya dengan cara yang tidak sah.

#### *Pasal 18*

1. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ini adalah masalah pilihan.
2. Setiap orang berhak untuk mempertahankan agamanya dan mengubah agamanya.
3. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menggalakkan perdamaian dan toleransi di antara agama dan ideologi yang berbeda.

#### *Pasal 19*

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dimana istilah ekspresi mencakup bahasa yang digunakan, makanan yang dimakan; pakaian yang dikenakan seseorang; agama yang dipraktikkan dan dianut seseorang, asalkan seseorang secara umum mematuhi aturan-aturan kesopanan yang lazim yang diakui di lingkungan sekitar.
2. Merupakan tugas setiap orang untuk memastikan bahwa setiap orang menikmati kebebasan seperti itu.
3. Anak memiliki hak untuk mengekspresikan diri secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, yang menjadi kewajiban pengasuhnya untuk memberikan bobot sesuai dengan usia dan kedewasaan anak.

*Pasal 20*

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, dan berkewajiban untuk melakukannya dengan damai.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu asosiasi, atau meninggalkannya tanpa proses yang semestinya.

*Pasal 21*

1. Setiap orang yang berusia di atas delapan belas tahun memiliki hak untuk memberikan suara, memilih atau dipilih dan dengan demikian mengambil bagian dalam pemerintahan atau pemerintahan negara, secara langsung atau tidak langsung.
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama ke layanan publik di negaranya dan kewajiban untuk menyediakan akses tersebut.
3. Merupakan kewajiban setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses politik.

*Pasal 22*

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial dan kewajiban untuk berkontribusi padanya.

*Pasal 23*

1. Setiap orang berhak atas gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama dan kewajiban untuk menawarkan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.
2. Setiap orang berhak atas remunerasi yang adil untuk pekerjaannya dan kewajiban untuk memberi kompensasi yang adil atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
3. Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya sendiri.
4. Setiap orang berhak untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja.

*Pasal 24*

1. Setiap orang berhak untuk bekerja dan beristirahat, termasuk hak tunjangan sambil mencari pekerjaan dan hak untuk liburan berkala dengan pembayaran.
2. Hak untuk beristirahat meluas ke bumi.

*Pasal 25*

1. Setiap orang berhak atas kesehatan dan asuransi kesehatan universal. Adalah tugas negara atau masyarakat untuk menyediakannya.
2. Setiap anak berhak atas masa kanak-kanak yang bebas dari kekerasan dan merupakan kewajiban orang tua untuk menyediakannya.

*Pasal 26*

Setiap orang berhak atas pendidikan gratis dan hak atas kesetaraan kesempatan untuk segala bentuk pendidikan yang melibatkan pendaftaran terbatas.

*Pasal 27*

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya komunitas dan hak untuk berkontribusi secara bebas di dalamnya.
2. Setiap orang berhak untuk berbagi kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya serta kewajiban untuk menyebarkannya, dan sedapat mungkin berkontribusi untuk kemajuan tersebut.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan warisan budaya mereka. Merupakan tugas setiap orang untuk melindungi dan memperkaya warisan setiap orang, termasuk milik sendiri.

*Pasal 28*

Setiap orang berhak atas tatanan sosial ekonomi dan politik di tingkat global, nasional, regional dan lokal yang memungkinkan terwujudnya

keadilan sosial, politik, ekonomi, ras dan gender serta kewajiban untuk mendahulukan kepentingan universal, nasional, regional dan lokal dalam urutan itu.

*Pasal 29*

1. Salah satunya adalah terikat kewajiban, saat menegaskan haknya, untuk mengambil hak manusia lain; dari generasi masa lalu, sekarang dan masa depan, hak-hak kemanusiaan, dan hak-hak alam dan bumi yang diperhitungkan.
2. Salah satunya adalah terikat kewajiban, ketika menegaskan hak-haknya, untuk lebih memilih non-kekerasan daripada kekerasan.

*Pasal 30*

1. Setiap orang berhak untuk mensyaratkan pembentukan komite pengawas dalam komunitasnya, didefinisikan secara religius atau sebaliknya, untuk memantau pelaksanaan pasal-pasal Deklarasi ini; dan untuk melayani dan mempresentasikan kasus seseorang di hadapan komite semacam itu.
2. Merupakan kewajiban setiap orang untuk memastikan bahwa komite semacam itu mengawasi dengan baik penerapan pasal-pasal ini.

d) *United Religions Initiative Charter* (Piagam Prakarsa Perserikatan Agama-Agama)

**PIAGAM PRAKARSA PERSERIKATAN AGAMA-AGAMA  
(2000)**

*United Religions Initiative* (URI) adalah komunitas global yang berkembang yang didedikasikan untuk menggalakkan kerja sama antaragama yang berkelanjutan setiap hari, mengakhiri kekerasan yang didorong oleh agama, dan menciptakan budaya perdamaian, keadilan, dan pemulihan bagi bumi dan semua makhluk hidup.



Dengan berkarya di semua benua dan lintas benua, orang-orang dari berbagai agama, ekspresi spiritual, dan tradisi adat menciptakan tingkat kerja sama global abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, saat kelahirannya, harapan orang meningkat dengan visi dunia yang lebih baik. Ini adalah dunia tempat nilai-nilai dan ajaran tradisi kebijaksanaan agung memandu pelayanan masyarakat, tempat orang-orang saling menghormati keyakinan, dan dimana akal dan semangat orang-orang yang bekerja bersama membawa pemulihan dan masa depan yang lebih penuh harapan bagi komunitas bumi. URI, pada waktunya, ingin memiliki visibilitas dan citra Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak tahun 1996, ribuan orang telah membagikan visi mereka dan bekerja sama untuk membuat URI. Ini adalah organisasi untuk kebaikan global yang berakar pada nilai-nilai spiritual bersama. Orang-orang dari berbagai budaya dan perspektif yang berbeda bekerja untuk menciptakan sebuah organisasi yang inklusif, non-hierarkis dan desentralisasi; organisasi yang meningkatkan kerjasama, otonomi dan kesempatan individu. Karya kreatif bersama yang ditawarkan oleh orang-orang dari berbagai budaya ini menghasilkan organisasi unik yang terdiri dari kelompok-kelompok swakelola yang beroperasi secara lokal dan terhubung secara global.

Piagam URI telah diwujudkan oleh banyak sekali suara dari seluruh dunia. Semangat esensial, nilai dan visinya diekspresikan dalam Pembukaan, Tujuan dan Prinsip. Secara bersama-sama, mereka menginspirasi, mendasari, dan memandu semua aktivitas URI.

*Pembukaan* - panggilan yang menginspirasi kita untuk membuat URI saat ini dan terus membuatnya setiap hari;

*Tujuan* - pernyataan yang mempersatukan kita dalam tujuan yang sama;

*Prinsip* - keyakinan mendasar yang memandu struktur, keputusan, dan muatan kita;

## Pembukaan

Kami, orang-orang dari berbagai agama, ekspresi spiritual, dan tradisi adat di seluruh dunia, dengan ini membentuk *United Religions Initiative* (URI) untuk menggalakkan kerja sama antaragama yang berkelanjutan setiap hari, untuk mengakhiri kekerasan yang dimotivasi oleh agama dan untuk menciptakan budaya perdamaian, keadilan dan pemulihan bagi bumi dan semua makhluk hidup.

Kami menghormati keunikan setiap tradisi, dan perbedaan praktik atau kepercayaan.

Kami menghargai suara yang menghormati orang lain, dan percaya bahwa membagikan nilai-nilai dan kebijaksanaan kami dapat membawa kami untuk bertindak demi kebaikan semua.

Kami percaya bahwa kehidupan religius dan spiritual kami membimbing kami untuk membangun komunitas dan menghormati satu sama lain, dibandingkan memecah belah kami.

Oleh karena itu, sebagai orang yang saling bergantung yang berakar pada tradisi kami, kami sekarang bersatu demi kepentingan komunitas bumi kita.

Kami bersatu untuk membangun budaya perdamaian dan keadilan.

Kami bersatu untuk memulihkan dan melindungi bumi.

Kami bersatu untuk membangun tempat yang aman untuk penyelesaian konflik, pemulihan dan rekonsiliasi.

Kami bersatu untuk mendukung kebebasan beragama dan ekspresi spiritual, dan hak-hak semua individu dan masyarakat sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Kami bersatu dalam aksi kerja sama yang bertanggung jawab untuk membawa kearifan dan nilai-nilai agama, ekspresi spiritual dan tradisi adat kami untuk menanggung tantangan ekonomi, lingkungan, politik dan sosial yang dihadapi komunitas bumi kita.

Kami bersatu untuk memberikan kesempatan global untuk partisipasi semua orang, terutama oleh mereka yang suaranya tidak sering didengar.

Kami bersatu untuk merayakan kegembiraan berkah dan cahaya kebijaksanaan baik dalam gerakan maupun keheningan.

Kami bersatu untuk menggunakan sumber daya gabungan kami hanya untuk tindakan tanpa kekerasan, tindakan welas asih, untuk membangkitkan kebenaran terdalam kami, dan untuk mewujudkan cinta dan keadilan di antara semua kehidupan di komunitas bumi kita.

### **Tujuan**

Tujuan dari *United Religions Initiative* (URI) adalah untuk menggalakkan kerja sama antaragama yang berkelanjutan setiap hari, untuk mengakhiri kekerasan yang dimotivasi oleh agama dan untuk menciptakan budaya perdamaian, keadilan dan pemulihan bagi bumi dan semua makhluk hidup.

### **Prinsip**

1. URI adalah organisasi yang membangun jembatan, bukan agama.
2. Kami menghormati kearifan suci setiap agama, ekspresi spiritual dan tradisi adat.
3. Kami menghormati perbedaan antar agama, ekspresi spiritual, dan tradisi adat.
4. Kami mendorong anggota kami untuk memperdalam akar mereka dalam tradisi mereka sendiri.

5. Kami mendengarkan dan berbicara dengan hormat untuk memperdalam saling pengertian dan kepercayaan.
6. Kami memberi dan menerima keramahan.
7. Kami mencari dan menyambut anugerah keragaman dan model praktik yang tidak mendiskriminasi.
8. Kami mempraktikkan partisipasi yang adil bagi perempuan dan laki-laki di semua aspek URI.
9. Kami mempraktikkan pemulihan dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan.
10. Kami bertindak dari praktik-praktik ekologi yang baik untuk melindungi dan melestarikan bumi untuk generasi sekarang dan mendatang.
11. Kami mencari dan menawarkan kerja sama dengan upaya lintas agama lainnya.
12. Kami menyambut sebagai anggota semua individu, organisasi dan asosiasi yang menyetujui *Pembukaan, Tujuan* dan *Prinsip*.
13. Kami memiliki kewenangan untuk membuat keputusan di tingkat paling lokal yang mencakup semua pihak yang relevan dan terpengaruh.
14. Kami memiliki hak untuk mengatur dengan cara apa pun, pada skala apa pun, di area mana pun, dan di sekitar masalah atau aktivitas apa pun yang relevan dan sesuai dengan *Pembukaan, Tujuan*, dan *Prinsip*.
15. Pertimbangan dan keputusan kami harus dibuat di setiap tingkat oleh badan dan metode yang secara adil mewakili keragaman kepentingan yang terpengaruh dan tidak didominasi oleh siapa pun.
16. Kami (setiap bagian dari URI) hanya akan melepaskan otonomi dan sumber daya yang penting untuk mencapai *Pembukaan, Tujuan* dan *Prinsip*.
17. Kami memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya keuangan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan bagian

kami, dan untuk berbagi sumber daya keuangan dan lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan bagian yang lain.

18. Kami menjaga standar integritas dan perilaku etis tertinggi, penggunaan sumber daya dengan hati-hati, dan pengungkapan informasi yang adil dan akurat.
19. Kami berkomitmen untuk pembelajaran dan adaptasi organisasi.
20. Kami menghormati kekayaan dan keragaman semua bahasa serta hak dan tanggung jawab peserta untuk menerjemahkan dan menafsirkan Piagam, Pasal-Pasal, Anggaran Rumah Tangga, dan dokumen terkait sesuai dengan *Pembukaan, Tujuan dan Prinsip*, dan semangat *United Religions Initiative (URI)*.
21. Anggota URI tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam ritual apa pun atau dakwah.

e) *Religion and Violence* (Agama dan Kekerasan)

### **AGAMA DAN KEKERASAN**

Konferensi Dewan Gereja Dunia

Eckerd College, St. Petersburg, Florida, AS

8–12 Februari 2002

Kami, anggota dari lima tradisi agama - Budha, Kristen, Hindu, Islam, dan Yudaisme - datang bersama dengan keprihatinan yang mendalam tentang kekerasan yang berkembang di dunia saat ini. Tradisi kita sendiri memberi kita nilai-nilai etika dan menawarkan visi hidup berdampingan secara damai yang didasarkan pada keadilan dan harmoni dengan bumi. Kami sadar akan kebutuhan untuk mengkritik diri sendiri dan melampaui wacana yang dibentuk oleh tujuan politik, nasional, ekonomi atau militer yang sempit. Kami berusaha untuk melampaui idealisme religius dan mengeksplorasi cara-cara ekspresi dan tindakan yang konkret.

### *Wajah Kekerasan*

Dalam upaya untuk mengidentifikasi banyak wajah kekerasan, kami menyadari kompleksitas fenomena tersebut dan kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentangnya. Mengidentifikasi wajah-wajah kekerasan yang berbeda akan membantu kita menemukan cara-cara yang relevan dan efektif untuk mengatasinya. Dalam menjelaskan sumber kekerasan, beberapa tradisi kita melihatnya sebagai bagian integral dari alam, sementara yang lain menempatkannya dalam keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan manusia.

Berikut ini adalah beberapa wajah kekerasan yang kami identifikasi:

- Kekerasan Fisik (*Physical Violence*) - Peperangan, penggunaan kekerasan seperti pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga, terorisme oleh individu, kelompok atau negara.
- Kekerasan Politik (*Political Violence*) - Seperti ketika undang-undang diberlakukan yang bertentangan dengan pengakuan martabat, nilai, dan kesetaraan setiap orang dengan orang lain.
- Kekerasan yang disponsori negara (*State-sponsored Violence*) - seperti pembunuhan ekstra yudisial, penyiksaan, dan penahanan / pengurungan tanpa proses hukum yang semestinya.
- Kekerasan Struktural (*Structural Violence*) - Kekerasan yang dibangun ke dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi seperti kasta, patriarki, dll.
- Kekerasan Ekologis (*Ecological Violence*) - Perusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.
- Kekerasan Pembebasan (*Liberative Violence*) - Ketika individu atau kelompok - sebagai upaya terakhir - mencari jalan keluar untuk kekerasan guna menanggapi bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum di atas dan mencapai pembebasan dari penindasan.

### *Hubungan Antara Agama dan Kekerasan*

Tradisi agama bisa menjadi sumber untuk membangun perdamaian. Pada saat yang sama, komunitas agama seringkali berperan dalam mengadvokasi dan membenarkan kekerasan. Dalam menghadapi kekerasan struktural, tradisi agama harus membantu kita mengatasi nafsu akan kekuasaan, kontrol, dan kepemilikan barang-barang material yang menjadi penggerak dorongan kekerasan dan sistem kekerasan.

Berikut ini adalah beberapa cara kami mengkarakterisasi hubungan antara kekerasan dan agama:

- *Diam (Silence)*: Umat beragama sering kali diam dalam menghadapi kekerasan. Ada banyak alasan mengapa diam seperti itu, termasuk, kepedulian terhadap kelangsungan hidup komunitas dan struktur mereka sendiri. Beberapa mungkin juga melihat peran mereka membantu pengikutnya merasa puas dengan status quo dan kemakmuran materi mereka sendiri tanpa mempedulikan yang terpinggirkan.
- *Penyucian (Sanctification)*: Komunitas agama membenarkan penggunaan kekerasan oleh negara atau entitas ekstra negara atau oleh lembaga lain. Contohnya adalah ketika tradisi agama melekatkan dirinya pada tujuan militeristik negara dan legitimasi tekstual / kanonik kekerasan terhadap perempuan.
- *Ekspansi (Expansion)*: Komunitas agama menggunakan kekerasan untuk tujuan menyebarkan diri mereka sendiri atau untuk memastikan pertumbuhan mereka sendiri.
- *Citra Tuhan (Images of God)*: Beberapa tradisi agama memiliki gambaran yang kejam tentang Ketuhanan, yang mungkin memiliki implikasi bermasalah bagi pemahaman diri orang beriman.
- *Citra Diri (Images of Self)*: Tradisi agama mengembangkan kekerasan dengan membingkai nilai penganutnya dalam istilah - nilai yang lebih rendah – dari orang lain.

Sementara daftar di atas menyingkapkan beberapa aspek problematis dari hubungan antara agama dan kekerasan, poin berikut menunjukkan bentuk-bentuk keterlibatan yang konstruktif:

- Membuka kedok / Menentang (*Unmasking/Opposing*): Komunitas agama telah berperan dalam menentang kekerasan baik di dalam komunitas mereka sendiri maupun ketika orang lain terluka.
- Model Non-Kekerasan (*Models of Non-Violence*): Setiap tradisi agama juga memiliki individu dan kelompok penting yang menjalani kehidupan yang bersaksi tentang dorongan damai dalam agama.
- Membatasi Kekerasan (*Limiting Violence*): Agama sering kali berperan dalam memeriksa tingkat kekerasan atau memanusikannya. Dalam sebagian besar tradisi kita, penggunaan kekerasan secara terbatas diizinkan untuk membela kebaikan tetapi dengan pemahaman bahwa kita tidak mencapai yang ideal dan karenanya membutuhkan pengampunan.

#### *Tantangan Agama oleh Kekerasan*

Diskusi kami mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi tradisi agama kita dalam perjuangan bersama untuk mengatasi kekerasan.

- Kritik (*Critique*): Untuk terlibat dalam kritik yang berkelanjutan, dari dalam tradisi kita sendiri, tentang pemahaman kita tentang misi, pemilihan, keselamatan, dan hubungan antara agama dan tanah. Tradisi kami menawarkan pemahaman alternatif yang mempromosikan keutuhan, keadilan bagi semua orang, dan pengakuan tanggung jawab kami terhadap semua bentuk kehidupan.
- Sarana dan Tujuan (*Means and Ends*): Untuk menantang komunitas kita sendiri tentang hubungan antara sarana kekerasan dan tujuan non-kekerasan dan cara kekerasan berarti mengkompromikan nilai kehidupan manusia dan dalam jangka panjang mempromosikan budaya kekerasan.



- Percakapan, Pertemuan, dan Solidaritas (*Conversation, Encounter, and Solidarity*): Untuk bergerak menuju percakapan, pertemuan dan solidaritas yang lebih besar dan lebih dalam dengan orang-orang dari tradisi lain. Dalam solidaritas kami dengan para korban kekerasan dan ketidakadilan, kekuatan dan nilai tradisi kami menjadi nyata.
- Non-kekerasan sebagai Perlawanan (*Non-violence as Resistance*): Untuk mempromosikan wacana tentang perdamaian yang berhubungan dengan ketidakadilan, dan untuk mempraktikkan non-kekerasan sebagai mode perlawanan aktif.
- Melawan Ekstremisme (*Countering Extremism*): Untuk melawan suara dan pengaruh yang tidak proporsional dari para ekstremis di dalam dan di luar tradisi agama.
- Menyembuhkan Kenangan (*Healing of Memories*): Banyak dari kita memiliki kenangan menyakitkan tentang korban. Ingatan ini terkadang mengaburkan kenyataan bahwa para korban sendiri bisa menjadi korban. Kita ditantang untuk menghadapi ingatan itu dan mencoba mencari sumber lain untuk identitas yang lebih positif.

#### *Komitmen Bersama untuk Perdamaian*

Kami mengundang tradisi agama kami untuk:

- Secara kolektif mengakui bahwa kekerasan tidak manusiawi bagi pelaku, korban dan pengamat.
- Tinjau kembali keanekaragaman pemahaman dalam inti tradisi kita dan rumuskan pemahaman baru yang mengarah pada identitas diri yang lebih inklusif.
- Berikan kritik moral terhadap struktur kekuasaan di dalam dan di luar tradisi kita.
- Terlibat dalam meningkatkan literasi agama yang memungkinkan tanggapan yang lebih terinformasi dan membantu menciptakan budaya saling menghormati, toleransi, dan penerimaan.

- Ciptakan tata cara pendidikan dimana orang menemukan bahwa cerita dan sosok kenabian dari tradisi lain membuat orang peka terhadap cara-cara membentuk kembali dan memperbarui tradisi sendiri.
- Memfasilitasi penyembuhan yang bermakna dari ingatan masa lalu dalam kerangka pemahaman, yang mungkin mencakup welas asih, pengampunan, rekonsiliasi.
- Membantu memulihkan alternatif kreatif untuk kekerasan dan menawarkan peluang untuk penggunaan non-kekerasan sebagai mode transformasi konflik.

### **C. KOMPLEKSITAS SISTEM MAKNA AGAMA BAGI TATANAN DUNIA**

#### **1. Agama diantara Pemelihara dan Pengubah Tatanan Dunia**

Hubungan antara agama dan perubahan, sebagai konsekwensi munculnya konflik dan perdamaian, menjadi isu yang cukup menantang. Secara historis, terdapat pandangan yang menekankan peran agama dalam pemeliharaan tradisi dan dalam melestarikan serta membenarkan struktur sosial yang ada. Karena itulah, terdapat gambaran agama sebagai candu bagi massa, sehingga melemahkan motivasi apa pun untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan pandangan alternatif tentang hubungan antara agama dan perubahan menggambarkan agama sebagai pendorong perubahan di dunia. Seruan agama untuk perubahan dan perbaikan dunia dinyatakan dengan jelas dalam berbagai tradisi keagamaan. Banyak teolog memandang perjuangan untuk kesetaraan politik dan sosial sebagai perjuangan spiritual yang berusaha untuk mewujudkan kuasa Tuhan di bumi, dan menyingkirkan hal-hal yang dianggap tidak diperkenankan oleh Tuhan. Selaras dengan pandangan ini, berbagai tradisi agama menyerukan revolusi spiritual atau etika. Islam, misalnya, mendefinisikan penciptaan tatanan moral dalam masyarakat manusia

sebagai salah satu tujuan utamanya<sup>54</sup>; dan gerakan Fundamentalis lintas agama juga sangat aktif dalam upaya mereka untuk menciptakan pribadi dan masyarakat yang baru. Maka, agama apa pun yang mengaku peduli dengan jiwa manusia, tetapi tidak peduli dengan daerah kumuh yang menindas, kondisi ekonomi yang mencekik dan kondisi sosial yang melumpuhkan adalah agama yang kering.

Para pemimpin agama dan spiritual telah mencoba mempraktikkan teologi yang demikian. Organisasi-organisasi keagamaan berupaya mengubah dunia lebih dekat dengan cita-cita religiusitas dan mewujudkannya di bumi. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial yang bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan. Aksi sosial berbasis agama untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dapat ditunjukkan dalam berbagai contoh kegiatan berbasis agama dan dalam aktivitas politik. Sebagaimana dicontohkan oleh perorangan atau organisasi keagamaan dalam rangka mobilisasi gerakan besar seperti gerakan gerakan Antipartheid Afrika Selatan dan gerakan kemerdekaan India. Hal yang serupa juga terlihat dalam dialog antaragama diantara para pemuka agama dan para aktivis, baik dalam kancah nasional maupun internasional, guna memfasilitasi penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian dunia. Misalnya, sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar pada bagian sebelumnya, selama bulan Agustus 2000, sekitar dua ribu pemimpin agama dan spiritual terkemuka dunia berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Milenium.

Tetapi di sisi lain, terdapat suatu aktivitas intensif atas nama agama yang telah ditunjukkan dalam berbagai tindakan kekerasan, perang, dan terorisme di seluruh dunia. Maka tidak heran bila beberapa kalangan menyebutkan bahwa peristiwa kekerasan atas nama agama menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan kekuatan institusional lainnya dalam sejarah manusia. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>54</sup> Ahmad Sarwat, *Islam Agama Perdamaian* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

kekerasan agama bisa lebih intens dan mendalam, serta menimbulkan bahaya eksistensial bagi peradaban manusia seluruh dunia.<sup>55</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara agama dan perubahan perlu mengakui peran agama sebagai pedang bermata dua yang dapat memfasilitasi, baik status quo maupun perubahan, atau antara kekerasan dan perdamaian. Karena itulah, tinjauan dengan pendekatan sistem makna terhadap agama kiranya dapat menjelaskan hubungan yang rumit antara agama dan perubahan. Pendekatan sistem makna menggambarkan agama sebagai sistem makna individu atau kolektif yang mirip dengan sistem lain perihal struktur, kelenturan, dan fungsinya. Namun sistem makna ini unik dan khas karena berpusat pada hal-hal yang dianggap suci. Karena itulah, perlu penjabaran tentang hal-hal seperti makna perubahan dan cara untuk mencapainya; perbedaan yang melekat antar kelompok agama; kompleksitas dan kelenturan sistem makna keagamaan; dan proses agama yang dapat memfasilitasi status quo atau aktivitas kekerasan dan perdamaian.

Terkait dengan hubungan yang kompleks antara agama dan perubahan dalam seluruh peristiwa sejarah dunia dan peradaban manusia, dapat dinyatakan bahwa agama telah mendorong tujuan melestarikan status quo dan tujuan mencapai perubahan, dan juga mendorong penggunaan segala cara untuk mencapai kedua tujuan ini, termasuk dua cara yang saling bertolak belakang, yaitu kekerasan dan perdamaian. Karena itulah, untuk memahami kompleksitas ini, kiranya diperlukan penjabaran tentang dua hal, yaitu eksplorasi tentang tujuan dan eksplorasi tentang cara.

Dapat dinyatakan bahwa aktivitas keagamaan yang lebih tradisional cenderung tunduk pada otoritas hukum agama, yang diterima dan diakui secara mendalam sebagai inspirasi Ilahi. Sedangkan aktivitas keagamaan yang kurang tradisional mencoba lebih mengulik hukum agama dalam upaya menyesuaikan religiusitas dengan semangat

---

<sup>55</sup> Bruce Hoffman, *Inside Terrorism* (New York: Columbia University Press, 2006).

waktu dan masa. Individu yang lebih religius secara tradisional cenderung tidak menerima perubahan dalam tradisi dan lebih mungkin untuk percaya dan mendorong perubahan dunia yang radikal. Lebih khusus lagi, para pemeluk agama yang lebih tradisional memperkirakan bahwa dunia lebih mungkin menjadi seperti yang mereka inginkan secara ideal, dan bahwa perubahan di masa depan akan terjadi lebih cepat. Selain itu, mereka percaya bahwa mereka memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengubah dunia, dan mengelola serta mempelopori lebih banyak upaya untuk mewujudkan perubahan. Dalam hal sarana atau alat untuk mencapai perubahan, para pemeluk agama yang lebih tradisional mendukung pada mekanisme praktik keagamaan. Mereka menilai bahwa praktik keagamaan lebih berperan untuk membawa perubahan dunia. Sebaliknya, para pemeluk agama yang kurang religius secara tradisional lebih mendukung mekanisme perlindungan lingkungan dan menganggap hal tersebut lebih berperan untuk perubahan.<sup>56</sup> Penjabaran di atas menggambarkan bahwa religiusitas tradisional mengandung keyakinan bahwa pemeliharaan tradisi melalui praktik keagamaan merupakan sarana strategis untuk membawa perubahan yang diinginkan.

Dalam Islam, misalnya, tujuan perubahan bisa berarti tujuan politik seperti keadilan sosial dan pemerintahan demokratis. Namun, sebagian kalangan umat Islam terutama yang berpaham fundamentalis memahami seruan Islam untuk perubahan berarti seruan untuk berbuat diskriminasi. Syariat atau hukum Islam telah ditafsirkan dalam sistem makna Islam yang berbeda sebagai sarana untuk mencapai kedua jenis tujuan yang berbeda tersebut. Sedang dalam Buddhisme yang sering dianggap apatis secara sosial, proses pencerahan telah ditafsirkan dan direkomendasikan sebagai sarana yang unik untuk membawa perubahan yang revolusioner. Prinsip yang menjadi inti dari

---

<sup>56</sup> Israela Silberman, "Religious Violence, Terrorism, and Peace: A Meaning-System Analysis," in *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*, ed. Raymond F. Paloutzian and Crystal L. Park (New York: The Guilford Press, 2005).

revolusi sosial Buddha adalah membantu individu mengubah diri mereka sendiri yang berarti mengubah masyarakat. Lebih khusus lagi, Buddhisme Tibet menyarankan bahwa melalui proses pencerahan, setiap individu menjadi sadar akan potensinya dan belajar bagaimana membebaskan diri dari penderitaan. Pencerahan individu ini dapat merangsang pengalaman serupa bagi individu lain, dan dapat membawa pertumbuhan spiritual, kebaikan, dan kebebasan sosial.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa untuk memahami makna perubahan dan cara untuk mencapainya memerlukan eksplorasi terhadap berbagai isu, semisal apakah perubahan yang diinginkan melibatkan perubahan dalam tradisi atau tidak; apakah perubahan itu dilakukan di ranah spiritual atau sosial politik; dan apakah cara untuk mencapai perubahan itu dianggap efektif atau tidak dalam sistem agama tertentu. Dengan demikian, memahami makna perubahan memerlukan evaluasi yang kompleks tentang tujuan dan sarana yang relevan dalam sistem makna yang berbeda. Hal inilah yang mendasari, misalnya, jargon yang cukup pelik: *one person's terrorist is another person's freedom fighter*. Seseorang yang dianggap dan dinilai sebagai teroris oleh pihak tertentu, akan dianggap dan dinilai sebagai pahlawan bagi pihak yang lain. Seseorang yang dianggap dan dinilai sebagai pemicu konflik dan perusak perdamaian oleh pihak tertentu, akan dianggap dan dinilai sebagai penegak perdamaian sejati oleh pihak-pihak yang mendukung aksinya.<sup>57</sup> Inilah salah satu kerumitan dalam pembicaraan tentang tujuan dan sarana untuk perubahan dalam wacana keagamaan.

Bagaimanapun peliknya pembicaraan tentang hal tersebut, pendekatan sistem makna terhadap agama dapat berkontribusi, misalnya, dalam menjelaskan sistem makna yang ada dan sedang terjadi pada para teroris yang menggunakan wacana religiusitas. Orang-orang yang melakukan tindakan kekejaman, perusakan, dan kekerasan atas nama agama itu biasanya percaya bahwa melalui tindakan-tindakan tersebut mereka sedang menciptakan dunia yang lebih baik. Dari sudut

---

<sup>57</sup> Fathali M. Moghaddam, "The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration," *American Psychologist* 60, no. 2 (2005): 161–69.

pandang mereka, orang-orang tersebut sedang memurnikan dunia dari ketidakadilan dan kekejaman kemanusiaan. Dengan demikian, pembahasan tentang makna perubahan di atas memberikan gambaran bahwa pendekatan sistem makna agama dapat menjelaskan hubungan yang rumit dan kompleks antara agama dan perubahan dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Cara berikutnya dalam upaya memahami hubungan rumit antara agama dan perubahan adalah dengan mengeksplorasi apakah kelompok-kelompok agama yang ada di dunia berbeda secara inheren antara satu kelompok agama dengan kelompok agama yang lain dalam konteks ini, misalnya adalah kelompok agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu yang memiliki dan mendukung sistem makna agama yang berbeda. Dengan mengeksplorasi secara sistematis isi keyakinan, tujuan, dan tindakan kelompok agama-agama yang berbeda dapat membantu dalam upaya membangun tipologi kelompok agama yang bermakna berdasarkan sikap mereka terhadap perubahan dan terhadap kekerasan / konflik atau perdamaian.

Dengan melakukan perbandingan lintas budaya dan agama, menghasilkan beberapa tipologi kelompok agama. Setidaknya, terdapat tiga tipe dasar agama berdasarkan sikap mereka terhadap status quo, yaitu agama dapat menjadi 'agama status quo', yaitu agama yang mendukung partai dominan dan status quo sosial politik; 'agama perlawanan', yaitu agama-agama yang mendefinisikan diri mereka bertentangan dengan agama status quo, dan membela diri melawan dominasi ideologis yang sedang berlangsung; 'agama-agama revolusi', yaitu agama-agama yang mendefinisikan diri mereka sendiri dalam oposisi terhadap partai yang dominan, dengan mempromosikan tindakan langsung melawan kontrol dari partai dominan terhadap masyarakat.<sup>58</sup> Dalam konteks ini, kiranya perlu juga untuk menyebutkan perbedaan-perbedaan yang agak kontroversial. Pertama,

---

<sup>58</sup> Bruce Lincoln, ed., *Religion, Rebellion, Revolution: An Interdisciplinary and Cross-Cultural Collection of Essays* (New York: Palgrave Macmillan, 1985).

perbedaan antara agama-agama yang berorientasi temporal versus agama-agama yang berorientasi akhirat, menunjukkan bahwa jenis pertama dapat mengilhami aktivisme, sedangkan jenis kedua cenderung menghambatnya. Kedua, perbedaan antara agama-agama Barat yang mendorong aktivisme sosial, dan agama-agama Timur yang mendorong pelepasan diri dari dunia dan pasifisme.

Dengan cara yang sama, diskusi tentang aktivitas kekerasan versus aktivistas perdamaian menunjukkan bahwa beberapa kelompok agama dipandang atau dianggap memiliki kecenderungan secara inheren lebih keras daripada yang lain. Misalnya, Muslim kadang-kadang digambarkan sebagai militan dan radikal fundamentalis, sementara kelompok agama yang mendukung sistem keagamaan yang mencakup doktrin pasifisme, seperti Buddhisme, sering dipandang tidak rentan terhadap konflik. Dalam salah satu perbandingan empiris antara agama Kristen, Muslim, dan kelompok lain, Fox menemukan bahwa selama tahun 1965-2001, orang-orang Kristen terlibat dalam sebagian besar konflik pada tingkat absolut. Muslim terlibat dalam sebagian besar konflik sebanding dengan ukuran populasi mereka, dan sebagian besar konflik ini bersifat intra-agama dibandingkan dengan konflik antar-agama. Hasil penelitiannya untuk konflik agama, misalnya, konflik antara dua kelompok yang berbeda agama atau antara dua kelompok yang berbeda madzhab di dalam agama yang sama, menunjukkan bahwa kelompok Muslim paling banyak terlibat dalam konflik.<sup>59</sup> Bagaimanapun, Fox berhati-hati dalam menafsirkan hasil di atas, sembari menekankan bahwa meskipun mereka mencerminkan hubungan antara agama dan konflik selama periode sejarah tertentu, tetapi mereka tidak menyiratkan apa pun tentang kecenderungan kekerasan yang melekat pada agama.

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa tidaklah mudah membuat generalisasi semacam itu, bahkan bisa jadi agak gegabah. Yang mungkin bisa dipastikan adalah bahwa masing-masing agama atau

---

<sup>59</sup> Jonathan Fox, "Are Some Religions More Conflict-Prone Than Others?," *Jewish Political Studies Review* 16, no. 1/2 (2004): 81-100.



tradisi sama-sama memiliki potensi untuk mendukung status quo dan juga potensi sebagai oposisi terhadapnya, dengan sama-sama memiliki perangkat dan sarana untuk suatu perlakuan konflik atau kekerasan maupun perdamaian. Dengan berdasarkan kelenturan sistem makna yang ada pada masing-masing agama, sejarah menunjukkan bahwa semua agama atau tradisi yang mapan saat ini dimulai sebagai gerakan revolusioner kecil. Maka dapat dinyatakan bahwa agama-agama perlawanan dapat mengubah mereka menjadi agama-agama revolusi. Sementara itu agama-agama revolusi dapat menjadi agama status quo jika berhasil dalam perjuangan mereka, atau mungkin jatuh kembali menjadi agama-agama perlawanan jika mereka dikalahkan.

Dalam konteks ini, Katolik yang secara historis sering mendukung kemapanan, juga dimaknai sebagai bentuk yang mendukung aksi politik dalam rangka mempengaruhi pembebasan manusia dari ketidakadilan sosial. Keyakinan sebagian Muslim bahwa Imam Mahdi akan kembali, berdampak kepada pemusnahan sistem sosial yang tidak disukai. Keyakinan ini telah digunakan selama periode sejarah tertentu ketika pemerintah yang didukung Syiah berkuasa untuk membenarkan dan mendukung status quo. Tetapi pada periode sejarah lainnya, keyakinan ini memicu pemberontakan Syiah.<sup>60</sup> Kelenturan sistem makna agama dalam kaitannya dengan konflik dan perdamaian juga dapat ditunjukkan oleh beberapa catatan sejarah berikut: Umat Buddha di Tibet, meskipun memiliki tradisi pasifisme tetapi kadang-kadang menentang pendudukan Cina dengan keras; Katolik yang tidak menolak tradisi pasifisme yang kuat dalam agama Kristen, juga turut bertanggung jawab atas Perang Salib dan Inkuisisi; Yudaisme biasanya mendorong perlawanan damai dari represi dan tekanan yang sering disertai kekerasan terhadap orang Yahudi. Namun sejarah juga membuktikan bahwa Yudaisme turut mengilhami beberapa aktivitas kekerasan.

---

<sup>60</sup> Nikki R. Keddie, "Shi'ism and Revolution," in *Religion, Rebellion, Revolution: An Interdisciplinary and Cross-Cultural Collection of Essays*, ed. Bruce Lincoln (New York: Palgrave Macmillan, 1985).

Berkaca dari penjabaran di atas, maka tidak mengherankan bila muncul pertanyaan tentang bagaimana suatu agama sama-sama memiliki potensi mendukung status quo dan sekaligus perubahan, juga sama-sama memiliki sarana dan perangkat untuk aktivitas konflik dan perdamaian. Pendekatan sistem makna terhadap agama mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menekankan kompleksitas sistem makna agama yang memiliki kecenderungan mencakup berbagai macam pesan yang luas yang bisa jadi terkesan bertolak belakang. Pesan atau warta agama tersebut mencakup pesan yang mendorong dukungan status quo, sementara pesan atau warta yang lain menentangnya. Pesan atau warta agama tersebut juga dapat memasukkan rekomendasi untuk aktivitas kekerasan dan perdamaian sebagai cara yang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan menekankan kelenturan sistem keagamaan yang rumit ini, yaitu kemampuan untuk mengakomodasi situasi yang berbeda, dan untuk berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, maka dimungkinkan untuk mengarahkan analisa pada dua hal, yaitu pertama pada sistem makna keagamaan yang khas dari individu, semisal pemimpin agama atau spiritual, dan kedua pada sistem keagamaan kolektif, dengan cara memilih secara selektif pesan-pesan agama tertentu dibandingkan pesan-pesan yang lain.

Terdapat beberapa faktor kontekstual yang dapat menjelaskan kelenturan sistem makna agama. Diantaranya adalah tingkat kesesuaian antara tradisi teologis tertentu dan tatanan sosial yang ada; hubungan oposisi antara agama dan negara; kepentingan elit atau oligarki yang menguasai lembaga keagamaan; kepentingan-kepentingan duniawi dan posisi kelas dari individu-individu yang mempelopori dan memimpin gerakan keagamaan; pandangan kelompok agama terhadap diri mereka sebagai minoritas tertindas yang membutuhkan perlindungan; kebutuhan rezim pada legitimasi eksternal; dan lain-lain. Satu hal kecil dapat dinyatakan bahwa kelompok agama cenderung berubah dari penantang dan penentang struktur sosial, menjadi penerima dan

pendukung ketika kelompok keagamaan tersebut mendapatkan kekayaan dan kapital.<sup>61</sup>

Penjelasan tentang ragam faktor eksternal yang membuat sistem makna agama begitu lentur, setara dengan beragamnya faktor yang bisa bertindak sebagai pemicu kecenderungan pemeluk agama untuk melakukan kekerasan secara ekstrem dan frontal. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah rasa keterasingan, penghinaan, perampasan, dan viktimisasi, baik secara pribadi maupun kolektif; lembaga politik yang tidak efektif lagi atau tidak dapat diakses yang berujung kepada kegagalan memberikan layanan dasar, melindungi hak asasi manusia, atau memerangi ekstremis; klaim atas wilayah dan pergeseran demografis; diskriminasi atas dasar agama; dan dorongan para pemimpin untuk merubah haluan agresi ke kelompok luar. Di samping factor-faktor tersebut, kemiskinan bisa juga menjadi faktor risiko tersendiri karena teroris biasanya menemukan cara yang kejam untuk memanipulasi dan mempermainkan orang-orang miskin dan bodoh. Revolusi komunikasi, sebagaimana kehadiran media sosial seperti saat ini, dapat pula memperbesar kecenderungan pada kekerasan agama dengan memfasilitasi penyebaran pesan-pesan teroris agama ke seluruh dunia.<sup>62</sup> Penjabaran di atas secara sekilas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan cenderung menghambat oposisi secara damai kecuali jika ada ancaman pada level tertentu yang dirasakan oleh lembaga agama atau agama itu sendiri. Meski demikian, keputusan untuk menentang suatu rezim dengan kekerasan sebagian besar didasarkan pada faktor-faktor duniawi atau sekuler, semisal kekayaan dan kekuasaan.

Selain faktor eksternal sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat pula faktor lain yang dapat menjelaskan kelenturan sistem makna agama, yaitu faktor kepribadian. Hal ini terkait dengan preferensi

---

<sup>61</sup> Philip Goodchild, *Capitalism and Religion: The Price of Piety* (London: Routledge, 2002).

<sup>62</sup> Jessica Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill* (New York: HarperCollins, 2003).

individual dari individu pemeluk agama, khususnya adalah para pemimpin agama yang preferensinya diikuti orang-orang yang mengikutinya. Preposisi tersebut berangkat dari pertanyaan mengapa beberapa pemimpin agama dan individu-individu yang serupa memilih pesan atau warta agama yang mendukung atau menentang status quo, dan yang mendorong aktivitas kekerasan atau perdamaian dari perspektif perbedaan individu dalam variabel kepribadian. Keputusan untuk mendukung atau menentang status quo oleh para pemimpin agama atau individu-individu yang serupa mungkin terkait dengan perbedaan individu dalam cara pandang tentang sifat manusia dan tentang dunia sebagai sesuatu yang dapat ditempa atau tetap dan statis. Bisa jadi juga terkait dengan kecenderungan individual ke arah dukungan atau pencegahan dalam memilih opsi perubahan versus stabilitas di seluruh situasi. Dalam istilah keagamaan hal semacam ini dibahas pada wacana tentang *free will* dan *determinism*.<sup>63</sup> Kecenderungan individual terhadap kedua wacana tersebut menentukan pesan-pesan dan warta agama yang dipilih.

Pendekatan sistem makna terhadap kekerasan dan perdamaian agama juga menunjukkan bahwa perbedaan individu dalam hal jenis lain dari variabel kepribadian, seperti keyakinan dasar dan tujuan, dapat mempengaruhi pilihan dari para pimpinan agama dan individu. Misalnya, adanya motivasi pembalasan dan pengampunan dapat menyebabkan individu untuk mengambil dan mendukung pesan-pesan dan warta agama yang bernuansa balas dendam atau pengampunan pada sistem makna agama mereka. Selain itu, perbedaan dalam cara individu berhubungan dengan sistem makna agama juga dapat mempengaruhi pilihan mengenai kekerasan atau perdamaian. Bila cara berhubungan adalah pada jalur fundamentalis, yaitu dengan cara yang menunjukkan pikiran tertutup dan keyakinan tentang kebenaran mutlak, maka cenderung berpautan dengan prasangka, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok luar. Tetapi bila cara berhubungan

---

<sup>63</sup> Fabio Scardigli et al., *Determinism and Free Will: New Insights from Physics, Philosophy, and Theology* (Switzerland: Springer, 2019).

pada sistem makna agama adalah pada jalur pencarian dan penjelajahan, yaitu fleksibilitas terhadap masalah agama, maka berpautan dengan lebih banyak keterbukaan dan toleransi terhadap orang lain.

Dengan penjabaran di atas maka dapat dinyatakan bahwa di satu sisi, sistem makna keagamaan dapat mempengaruhi individu atau kelompok agama dalam memilih aktivitas perubahan dibandingkan dengan dukungan terhadap status quo, atau konflik versus perdamaian. Sedangkan di sisi lain, kecenderungan individu atau komunitas untuk perubahan atau kekerasan dapat mempengaruhi jenis sistem makna agama yang akan dipilih oleh individu atau komunitas tersebut.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan proses-proses yang terjadi pada agama perihal pengaruhnya terhadap sokongan dan dukungan pada perubahan. Proses pensakralan (*the process of sanctification*)<sup>64</sup> adalah proses yang terjadi pada agama dengan memberikan dan menyuguhkan keyakinan, tujuan, dan landasan tindakan serta objek apa pun dengan makna khusus. Dengan memberikan alasan yang suci bagi norma dan struktur sosial yang berlaku, agama dapat mencegah inovasi dan kreasi, dan sekaligus mendorong orang-orang beriman untuk menerima tatanan sosial yang ada. Namun di sisi lain, melalui proses sakralitas ini juga agama dapat memberikan alasan yang suci tentang perubahan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga mampu membangkitkan motivasi yang kuat untuk tindakan konflik atau penegakan perdamaian sebagai sarana yang disucikan dalam upaya menggapai tujuan yang dimaksudkan dan dikehendaki.

Dari perspektif atau pendekatan sistem makna dapat dinyatakan bahwa beberapa proses yang terjadi pada agama dalam memberikan motivasi tindakan kepada individu dapat disebutkan sebagai berikut. Proses yang pertama adalah bahwa agama sebagai sistem makna dapat memfasilitasi tindakan dengan mendorong rasa efikasi diri, yaitu

---

<sup>64</sup> Mircea Eliade, *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*, trans. Willard R. Trask (New York: Harvest, 1987).

dengan memberikan sugesti bahwa individu memiliki kekuatan untuk mengubah dan meningkatkan diri mereka sendiri dan dunia sekitar. Proses yang kedua adalah bahwa agama dapat mendorong tindakan dengan menghadirkan nilai-nilai tertentu. Diantara nilai-nilai yang ada, terdapat nilai agama tertentu yang selama ini dianggap mempengaruhi tindakan kekerasan atau perdamaian, yaitu *Selflessness* (tidak mementingkan diri sendiri)<sup>65</sup> dan *self-sacrifice* (pengorbanan diri).<sup>66</sup> Kedua nilai ini digambarkan oleh sistem makna agama sebagai sarana untuk menunjukkan kualitas dan level keimanan seseorang. Nilai-nilai tersebut mampu mengarahkan dan mendorong seseorang untuk mengorbankan kebutuhan yang lain dan bahkan mengorbankan kehidupan mereka sendiri, baik untuk tindakan konflik semisal perang agama atau tindakan pembunuhan, bunuh diri, dan pengeboman, maupun tindakan perdamaian sehingga mampu menimbulkan cinta kasih yang meluap dan tanpa batas dan juga tanpa pamrih.

Proses yang ketiga adalah bahwa agama dapat memotivasi tindakan konflik dan perdamaian dengan menawarkan sistem ganjaran dan hukuman. Dalam konteks ini, ganjaran akan diberikan kepada orang-orang yang benar dan saleh, sedangkan hukuman akan ditimpakan kepada orang-orang yang bersalah atau berdosa. Rasanya cukup sulit untuk menemukan sistem makna yang lain yang mampu menyaingi sistem makna agama dalam konteks ini. Imbalan spiritual menjadi daya tarik tak terbantahkan, semisal ketenangan batin dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, dan juga pengalaman kedekatan dengan kekuatan spiritual yang agung. Sementara itu di sisi yang lain, hukuman menjadi momok penderitaan secara emosional dan

---

<sup>65</sup> Brick Johnstone et al., "Selflessness as a Foundation of Spiritual Transcendence - Perspectives from the Neurosciences and Religious Studies," *The International Journal for the Psychology of Religion*, 2015.

<sup>66</sup> Ariel Glucklich, "Self and Sacrifice: A Phenomenological Psychology of Sacred Pain," *The Harvard Theological Review* 92, no. 4 (1999).

fisik, semisal kekekalan di neraka.<sup>67</sup> Konsep surga dan neraka ini memang bisa dijadikan sumber daya bagi individu dan komunitas itu sendiri dengan kesadaran yang mereka miliki, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan juga dengan cara yang manipulatif dan abortif, terutama oleh para pemimpin politik dan teroris untuk membenarkan pandangan dunia mereka. Janji-janji dramatis ini memfasilitasi baik dukungan untuk status quo atau berbagai jenis tindakan perubahan. Proses yang keempat adalah bahwa agama dapat pula mendorong tindakan secara tidak langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia di luar hal-hal yang spiritual, seperti pencarian makna di dunia, konsep diri yang positif, identitas kelompok yang melindungi, pencarian tempat berlindung, penjelajahan komunitas, keintiman, konsensus sosial, pencarian kebahagiaan, optimisme, ketenangan, dan ketegasan.

Untuk lebih menjelaskan kekuatan motivasi keagamaan dan non-keagamaan bagi tindakan, maka contoh dari para teroris kiranya cukup mendiskripsikan betapa sistem makna agama dapat memotivasi orang untuk melakukan tindakan kekerasan yang sangat intens. Hampir semua teroris mengaku oleh tujuan agama dan spiritual. Mereka menekankan bahwa tujuan mereka berkontribusi pada tujuan yang baik untuk memurnikan dunia, dan menjadi pribadi yang saleh dengan mengubah diri dari kebingungan spiritual menjadi fokus pada tindakan, dan mengubah diri dari egois menjadi altruistik. Beberapa orang dari teroris itu menyebutkan tujuan keagamaan, menyebutkan penghargaan surgawi, dan merasa semakin dekat dengan Tuhan. Meski demikian, banyak pula yang menggabungkan tujuan spiritual dengan tujuan politik, seperti memperoleh kekuasaan politik, memberlakukan hukum agama, atau memperluas wilayah.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Jonathan L. Kvanvig, "Resurrection, Heaven, and Hell," in *A Companion to Philosophy of Religion*, ed. Charles Taliaferro, Paul Draper, and Philip L. Quinn (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2010).

<sup>68</sup> Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*.

Selain motivasi yang berbalut religiusitas sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat pula motivasi yang sifatnya lebih emosional-psikologis. Motivasi ini lebih dekat kepada wacana penyederhanaan makna hidup, semisal kebaikan dan kejahatan, atau korban dan penindas. Hal-hal tersebut didefinisikan secara gamblang sehingga jalan keluar dari dilema dan kesulitan hidup adalah dengan menjadi martir. Selain itu, terdapat pula berbagai ragam ekspresi seperti kemarahan, pencapaian status, ketenaran, rasa identitas, kebanggaan, kekuatan, persahabatan, dan petualangan.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa kekuatan makna agama dapat memotivasi individu untuk melakukan tindakan yang intens dengan mendorong rasa efikasi diri untuk membawa perubahan diri serta dunia. Hal tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada nilai-nilai seperti tidak mementingkan diri sendiri dan pengorbanan diri, serta dengan menawarkan hukuman dan ganjaran, baik yang bersifat spiritual maupun duniawi. Proses-proses ini pada akhirnya dapat memfasilitasi tindakan apa pun. Karenai itulah, nampaknya pembahasan khusus tentang sistem makna agama yang memfasilitasi tindakan kekerasan diperlukan, mengingat eskalasi konflik yang berbalut agama kerap terjadi dengan tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Ketika diinternalisasikan sebagai sistem makna individu ataupun kolektif, agama dapat memfasilitasi tindakan kekerasan dengan berbagai cara.

Cara yang pertama adalah bahwa agama tidak menutup kemungkinan mengandung nilai dan gagasan yang dapat memfasilitasi prasangka.<sup>69</sup> Maka dengan demikian bisa mengarah kepada diskriminasi dan kekerasan dengan mendorong kesadaran bagi pemeluknya menjadi bagian dari komunitas yang dipilih dan diistimewakan. Dengan status yang demikian, maka ada penekanan pada perbedaan ketika dibandingkan dengan orang-orang di luar komunitas agama yang bersangkutan. Agama mencakup tiga ajakan

---

<sup>69</sup> Bruce Hunsberger, "Religion, Meaning, and Prejudice," *Journal of Social Issues* 61, no. 4 (2005).



dasar kefanatikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, keyakinan bahwa agama seseorang mengajarkan kebenaran mutlak dan eksklusif dapat mengarahkan pada suasana merendahkan ajaran agama dan rumusan filosofi yang lain dengan pernyataan bahwa ajaran yang lain mengancam keselamatan manusia; Kedua, doktrin sebagai umat atau kaum terpilih dan pilihan. Hal ini dapat menyiratkan inferioritas orang lain karena ditolak oleh Tuhan; Ketiga, pandangan teokrasi yang meyakini bahwa seseorang memerintah dengan hak Ilahi yang tidak dapat diganggu gugat oleh hukum manusia.

Cara yang kedua bagi agama sebagai fasilitator tindakan kekerasan adalah penodaan. Yang dimaksud dengan penodaan dalam konteks ini adalah bahwa sesuatu yang dianggap suci dan sakral ternodai dengan beragam cara, seperti dihilangkan, dihancurkan, atau dilanggar. Efek samping yang negatif dari penodaan itulah yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap melakukan penodaan terhadap sesuatu yang disakralkan tersebut. Efek samping negatif itu antara lain adalah perasaan kesal, marah, terteka, gugup dan takut.

Cara yang ketiga adalah bahwa agama sebagai sistem makna yang unik yang dapat memberi makna pada setiap aspek kehidupan manusia seringkali menjadi inti dari identitas individu dan kelompok. Oleh karena itu, keyakinan agama yang tampaknya mengancam sistem makna keagamaan seseorang atau ancaman ideologis lainnya terhadap agamanya sering dianggap sebagai serangan yang sangat berbahaya terhadap identitas pribadi dan komunal. Ancaman yang dirasakan seperti itu sering memicu reaksi kekerasan diantara para penganut agama yang ditantang, yang menganggap diri mereka tidak hanya membela agama mereka tetapi juga identitas pribadi dan kolektif mereka yang paling penting.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Christina M. Gschwandtner, "Philosophical Reflections on the Shaping of Identity in Fundamentalist Religious Communities," *International Journal of Philosophical Studies* 24, no. 5 (2016).

Cara yang keempat adalah bahwa aturan dan standar perilaku yang biasanya diberikan oleh agama sebagai sistem makna seringkali menghasilkan perilaku yang cenderung memicu konflik. Hal ini bisa terjadi dalam dua varian: Pertama, tindakan yang ditentukan mungkin secara inheren mengandung konflik, seperti dalam kasus seruan agama untuk perang suci; Kedua, tindakan yang diperlukan dapat dianggap sebagai ancaman oleh kelompok lain, yang berarti memaksa anggota kelompok kedua untuk mempertahankan keyakinan mereka. Gagasan misionari atau dakwah yang merupakan upaya untuk mengubah sistem makna keagamaan anggota kelompok luar, pada dasarnya tidak memerlukan kekerasan, tetapi ketika dipaksakan, maka ia bisa berakibat kepada kekerasan yang ekstrem dan bahkan massif. Hal ini telah terjadi dalam sepanjang sejarah peradaban manusia dan berpotensi untuk timbul lagi di masa yang akan datang.

Cara yang kelima adalah bahwa agama dapat memfasilitasi kekerasan dengan menawarkan mitos atau cerita yang tampaknya sederhana dan kuat yang merangkum situasi yang sangat rumit dengan cara yang dapat dikelola secara kognitif dalam sistem makna individu atau kolektif. Mitos semacam itu adalah sarana penting untuk mengatur dunia dan memahami sejarah, asal-usul, dan bahkan masa depan seseorang. Tetapi, mitos-mitos semacam itu sering kali menekankan perbedaan terhadap orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang yang memiliki pandangan agama yang berbeda dengan cara yang merendahkan. Pemanggilan simbol dan cerita-cerita agama dapat dengan mudah memperburuk ketegangan dan mendorong iklim sosial yang mengarah kepada kerusuhan, kekerasan massa, pemukulan dan pembunuhan. Hal ini sering dirujuk dengan istilah kejahatan kebencian. Contoh terkenal dari cerita agama ini adalah kisah tentang keluarga Ibrahim sebagai sebuah cerita yang menjadi bagian dari kehidupan ratusan juta orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Cerita tersebut membahas persaingan antara dua putra Ibrahim, yaitu Ishak yang digambarkan sebagai kunci garis keturunan Yahudi, dan Ismail yang digambarkan sebagai kunci garis keturunan Islam Arab, serta

antara ibu mereka. Maka umat saling bersaing memperebutkan kategori musyrik dan shahih, dan mereka bersaing memperebutkan cinta sang ayah.<sup>71</sup>

Cara yang keenam adalah bahwa agama dapat memberikan sumber dan rujukan sebagai legitimasi dari setiap tindakan, bahkan yang paling kejam sekalipun, baik dalam sistem makna individu maupun kolektif. Hal ini dikarenakan kekuatan yang dimiliki agama yang membenarkan secara moral setiap tujuan atau tindakan melalui proses pensakralan. Gagasan ini diungkapkan dalam deskripsi persepsi diri teroris yang berbalut agama. Mereka menganggap bahwa mereka benar, tidak hanya secara politik tetapi juga secara moral. Mereka percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Dengan demikian, agama dapat memberikan dasar yang sangat kuat untuk proses pembenaran moral semisal praktek dehumanisasi.

Cara lain yang menjustifikasi kebenaran secara moral dari kekerasan yang berbalut agama adalah dengan menggambarkannya sebagai respons terhadap situasi darurat yang mendesak. Kondisi seperti situasi politik dan ekonomi yang sulit atau rasa ancaman terhadap nilai-nilai agama atau kebebasan beragama digunakan oleh individu dan komunitas beragama untuk mendefinisikan kekerasan sebagai sesuatu yang sah secara moral. Para fundamentalis teroris itu percaya bahwa mereka hidup di masa krisis, bahaya, atau malapetaka yang luar biasa. Sehingga mereka menunggu waktu yang telah dijanjikan, semisal kembalinya Imam tersembunyi, kedatangan Mesias, kedatangan kedua Kristus, dan seterusnya. Karena itulah, waktu yang khusus tersebut membuat orang-orang beriman ini mengharuskan diri untuk membuat pengecualian, semisal menyimpang dari aturan umum tradisi dan untuk menundukkan semua hukum lain selain yang diyakininya.

Dengan demikian, kekerasan dan pembunuhan agama sering didefinisikan ulang melalui reinterpretasi teologis sebagai perang suci

---

<sup>71</sup> Marc Gopin, *Holy War, Holy Peace: How Religion Can Bring Peace to the Middle East* (New York: Oxford University Press, 2002), 7.

dan peristiwa yang sakral, yang patut dan layak untuk diperjuangkan atas nama Tuhan dan kehormatannya. Pertempuran-pertempuran ini tidak dipandang sebagai kekerasan di dalam sistem makna keagamaan bagi mereka yang berpartisipasi di dalamnya dan bagi mereka yang mendukungnya. Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut dipandang sebagai pertempuran agama untuk keadilan yang bertujuan untuk membuat dunia yang lebih damai dan adil. Dalam pandangan mereka, hal tersebut dianggap sebagai pertempuran dalam rangka mendidik orang-orang yang telah hidup bergelimang dosa, untuk membawa kebenaran dan penebusan, dan untuk mengilhami kebenaran dan keimanan, yang pada akhirnya nanti akan disyukuri oleh musuh yang jatuh dan kalah.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dinyatakan bahwa keyakinan dasar yang membentuk sistem makna keagamaan individu dapat mendorong proses dehumanisasi, yang didefinisikan sebagai pelucutan individu dari kualitas manusianya dengan mendefinisikan mereka sebagai submanusia atau bahkan sebagai setan atau jahat. Beberapa contoh dari definisi tersebut adalah dehumanisasi orang Yahudi dalam pandangan anti-Semitisme Kristen dan Muslim; penggambaran oleh beberapa ekstremis Muslim tentang peradaban Barat sebagai musuh Tuhan atau sebagai tentara salib, dan Amerika Serikat dan Israel masing-masing sebagai 'setan besar' dan 'setan kecil'; Pandangan supremasi kulit putih Kristen tentang orang Yahudi dan non-kulit putih sebagai 'anak-anak setan yang sebenarnya; dehumanisasi Muslim oleh tentara salib Kristen. Masih banyak lagi contoh yang bisa disebutkan tentang proses dehumanisasi yang bernuansa agama ini.

Selain sebagai fasilitator tindakan konflik, kebencian, diskriminasi dan kekerasan, sistem makna agama juga dapat memfasilitasi tindakan perdamaian. Agama memiliki potensi yang kuat dan sumber daya yang melimpah dalam upaya resolusi konflik dan perdamaian. Penjabaran

---

<sup>72</sup> Charles Selengut, *Sacred Fury: Understanding Religious Violence* (Lanham: Altamira Press, 2003), 20.

berikut ini menjelaskan proses-proses yang terjadi pada sistem makna agama dalam kaitannya dengan hal tersebut. Proses yang pertama adalah bahwa sistem makna agama seringkali memuat nilai-nilai yang dapat mendorong bahkan menegaskan urgensi perdamaian. Diantaranya adalah:

- a) Kesucian hidup, yang terkadang didukung oleh gagasan keagamaan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan;
- b) Cinta dan kasih sayang tanpa pamrih, yang dalam beberapa sistem agama memuat gagasan bahwa seseorang perlu mencintai atau setidaknya merawat musuh;
- c) Empati, yang dapat memfasilitasi pemahaman tentang rasa sakit dan trauma yang dialami orang lain, termasuk musuh;
- d) Pengampunan, yang memfasilitasi pemberian maaf kepada orang lain, bahkan kepada musuh sekalipun;
- e) Kerendahan hati, pemeriksaan diri dan kritik diri, yang dapat memfasilitasi permohonan maaf dan kompensasi atas kerugian yang dilakukan, sehingga memfasilitasi rekonsiliasi antar kelompok;
- f) Disiplin agama, yaitu gagasan keagamaan tentang pengendalian diri yang dapat memfasilitasi pengendalian diri dalam situasi kekerasan;
- g) Gagasan saling ketergantungan, yaitu gagasan bahwa tindakan satu individu atau bangsa dapat mempengaruhi seluruh dunia;
- h) Mesianisme, yaitu visi masyarakat yang lebih adil yang mungkin dalam keadaan tertentu mendorong kerinduan dan kehendak tentang dunia yang lebih damai;
- i) Dorongan eksplisit non-kekerasan, dan seruan untuk perdamaian dan pasifisme (yang sering diasosiasikan dengan konsep kritis dari kehidupan batin dan spiritual dalam tradisi Timur Jainisme, Buddha, dan Hindu).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Gopin, *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking*.

Proses yang kedua adalah bahwa sistem makna agama dapat mencakup mitos dan cerita-cerita yang kuat dengan cara yang dapat memfasilitasi tindakan perdamaian. Misalnya, cerita keagamaan tentang Abrahamik dapat dibingkai ulang dengan menekankan hubungan keluarga antara orang Yahudi dan Muslim. Meskipun mungkin sebagai keluarga yang agak terganggu, tetapi tetaplah sebuah keluarga. Beberapa catatan dari partisipan agama Yahudi dan Muslim dalam upaya resolusi konflik di Timur Tengah sering menyebut satu sama lain sebagai saudara atau sepupu. Hal tersebut mencerminkan kerinduan akan kesatuan keluarga Abrahamik.

Proses yang ketiga adalah bahwa sistem makna agama dapat memberikan beberapa aturan dan standar perilaku yang dapat memfasilitasi hubungan damai dengan anggota dari kelompok luar. Misalnya tentang penghormatan kepada tetangga yang berdasarkan standar perilaku keagamaan dilakukan dengan tidak memandang perbedaan apapun. Penghormatan kepada tetangga mesti dilakukan meskipun kepada orang yang berbeda agama.

Proses yang keempat adalah bahwa sistem makna dapat meningkatkan tindakan perdamaian dengan menetapkan ritual khusus, berupa pengampunan dan rekonsiliasi yang dapat diterapkan dalam konteks antarpribadi atau antarkelompok. Proses-proses ritual tersebut memiliki kekuatan dalam sistem makna agama untuk membalikkan dan mengubah kerusakan, yang pastinya memiliki efek psikologis yang signifikan pada orang-orang yang beriman.

Seluruh eksplorasi penjelasan yang terjabarkan di atas menggambarkan, sekali lagi, tentang agama sebagai pedang bermata dua yang dapat mendorong dan mencegah tujuan perubahan, dan dapat memfasilitasi tindakan kekerasan dan perdamaian sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sistem makna untuk menjelaskan hubungan yang rumit dan kompleks antara agama dan perubahan, penjelasan di atas menyiratkan bahwa tujuan perubahan dan cara untuk mencapainya dapat ditafsirkan secara berbeda dalam sistem makna agama yang berbeda. Penjelasan itu juga

menyiratkan sekaligus menekankan tentang pandangan agama sebagai sistem makna yang kompleks, yang cenderung memasukkan berbagai pesan dan warga agama yang tampaknya kontradiktif mengenai perubahan dan cara yang tepat untuk mencapainya. Dalam menghadapi hal tersebut para pemimpin agama dan penganutnya memiliki fleksibilitas dalam memilih pesan-pesan agama tertentu dibandingkan yang lain, misalnya mereka lebih suka pesan yang mendukung perubahan versus status quo, tindakan kekerasan atau perdamaian.

Pandangan tentang sistem makna keagamaan individu dan kolektif sebagai sesuatu yang kompleks dan lunak secara implisit mendasari berbagai diskusi tentang perjuangan terus-menerus antara garis keras dan moderat. Misalnya dalam Islam, perjuangan itu adalah demi masa depan iman dan hubungannya dengan Barat. Dalam hal ini, Tariq Ramadan menegaskan bahwa tidak ada dalam Islam yang bertentangan dengan modernitas dan dengan tegas dapat dinyatakan bahwa para pemikir dan ulama Muslim yang menentang gagasan ini dan gagasan perubahan dan evolusi yang dicakupnya sering mengacaukannya dengan model yang ada saat ini di Barat. Mereka, dalam pandangan Tariq, mengacaukan modernitas dengan Westernisasi.<sup>74</sup>

Karena itulah, sangat penting untuk menyadari baik potensi sistem makna agama untuk diarahkan pada berbagai tujuan dan ke arah yang lebih damai, maupun kecenderungan sistem keagamaan untuk menolak perubahan. Potensi resistensi ini menunjukkan bahwa upaya intensif di tingkat nasional dan internasional akan diperlukan untuk memotivasi para pemimpin agama dan komunitas yang kejam dan teroris agama untuk mengarahkan kembali sistem makna agama mereka dengan memilih tujuan dan sarana yang lebih damai dalam sistem agama mereka. Kekerasan agama dan terorisme telah digambarkan sebagai sesuatu yang sangat merusak dan berbahaya bagi peradaban modern dan seluruh dunia. Fakta bahwa sejarah abad ini

---

<sup>74</sup> Tariq Ramadan, *Islam, the West and the Challenges of Modernity* (UK: The Islamic Foundation, 2001), 307.



dimulai dengan agama-agama yang menunjukkan potensi destruktifnya dalam memfasilitasi konflik dan terorisme di seluruh dunia tidak akan menjadikannya abad yang unik. Maka upaya kolaboratif dari para peneliti, akademisi, tokoh-tokoh politik dan agama serta masyarakat sangat urgen dan diperlukan untuk mengungkap dan menyebarluaskan potensi unik yang dimiliki oleh agama untuk memfasilitasi resolusi konflik dan perdamaian dunia.

## 2. Deklarasi Perdamaian Dunia

Tampaknya tidak ada pihak mana pun yang menampik pentingnya peran agama bagi tatanan kehidupan dunia yang lebih baik dan lebih damai. Para pemeluk agama, melalui para pemimpinnya, berupaya bergandengan tangan mendeklarasikan perdamaian dunia. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama tersebut sejatinya adalah bentuk dukungan terhadap berbagai deklarasi perdamaian dunia yang juga telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terikat secara formal dengan tradisi keagamaan tertentu. Berbagai deklarasi yang tercantum dalam sub-bab ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap potensi konflik dan sekaligus perdamaian dunia itu telah memantik perhatian berbagai kalangan.

- a) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

**DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA  
YANG DITETAPKAN OLEH RESOLUSI SIDANG UMUM  
PBB 217A (III)  
TANGGAL 10 DESEMBER 1948**

**1**  
Mukadimah  
Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga



manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut,

Maka dengan ini, Majelis Umum Memproklamasikan

**Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara,

dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

### **Pasal 1**

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

### **Pasal 2**

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

### **Pasal 3**

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

**Pasal 4**

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

**Pasal 5**

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

**Pasal 6**

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

**Pasal 7**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

**Pasal 8**

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

**Pasal 9**

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

**Pasal 10**

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam

menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

### **Pasal 11**

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

### **Pasal 12**

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

### **Pasal 13**

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

### **Pasal 14**

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan

politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

#### **Pasal 18**

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.



**Pasal 19**

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

**Pasal 20**

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

**Pasal 21**

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.

(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

**Pasal 22**

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

**Pasal 23**

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

**Pasal 24**

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

**Pasal 25**

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

**Pasal 26**

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah

dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

### **Pasal 27**

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

### **Pasal 28**

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

### **Pasal 29**

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang



ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### **Pasal 30**

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

#### f) *The Bangkok Declaration* (Deklarasi Bangkok)

Para Menteri dan perwakilan Negara-negara Asia, bertemu di Bangkok dari 29 Maret sampai 2 April 1993, sesuai dengan resolusi Sidang Umum 46/116 tanggal 17 Desember 1991 dalam rangka persiapan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia.

Mengadopsi Deklarasi ini yang dikenal sebagai *The Bangkok Declaration*, yang berisi aspirasi dan komitmen kawasan Asia:

Menekankan pentingnya Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, yang memberikan kesempatan yang tak ternilai untuk meninjau semua aspek hak asasi manusia dan memastikan pendekatan yang adil dan seimbang padanya,

Mengakui kontribusi yang dapat diberikan negara-negara Asia pada Konferensi Dunia dengan budaya dan tradisinya yang beragam dan kaya,

Menyambut perhatian yang semakin meningkat terhadap hak asasi manusia di komunitas internasional,

Meneguhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Mengingat bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, persoalan tentang kepatuhan universal dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental telah ditempatkan dengan benar dalam konteks kerja sama internasional,

Memperhatikan kemajuan yang dicapai dalam kodifikasi instrumen hak asasi manusia, dan dalam pembentukan mekanisme hak asasi manusia internasional, sambil mengungkapkan keprihatinan bahwa mekanisme ini terutama berkaitan dengan satu kategori hak,

Menekankan bahwa ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional khususnya Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, oleh semua Negara harus didorong lebih lanjut,

Menegakkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas teritorial dan non-campur tangan di udara internal Negara,

Menekankan universalitas, objektivitas dan non-selektivitas semua hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menghindari penerapan standar ganda dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan politisasinya,

Menyadari bahwa dukungan terhadap hak asasi manusia harus didorong oleh kerja sama dan konsensus, dan bukan melalui konfrontasi dan penerapan nilai-nilai yang tidak sesuai,

Mengulangi kesalingtergantungan dan ketidakterpisahan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, dan keterkaitan yang melekat antara pembangunan, demokrasi, penikmatan universal semua hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang harus ditangani secara terpadu dan seimbang,

Mengingat bahwa Deklarasi Hak atas Pembangunan telah mengakui hak atas pembangunan sebagai hak universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental,

Menekankan bahwa upaya untuk bergerak menuju penciptaan norma-norma hak asasi manusia internasional yang seragam harus berjalan seiring dengan upaya untuk bekerja menuju tatanan ekonomi dunia yang adil dan fair,

Meyakini bahwa kemajuan ekonomi dan sosial memfasilitasi kecenderungan yang berkembang menuju demokrasi dan dorongan dan perlindungan hak asasi manusia,

Menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia di tingkat nasional, regional dan internasional serta perlunya kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia,

1. Menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta realisasi penuh dari semua hak asasi manusia di seluruh dunia;

2. Menggarisbawahi kebutuhan esensial untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pemenuhan hak asasi manusia yang efektif di tingkat nasional dan internasional;
3. Menekankan kebutuhan mendesak untuk mendemokratisasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghilangkan selektivitas dan meningkatkan prosedur dan mekanisme untuk memperkuat kerja sama internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, dan memastikan pendekatan yang positif, seimbang dan non-konfrontatif dalam menangani dan mewujudkan semua aspek hak asasi manusia;
4. Mencegah segala upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai persyaratan untuk memberikan bantuan pembangunan;
5. Menekankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial serta tidak adanya campur tangan dalam urusan internal Negara, (dan tidak digunakannya hak asasi manusia sebagai instrumen tekanan politik);
6. Menegaskan kembali bahwa semua negara, baik besar maupun kecil, memiliki hak untuk menentukan sistem politik mereka, mengontrol dan secara bebas menggunakan sumber daya mereka, dan secara bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka;
7. Menekankan universalitas, objektivitas dan non-selektivitas semua hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menghindari penerapan standar ganda dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan politisasinya, dan bahwa tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dapat dibenarkan;
8. Mengakui bahwa meskipun hak asasi manusia bersifat universal, hak-hak tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks proses penetapan norma internasional yang dinamis dan berkembang dengan mengingat pentingnya kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama;
9. Mengakui lebih lanjut bahwa Negara memiliki tanggung jawab utama untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

melalui infrastruktur dan mekanisme yang sesuai, dan juga mengakui bahwa pemulihan harus dicari dan diberikan terutama melalui mekanisme dan prosedur tersebut;

10. Menegaskan saling ketergantungan dan ketidakterpisahan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dan kebutuhan untuk memberikan penekanan yang sama pada semua kategori hak asasi manusia;
11. Menekankan pentingnya menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental kelompok rentan seperti etnis, nasional, ras, agama dan bahasa minoritas, pekerja migran, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pengungsian dan pengungsi;
12. Menegaskan kembali bahwa penentuan nasib sendiri adalah prinsip hukum internasional dan hak universal yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi orang-orang yang berada di bawah dominasi asing dan kolonial atau pendudukan asing, yang dengannya mereka dapat dengan bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka secara bebas, dan bahwa penolakannya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia;
13. Menekankan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri berlaku untuk orang-orang di bawah dominasi asing dan kolonial atau pendudukan asing, dan tidak boleh digunakan untuk merusak integritas teritorial, nasionalisme, kolonialisme apartheid, dan kemerdekaan politik negara;
14. Mengungkapkan keprihatinan atas semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk manifestasi diskriminasi rasial, rasisme, kolonialisme apartheid, agresi dan pendudukan asing, dan pembentukan pemukiman ilegal di wilayah pendudukan, serta kebangkitan baru-baru ini neo-nazisme, xenofobia dan pembersihan etnis;
15. Menggarisbawahi perlunya mengambil langkah-langkah internasional yang efektif untuk menjamin dan memantau pelaksanaan standar hak asasi manusia dan perlindungan efektif

dan hukum bagi orang-orang yang berada di bawah pendudukan asing;

16. Sangat mendukung mereka untuk perjuangan sah rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasional dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, dan menuntut segera diakhirinya pelanggaran berat hak asasi manusia di Palestina, Golan dan wilayah Arab yang diduduki lainnya termasuk Yerusalem ;
17. Hak atas pembangunan, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, sebagai hak universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui kerjasama internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembentukan mekanisme pemantauan dan penciptaan kondisi internasional yang penting untuk realisasi hak tersebut;
18. Mengakui bahwa hambatan utama realisasi hak atas pembangunan terletak pada tingkat makroekonomi internasional, sebagaimana tercermin dalam jurang yang semakin lebar antara Utara dan Selatan, si kaya dan si miskin;
19. Menegaskan bahwa kemiskinan adalah salah satu hambatan utama yang menghalangi penikmatan penuh hak asasi manusia;
20. Menegaskan pula perlunya mengembangkan hak umat manusia tentang lingkungan yang bersih, aman dan sehat;
21. Memperhatikan bahwa terorisme, dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang dibedakan dari perjuangan sah rakyat di bawah dominasi kolonial atau asing atau pendudukan asing, telah muncul sebagai salah satu ancaman paling berbahaya bagi integritas teritorial Negara dan menggoyahkan pemerintah yang dibentuk secara sah, dan bahwa itu harus dikutuk dengan tegas oleh komunitas internasional;
22. Menegaskan komitmen kuat mereka terhadap pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan melalui jaminan partisipasi yang setara dalam masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya

- masyarakat, dan pemberantasan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan;
23. Mengakui hak anak untuk menikmati perlindungan khusus dan menikmati kesempatan dan fasilitas untuk berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial secara sehat dan normal serta dalam kondisi bebas dan bermartabat;
  24. Menyambut peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga nasional dalam pemajuan hak asasi manusia yang tulus dan konstruktif dan percaya bahwa konseptualisasi dan pembentukan lembaga pada akhirnya paling baik diserahkan kepada negara untuk memutuskan;
  25. Mengakui pentingnya kerjasama dan dialog antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah atas dasar nilai-nilai bersama serta saling menghormati dan pemahaman dalam pemenuhan hak asasi manusia, dan mendorong organisasi non-pemerintah dalam status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial untuk berkontribusi secara positif pada proses ini sesuai dengan resolusi Dewan 1296 (XLIV);
  26. Menegaskan kembali kebutuhan untuk menjajaki kemungkinan pembentukan tatanan regional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia di Asia;
  27. Menegaskan kembali perlunya mencari cara untuk menghasilkan kerjasama internasional dan dukungan keuangan untuk pendidikan dan pelatihan di bidang hak asasi manusia di tingkat nasional dan untuk pembentukan infrastruktur nasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia jika diminta oleh Negara;
  28. Menekankan perlunya merasionalisasi mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya guna memastikan penghindaran duplikasi pekerjaan yang ada antara badan-badan perjanjian, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dan

- Komisi Hak Asasi Manusia, serta kebutuhan untuk menghindari multiplisitas mekanisme paralel;
29. Menekankan pentingnya memperkuat Pusat Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkannya menyediakan berbagai layanan konsultasi dan program bantuan teknis dalam mempromosikan hak asasi manusia kepada negara yang meminta secara tepat waktu dan efektif, serta untuk memungkinkannya mendanai secara memadai kegiatan lain di bidang hak asasi manusia yang disahkan oleh badan-badan yang kompeten; di bidang hak asasi manusia yang disahkan oleh badan yang berwenang;
  30. Menyerukan untuk meningkatkan representasi negara berkembang di Pusat Hak Asasi Manusia.
- b) *Toward a Declaration of a Global Ethic* (Menuju Deklarasi Etika Global)

### **MENUJU DEKLARASI ETIKA GLOBAL**

Deklarasi Awal dicetak di bawah ini. Prinsip-Prinsip tersebut ditulis sebagai penjelasan dari Deklarasi. Saat Anda membaca, harap diingat bahwa ini adalah dokumen yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan yang bisa salah. Ini adalah upaya untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip, yang umum dalam pedoman kuno untuk perilaku manusia yang ditemukan dalam ajaran semua agama di dunia, yang relevan untuk hari ini dan waktu yang akan datang. Pertimbangkanlah kata-katanya dari sudut pandang Anda sendiri, dengan mengingat bimbingan yang diberikan kepada Anda oleh orang-orang bijak dari tradisi Anda, apa pun itu.



## DEKLARASI ETIKA GLOBAL

Dunia sedang menderita. Penderitaan itu begitu menyebar dan mendesak sehingga kita terpaksa menyebutkan wujudnya sehingga kedalaman rasa sakit ini dapat diperjelas.

Kedamaian luput dari kita ... planet sedang dihancurkan ... orang-orang terdekat hidup dalam ketakutan ... perempuan dan laki-laki terasing satu sama lain ... anak-anak mati!

Ini menjijikkan.

Kami mengutuk penyalahgunaan ekosistem bumi.

Kami mengutuk kemiskinan yang mematikan potensi hidup; kelaparan yang melemahkan tubuh manusia, kesenjangan ekonomi yang mengancam begitu banyak keluarga dengan kehancuran.

Kami mengutuk kekacauan sosial bangsa-bangsa; pengabaian terhadap keadilan yang mendorong warga ke pinggir; anarki yang menguasai komunitas kita; dan kematian anak-anak yang gila karena kekerasan. Secara khusus kami mengutuk agresi dan kebencian atas nama agama.

Tapi penderitaan ini tidak perlu terjadi.

Itu tidak perlu karena dasar etika sudah ada. Etika ini menawarkan kemungkinan tatanan individu dan global yang lebih baik, dan membawa individu menjauh dari keputusasaan dan masyarakat menjauh dari kekacauan.

Kami adalah perempuan dan laki-laki yang telah menganut ajaran dan praktik agama dunia:

Kami memastikan bahwa seperangkat nilai inti yang sama ditemukan dalam ajaran agama, dan ini membentuk dasar etika global.

Kami menegaskan bahwa kebenaran ini sudah diketahui, tetapi harus dihayati dalam hati dan tindakan.

Kami menegaskan bahwa ada norma yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat untuk semua bidang kehidupan, untuk keluarga dan komunitas, untuk ras, bangsa, dan agama. Sudah ada pedoman kuno untuk perilaku manusia yang ditemukan dalam ajaran agama-agama dunia dan yang merupakan syarat untuk tatanan dunia yang berkelanjutan.

Kami Menyatakan:

Kami saling bergantung. Masing-masing dari kita bergantung pada kesejahteraan keseluruhan, dan karenanya kita menghormati komunitas makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, dan untuk pelestarian bumi, udara, air, dan tanah.

Kami mengambil tanggung jawab individu untuk semua yang kami lakukan. Semua keputusan, tindakan, dan kegagalan kita untuk bertindak memiliki konsekuensi.

Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita. Kami berkomitmen untuk menghormati kehidupan dan martabat, individualitas dan keragaman, sehingga setiap orang diperlakukan secara manusiawi, tanpa terkecuali. Kita harus memiliki kesabaran dan penerimaan. Kita harus bisa memaafkan, belajar dari masa lalu tapi tidak pernah membiarkan diri kita diperbudak oleh kenangan kebencian. Dengan membuka hati kita satu sama lain, kita harus menenggelamkan perbedaan sempit kita untuk kepentingan komunitas dunia, mempraktikkan budaya solidaritas dan keterkaitan.

Kami menganggap umat manusia sebagai keluarga kami. Kita harus berusaha untuk menjadi baik dan murah hati. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga harus melayani orang lain, tidak pernah melupakan anak-anak, orang tua, orang miskin, orang yang menderita, orang cacat, pengungsi, dan orang yang kesepian. Tidak ada orang yang boleh dianggap atau diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, atau dieksploitasi dengan cara apa pun. Harus ada kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak boleh melakukan amoralitas seksual apa pun. Kita harus meninggalkan semua bentuk dominasi atau pelecehan.

Kami berkomitmen pada budaya non-kekerasan, rasa hormat, keadilan, dan perdamaian. Kami tidak akan menindas, melukai, menyiksa, atau membunuh manusia lain, dengan meninggalkan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan.

Kita harus berjuang untuk tatanan sosial dan ekonomi yang adil, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh sebagai manusia. Kita harus berbicara dan bertindak dengan jujur dan dengan belas kasih, berurusan secara adil dengan semua, dan menghindari prasangka dan kebencian. Kita tidak boleh mencuri. Kita harus bergerak melampaui dominasi keserakahan akan kekuasaan, prestise, uang, dan konsumsi guna menciptakan dunia yang adil dan damai.

Bumi tidak dapat diubah menjadi lebih baik kecuali kesadaran individu diubah terlebih dahulu. Kami berjanji untuk meningkatkan kesadaran kami dengan mendisiplinkan pikiran kami, dengan meditasi, dengan doa, atau dengan berpikir positif. Dengan tanpa risiko dan kesiapan untuk berkorban, tidak ada perubahan mendasar dalam situasi kita. Oleh karena itu, kami berkomitmen pada etika global ini, untuk memahami satu sama lain, dan pada cara hidup yang bermanfaat secara sosial, memelihara perdamaian, dan ramah alam.

Kami mengajak semua orang, baik yang beragama maupun tidak, untuk melakukan hal yang sama.

*Disampaikan pada Parlemen Agama-agama Dunia 1993, 4 September 1993, di Chicago, Illinois, Amerika Serikat.*

- c) *A Universal Declaration of a Global Ethic* (Deklarasi Universal Tentang Etika Global)

## **DEKLARASI UNIVERSAL DARI ETIKA GLOBAL**

### **I. ALASAN**

Kami, perempuan dan laki-laki dari berbagai tradisi etika dan agama, berkomitmen pada Deklarasi Universal Etika Global berikut ini. Di sini kita berbicara bukan tentang etika dalam bentuk jamak, yang menyiratkan cukup detail, tetapi tentang etika dalam bentuk tunggal, yaitu, sikap fundamental terhadap yang baik dan yang jahat, dan prinsip-prinsip dasar dan tengah yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Kami membuat komitmen ini tidak terlepas dari perbedaan kami tetapi muncul dari perspektif kami yang berbeda, namun mengakui bahwa dalam tradisi etika dan agama kami yang beragam terdapat keyakinan umum yang membuat kami berbicara menentang semua bentuk ketidakmanusiawian dan untuk kemanusiaan dalam perlakuan kami terhadap diri kami sendiri, satu sama lain dan dunia sekitar kita. Kami menemukan dalam setiap tradisi kami:

- a) alasan untuk mendukung hak asasi manusia universal,
- b) panggilan untuk bekerja demi keadilan dan perdamaian, dan
- c) kepedulian terhadap kelestarian bumi.

Kami menegaskan dan memuji nilai-nilai positif kemanusiaan yang, terkadang sangat lambat, namun semakin meningkat, diterima dan dianjurkan di dunia kita: kebebasan, kesetaraan, demokrasi, pengakuan

saling ketergantungan, komitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Kami juga percaya bahwa kondisi di dunia kita mendorong, bahkan menuntut, kita untuk memperhatikan apa yang memisahkan kita dan berbicara sebagai satu kesatuan tentang hal-hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan penghormatan terhadap bumi. Oleh karena itu kami menganjurkan gerakan menuju tatanan global yang mencerminkan nilai-nilai terbaik yang ditemukan dalam berbagai tradisi kami.

Kami yakin bahwa tatanan global yang adil dapat dibangun hanya di atas etika global yang dengan jelas menyatakan norma dan prinsip yang diakui secara universal, dan bahwa etika semacam itu mengandaikan kesiapan dan niat dari orang-orang untuk bertindak secara adil - yaitu, sebuah gerakan dari hati. Kedua, etika global membutuhkan presentasi yang bijaksana dari prinsip-prinsip yang dianut untuk penyelidikan dan kritik terbuka.

Masing-masing tradisi kami memegang komitmen melebihi apa yang diungkapkan di sini, tetapi kami menemukan bahwa dalam tradisi etika dan agama kami, komunitas dunia sedang dalam proses menemukan elemen-elemen konsensus minimal yang mendasar tentang etika yang meyakinkan bagi semua perempuan dan laki-laki yang berkehendak baik, religius dan non-religius, dan yang akan memberi kita kerangka moral dimana kita dapat berhubungan dengan diri kita sendiri, satu sama lain, dan dunia dengan cara yang adil dan hormat.

Untuk membangun konsensus kemanusiaan yang luas, kami menemukan bahwa penting untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa yang berbasis kemanusiaan, meskipun setiap tradisi agama dan etika juga memiliki bahasanya sendiri terhadap apa yang diungkapkan dalam Deklarasi ini. Lebih jauh lagi, tidak ada tradisi, etik atau religius kami yang terpuaskan dengan nilai minimum, sama pentingnya dengan hal-hal tersebut; alih-alih, dikarenakan manusia terus menerus

melampaui batas, tradisi kami juga memberikan hal-hal maksimal yang harus diperjuangkan. Akibatnya, Deklarasi ini melakukan hal yang sama. Akan tetapi, jelas bahwa hal yang maksimal merupakan cita-cita yang harus diperjuangkan, dan oleh karena itu tidak dapat dikehendaki, jangan sampai kebebasan dan hak esensial orang-orang dilanggar.

## II. PRAANGGAPAN

Sebagai Deklarasi Universal Etika Global, yang kami yakini harus melandasi semua perwujudan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap bumi, dokumen ini menegaskan dan mendukung hak dan tanggung jawab terkait yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Sehubungan dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama, kami yakin ada lima praanggapan umum yang sangat diperlukan untuk etika global:

- a) Setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat dicabut dan tidak dapat diganggu gugat; individu, negara, dan entitas sosial lainnya berkewajiban untuk menghormati dan melindungi martabat setiap orang.
- b) Tidak ada orang atau entitas sosial yang berada di luar lingkup moralitas; setiap orang - individu dan organisasi sosial - berkewajiban untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan.
- c) Manusia diberkahi dengan akal dan hati nurani - tantangan terbesar menjadi manusia adalah bertindak dengan hati-hati; komunitas, negara dan organisasi sosial lainnya berkewajiban untuk melindungi dan mengembangkan kemampuan ini.
- d) Komunitas, negara, dan organisasi sosial lainnya yang berkontribusi pada kebaikan manusia dan dunia memiliki hak untuk hidup dan berkembang; hak ini harus dihormati oleh semua.
- e) Manusia adalah bagian dari alam, tidak terlepas dari alam; perhatian etika melampaui kemanusiaan ke seluruh bumi, dan tentu saja kosmos. Singkatnya: Deklarasi ini, yang merefleksikan

realitas, bukan hanya antroposentris, tetapi kosmo-antroposentris.

### III. ATURAN FUNDAMENTAL

Kami mengusulkan Aturan Emas, yang selama ribuan tahun telah diterapkan dalam banyak tradisi agama dan etika, sebagai prinsip fundamental yang mendasari etika global: "Apa yang tidak ingin Anda lakukan terhadap diri Anda sendiri, jangan lakukan kepada orang lain," atau dalam istilah positif, "Apa yang ingin Anda lakukan untuk diri Anda sendiri, lakukan untuk orang lain." Aturan ini harus berlaku tidak hanya untuk keluarga, teman, komunitas dan bangsanya sendiri, tetapi juga untuk semua individu, keluarga, komunitas, bangsa, seluruh dunia, kosmos.

### IV. PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. Karena kebebasan adalah hakikat menjadi manusia, maka setiap orang bebas untuk menjalankan dan mengembangkan setiap kapasitas, selama tidak melanggar hak orang lain atau menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap benda hidup atau mati. Selain itu, kebebasan manusia harus dijalankan sedemikian rupa untuk meningkatkan kebebasan semua manusia dan menghormati segala sesuatu, benda hidup dan benda mati.
2. Karena martabat mereka yang setara, maka semua manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Selain itu, semua manusia dalam setiap pertemuan dengan orang lain harus berusaha untuk meningkatkan sepenuhnya martabat intrinsik dari semua yang terlibat.
3. Meskipun manusia memiliki nilai intrinsik yang lebih besar dibandingkan non-manusia, semua hal, baik yang hidup maupun yang tidak, memiliki nilai intrinsik semata-mata karena keberadaannya dan, karenanya, harus diperlakukan dengan hormat. Selain itu, semua manusia dalam setiap pertemuan dengan bukan manusia, baik yang hidup maupun yang tidak, harus

berusaha untuk menghormati mereka sepenuhnya dari nilai intrinsiknya.

4. Karena manusia selalu mencari lebih banyak kebenaran, maka mereka berusaha untuk mempersatukan diri mereka sendiri, yaitu, "diri" mereka, dengan apa yang mereka anggap sebagai kebaikan: singkatnya, mereka mencintai. Biasanya, "diri" ini diperluas / dilampaui untuk menyertakan keluarga dan teman mereka sendiri, mencari yang baik untuk mereka. Selain itu, seperti Aturan Emas, "diri" yang mencintai / dicintai ini perlu melanjutkan ekspansi / transendensinya yang alami untuk merangkul komunitas, bangsa, dunia, dan kosmos.
5. Dengan demikian cinta manusia sejati adalah cinta diri yang otentik dan cinta orang lain secara relatif saling terkait sedemikian rupa sehingga pada akhirnya ditarik untuk menjadi semua-inklusif. Sifat cinta yang ekspansif dan inklusif ini harus diakui sebagai prinsip aktif dalam interaksi pribadi dan global.
6. Mereka yang memikul tanggung jawab untuk orang lain wajib membantu mereka yang menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, Aturan Emas menyiratkan: Jika kita berada dalam kesulitan yang serius dimana kita tidak dapat membantu diri kita sendiri, kita ingin mereka yang dapat membantu kita melakukannya, bahkan jika mereka tidak bertanggung jawab atas kita; oleh karena itu kita harus membantu orang lain dalam kesulitan serius yang tidak dapat membantu diri mereka sendiri, meskipun kita tidak bertanggung jawab atas mereka.
7. Karena semua manusia sama-sama berhak untuk menganut agama atau keyakinan mereka - yaitu penjelasan mereka tentang makna hakiki kehidupan dan bagaimana cara hidup yang sesuai - sebagai benar, setiap agama atau kepercayaan manusia harus diberikan kebebasan dan penghormatan yang semestinya.
8. Selain itu, dialog - yaitu, percakapan yang tujuan utamanya adalah belajar dari yang lain - merupakan sarana yang diperlukan di mana perempuan dan laki-laki belajar untuk menghormati yang lain,



tanpa henti untuk memperluas dan memperdalam penjelasan mereka sendiri tentang makna kehidupan, dan untuk mengembangkan sebuah konsensus yang semakin luas dimana laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama di dunia ini dengan cara yang benar-benar manusiawi.

## V. PRINSIP-PRINSIP TENGAH

“Prinsip-Prinsip Etika Tengah” berikut sebenarnya adalah yang mendasari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, yang secara resmi disetujui oleh hampir setiap negara di dunia.

1. *Hak / Tanggung Jawab Hukum:*

Karena semua manusia memiliki martabat yang setara, maka semua harus diperlakukan sama di depan hukum dan diberi perlindungan yang sama. Pada saat yang sama, semua individu dan komunitas harus mengikuti semua hukum yang adil, mematuhi tidak hanya yang tersurat tetapi terutama spiritnya.

2. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Hati Nurani dan Agama atau Keyakinan:*

Karena manusia berpikir, dan oleh karena itu pada dasarnya makhluk yang dapat memutuskan bebas, maka semua memiliki hak atas kebebasan berpikir, berbicara, berhati nurani, dan beragama atau berkeyakinan. Pada saat yang sama, semua manusia harus menggunakan hak kebebasan berpikir, berbicara, berhati nurani dan beragama atau berkeyakinan dengan cara yang menghormati diri mereka sendiri dan semua pihak lain dan berusaha untuk menghasilkan manfaat yang maksimal, dipahami secara luas, untuk diri mereka sendiri dan sesamanya.

3. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Bicara dan Informasi:*

Karena manusia adalah makhluk berpikir yang memiliki kemampuan untuk memahami realitas dan mengungkapkannya, maka semua individu dan komunitas memiliki hak dan tanggung jawab, sejauh mungkin, untuk mempelajari kebenaran dan

mengungkapkannya dengan jujur. Pada saat yang sama setiap orang harus menghindari penyamaran, distorsi, manipulasi orang lain, dan gangguan yang tidak pantas ke dalam privasi pribadi; kebebasan dan tanggung jawab ini terutama berlaku untuk media massa, artis, ilmuwan, politisi, dan pemimpin agama.

4. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Partisipasi dalam Semua Pengambilan Keputusan Yang Mempengaruhi Diri Sendiri atau Orang yang Bertanggung Jawab:*

Karena manusia adalah makhluk yang bebas menentukan keputusan, maka semua orang dewasa memiliki hak untuk bersuara, langsung atau tidak langsung, dalam semua keputusan yang memengaruhi mereka, termasuk partisipasi yang berarti dalam memilih pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka, serta hak akses yang sama untuk semua posisi kepemimpinan yang bakatnya memenuhi syarat untuk mereka. Pada saat yang sama, semua manusia harus berusaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sendiri untuk menghasilkan manfaat yang maksimal, dipahami secara luas, baik untuk diri mereka sendiri maupun sesamanya.

5. *Hak / Tanggung Jawab Terkait Hubungan antara Perempuan dan Laki-Laki:*

Karena perempuan dan laki-laki secara inheren sama dan semua laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan sepenuhnya semua bakat mereka serta kebebasan untuk menikah, dengan hak yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki dalam menjalani atau mengakhiri pernikahan. Pada saat yang sama, semua laki-laki dan perempuan harus bertindak terhadap satu sama lain di luar dan di dalam pernikahan dengan cara yang menghormati martabat hakiki, kesetaraan, kebebasan dan tanggung jawab diri mereka sendiri dan orang lain.

6. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Kepemilikan:*

Karena manusia bebas, jasmani dan sosial, maka semua individu manusia dan komunitas memiliki hak untuk memiliki berbagai macam kepemilikan. Pada saat yang sama, masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga kepemilikan akan ditangani dengan hormat, berjuang untuk menghasilkan manfaat maksimal tidak hanya bagi pemiliknya tetapi juga untuk sesama manusia, serta untuk dunia pada umumnya.

7. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Pekerjaan dan Waktu Luang:*

Demi untuk menjalani kehidupan manusia yang otentik, semua manusia biasanya memiliki pekerjaan yang bermakna dan waktu luang yang rekreatif, maka individu dan komunitas harus berusaha untuk mengatur masyarakat sehingga menyediakan dua dimensi kehidupan manusia yang otentik ini baik untuk diri mereka sendiri maupun semua anggota komunitas mereka. Pada saat yang sama, semua individu memiliki kewajiban untuk bekerja dengan semestinya untuk imbalan jasa mereka, dan, dengan semua komunitas, untuk mengupayakan karya yang lebih kreatif dan rekreasi yang lebih kreatif untuk diri mereka sendiri, komunitas mereka, dan individu serta komunitas lainnya.

8. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Anak dan Pendidikan:*

Pertama-tama, anak-anak tidak bertanggung jawab atas keberadaan mereka atau atas sosialisasi dan pendidikan mereka; tetapi orang tua mereka. Dimana dengan alasan apapun mereka gagal, maka masyarakat luas, kerabat dan masyarakat sipil, memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang paling manusiawi, fisik, mental, moral / spiritual dan sosial, kepada anak-anak.

Karena manusia dapat menjadi manusia yang otentik hanya melalui pendidikan dalam arti luas, dan saat ini semakin dapat berkembang hanya dengan pendidikan yang luas dalam arti formal, maka semua individu dan masyarakat harus berusaha untuk memberikan pendidikan bagi semua anak dan dewasa perempuan

dan laki-laki yang diarahkan kepada pengembangan penuh pribadi manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, peningkatan pemahaman, dialog dan persahabatan di antara semua manusia - terlepas dari perbedaan ras, etnis, agama, kepercayaan, seksual atau perbedaan lainnya - dan penghormatan terhadap bumi.

Pada saat yang sama, semua individu dan komunitas memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara tepat untuk menyediakan sarana yang diperlukan untuk pendidikan ini bagi diri mereka sendiri dan komunitasnya, dan lebih dari itu untuk berusaha memberikan yang sama bagi semua manusia.

9. *Hak / Tanggung Jawab Mengenai Perdamaian:*

Karena perdamaian sebagai ketiadaan kekerasan dan kehadiran keadilan bagi semua manusia adalah syarat yang diperlukan untuk perkembangan lengkap bagi kemanusiaan penuh dari semua manusia, secara individu dan komunal, maka semua individu dan komunitas harus terus berjuang untuk memajukan pertumbuhan perdamaian di semua tingkatan, pribadi, interpersonal, lokal, regional, nasional dan internasional, menegaskan bahwa:

- a) Dasar perdamaian yang diperlukan adalah keadilan bagi semua pihak;
- b) Kekerasan harus dihindari dengan keras, dilakukan hanya ketika ketidakhadirannya akan menyebabkan kejahatan yang lebih besar;
- c) Ketika perdamaian pecah, semua upaya harus diarahkan ke pemulihan yang cepat - atas dasar keadilan yang diperlukan untuk semua.

Pada saat yang sama, harus diakui bahwa perdamaian, seperti halnya kebebasan, adalah nilai positif yang harus terus dikembangkan, dan oleh karena itu semua individu dan komunitas harus melakukan upaya yang diperlukan tidak hanya untuk menghindari kehancurannya tetapi juga untuk memperkuat perkembangan dan pertumbuhannya yang stabil.

#### *10. Hak / Tanggung Jawab Terkait Pelestarian Lingkungan*

Karena benda, hidup dan mati, memiliki nilai intrinsik hanya karena keberadaannya, dan juga karena manusia tidak dapat berkembang sepenuhnya sebagai manusia, atau bahkan bertahan hidup, jika lingkungan rusak parah, maka semua individu dan komunitas harus menghormati ekosfer di dalamnya. "Kita semua hidup, bergerak dan memiliki keberadaan kita," dan bertindak sedemikian rupa:

- a) Tidak ada, benda hidup atau mati, yang akan dimusnahkan dalam bentuk aslinya kecuali jika digunakan untuk kebaikan yang lebih besar, misalnya, penggunaan tumbuhan / hewan untuk makanan;
- b) Jika memungkinkan, hanya bahan yang dapat diganti yang akan dihancurkan dalam bentuk aslinya.

Pada saat yang sama, semua individu dan komunitas harus selalu waspada untuk melindungi alam semesta kita yang rapuh, terutama dari populasi manusia yang meledak dan kemungkinan teknologi yang meningkat yang mengancamnya dengan cara yang terus berkembang.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Membicarakan tentang agama dalam pusaran konflik dan perdamaian mengandaikan karakter agama yang tampaknya ambigu sebagai sebuah sistem makna dengan karakter yang dapat mewujudkan harapan di satu sisi dan mara bahaya di sisi yang lain. Dengan potensi yang tertanam tersebut, maka hak pilihan manusialah yang menghantarkan agama bisa menuju ke satu arah tertentu atau ke arah lain yang berlawanan. Semua uraian yang telah terelaborasi dalam buku ini menggambarkan tiga pembahasan utama yang secara ringkas dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Agama diantara Konflik dan Perdamaian

Pernyataan awal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa semua ideologi, baik itu buatan manusia atau diyakini terilhami secara ilahiah, memiliki sifat ambigu, meskipun bentuk dari ambiguitas ini mungkin berbeda. Semua ideologi dapat digunakan dan difungsikan untuk melayani kepentingan manusia. Manipulasi politik terhadap agama mungkin adalah cara yang paling sering digunakan atau disalahgunakan pada masa sekarang. Beragam contoh dapat dikemukakan dimana agama digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan dengan cara kekerasan. Dalam hal ini, ekstremis agama tidak berbeda dengan ekstremis ideologis lainnya. Penting pula untuk dipahami bahwa ekstremisme agama sama sekali tidak eksklusif bagi satu agama tertentu saja. Sebagian besar agama dicirikan oleh keragaman pandangan dan kecenderungan yang bervariasi.

Gagasan tentang kemartiran dan pengorbanan diri yang berkaitan dengan dunia ilahiah memberikan motif yang sangat kuat bagi mereka yang merasa tertarik padanya. Pemahaman tentang kekerasan terkait agama dalam artian adegan sakral dan pertunjukan publik, atau sebagai peristiwa sosial dengan aspek

nyata dan simbolik, dapat membantu dalam analisis agama sebagai sumber konflik. Maka sebagian kalangan menyatakan bahwa agama tidak menjadi *subject matter* dari permasalahan, tetapi hal-hal lain di luar itu, meskipun diakui bahwa sebagian bahan baku atau bahan bakar itu ada di sana.

Di kalangan agama, upaya untuk membangun landasan yang sah bagi agama sebagai sumber perdamaian diupayakan terutama dengan menyoroti aspek-aspek kitab suci dan tradisi yang kondusif untuk penilaian positif agama dalam kehidupan publik. *Spirit of universal unity* (Semangat persatuan universal) terdapat di semua tradisi agama. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan selanjutnya menyebarkan elemen-elemen seperti itu dalam tradisi agama apa pun yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian konflik sosial dan politik, dan dengan demikian untuk membangun perdamaian. Hal ini merupakan sebuah tantangan sekaligus latihan bagi para pemeluk agama yang secara aktif terlibat di dalamnya.

Penekanan pada peran keteladanan dari para pemimpin agama sangatlah diperlukan. Hal ini tidak terbatas pada kerja sama dengan kolega dan sejawat dari pemeluk agama yang sama, tetapi juga harus terlihat bekerja sama dengan anggota komunitas agama yang berbeda. Perilaku atau ritual keagamaan juga mengandung potensi yang menjanjikan bagi upaya penegakan dan pemeliharaan perdamaian. Potensi-potensi ritual yang dikenal oleh para pemeluk agama dan tradisi perlu ditelusuri guna meningkatkan martabat dan status manusia. Pengalaman religius juga sangat penting sebagai pondasi dan dalam penyebaran pesan-pesan agama, dan juga sebagai inspirasi yang kuat. Pengalaman tersebut bisa mengambil beragam bentuk, semisal mimpi, ilham, atau pengalaman keajaiban dalam hidup seseorang.

Dengan demikian, membangun budaya damai melalui dialog antaragama telah menjadi elemen penting dalam berbagai prakarsa perdamaian. Upaya-upaya tersebut mencakup penciptaan forum

dialog antar pemimpin agama, atau pemimpin kelompok lokal. Dialog-dialog semacam itu merupakan bentuk keterlibatan sosial berbasis komunitas akar rumput yang dapat membantu menghentikan kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang berbeda. Dialog antaragama adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh kaum beriman yang peduli di sebagian besar tradisi agama saat ini.

Pada akhirnya dapat dinyatakan bahwa agama itu sendiri bukanlah melulu persoalan baik atau buruk. Agama hadir di mana pun dalam semua sisi kehidupan para pemeluknya. Agama adalah sebuah fakta sosial, maka alih-alih diabaikan dan dipinggirkan, ia dapat diubah menjadi manfaat bagi umat manusia dengan mempertimbangkan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang konstruktif. Merenungkan sisi destruktif dari agama tidak mengharuskan seorang analis menjadi seorang yang beragama. Dengan cara yang sama, juga tidak perlu untuk percaya pada doktrin agama apa pun untuk menghargai upaya menyoroti aspek-aspek agama yang dapat dikembangkan sebagai sumber daya yang positif.

## 2. Agama-Agama Dunia sebagai Organ Perdamaian

Saat ini terdapat banyak konflik budaya dan etnis yang jumlahnya terus bertambah, yang karakternya sangat mirip dengan konflik agama, sehingga metode keagamaan untuk menciptakan perdamaian mungkin memiliki dampak yang jauh lebih luas jika diterapkan di luar batas-batas konflik agama yang ketat. Kisah-kisah penuh harapan dan heroik dari penegakan dan pemeliharaan perdamaian antaragama muncul dari individu-individu yang memiliki kombinasi ekspresi religiusitas mereka sendiri yang sangat otentik bersamaan dengan penghormatan tanpa syarat atau cinta kepada orang-orang yang tidak beriman sebagai sesama manusia. Hal ini adalah kombinasi yang relatif jarang ditemui,



tetapi bagaimanapun hal tersebut dapat dipupuk diantara pemeluk agama di seluruh dunia.

Jadi, sangat mungkin bahwa kunci masa depan bukan hanya kecanggihan teologis, meskipun hal tersebut tentu penting, tetapi juga semacam pelatihan emosional. Hal tersebut dapat menghantarkan orang-orang untuk merasa aman dan nyaman dalam keimanan masing-masing, sehingga tidak terancam oleh pihak lain. Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kepercayaan pada konsep Pencerahan, kepercayaan pada pasar, atau kepercayaan pada metode ilmiah dan pentingnya universalitas.

Peran yang dapat dimainkan oleh kaum agamawan dalam rangka penegakan perdamaian telah dibuktikan dengan, misalnya, pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Dunia Milenium Para Pemimpin Agama dan Spiritual (*a Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders*). Forum ini memiliki posisi tersendiri diantara gagasan dan gerakan perdamaian religius yang lain, karena difasilitasi oleh organisasi dunia yang merepresentasikan negara-negara di seluruh dunia, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2000, sekitar dua ribu pemimpin agama dan spiritual terkemuka dunia yang mewakili banyak tradisi kepercayaan, berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dan mengikuti KTT tingkat dunia tersebut.

Semua agama juga memiliki beberapa versi tentang aturan emas, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan sendiri. Setiap individu beragama mesti menyadari bahwa di dunia yang saling bergantung, prinsip-prinsip umum dalam semua agama dan prinsip-prinsip yang diterapkan seseorang pada anggota dari agamanya sendiri, perlu diterapkan tidak hanya pada kelompoknya tersebut, tetapi juga perlu diperlakukan pada kemanusiaan secara umum. Menyadari dan menerapkan hal ini

dalam kehidupan seseorang dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam menciptakan masa depan dunia yang lebih baik.

3. Kompleksitas Sistem Makna Agama bagi Tatanan Dunia

Sebuah pandangan alternatif tentang hubungan antara agama dan perubahan menggambarkan agama sebagai pendorong perubahan di dunia. Seruan agama untuk perubahan dan perbaikan dunia dinyatakan dengan jelas dalam berbagai tradisi keagamaan. Tinjauan dengan pendekatan sistem makna terhadap agama kiranya dapat menjelaskan hubungan yang rumit antara agama dan perubahan. Pendekatan sistem makna menggambarkan agama sebagai sistem makna individu atau kolektif yang mirip dengan sistem lain perihal struktur, kelenturan, dan fungsinya. Namun sistem makna ini unik dan khas karena berpusat pada hal-hal yang dianggap suci. Maka hal-hal berikut perlu untuk diperhatikan, yaitu: perbedaan yang melekat antar kelompok agama; kompleksitas dan kelenturan sistem makna keagamaan; dan proses agama yang dapat memfasilitasi status quo atau aktivitas kekerasan dan perdamaian.

Terdapat beberapa faktor kontekstual yang dapat menjelaskan kelenturan sistem makna agama. Diantaranya adalah tingkat kesesuaian antara tradisi teologis tertentu dan tatanan sosial yang ada; hubungan oposisi antara agama dan negara; kepentingan elit atau oligarki yang menguasai lembaga keagamaan; kepentingan-kepentingan duniawi dan posisi kelas dari individu-individu yang memelopori dan memimpin gerakan keagamaan; pandangan kelompok agama terhadap diri mereka sebagai minoritas tertindas yang membutuhkan perlindungan; kebutuhan rezim pada legitimasi eksternal; dan lain-lain. Satu hal kecil dapat dinyatakan bahwa kelompok agama cenderung berubah dari penantang dan penentang struktur sosial, menjadi penerima dan pendukung ketika kelompok keagamaan tersebut mendapatkan kekayaan dan kapital.

Penjelasan tentang ragam faktor eksternal yang membuat sistem makna agama begitu lentur, setara dengan beragamnya faktor yang bisa bertindak sebagai pemicu kecenderungan pemeluk agama untuk melakukan kekerasan secara ekstrem dan frontal. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah rasa keterasingan, penghinaan, perampasan, dan viktimisasi, baik secara pribadi maupun kolektif; lembaga politik yang tidak efektif lagi atau tidak dapat diakses yang berujung kepada kegagalan memberikan layanan dasar, melindungi hak asasi manusia, atau memerangi ekstremis; klaim atas wilayah dan pergeseran demografis; diskriminasi atas dasar agama; dan dorongan para pemimpin untuk merubah haluan agresi ke kelompok luar. Di samping faktor-faktor tersebut, kemiskinan bisa juga menjadi faktor risiko tersendiri karena teroris biasanya menemukan cara yang kejam untuk memanipulasi dan mempermainkan orang-orang miskin dan bodoh. Revolusi komunikasi, sebagaimana kehadiran media sosial seperti saat ini, dapat pula memperbesar kecenderungan pada kekerasan agama dengan memfasilitasi penyebaran pesan-pesan teroris agama ke seluruh dunia.

Pendekatan sistem makna terhadap kekerasan dan perdamaian agama juga menunjukkan bahwa perbedaan individu dalam hal jenis lain dari variabel kepribadian, seperti keyakinan dasar dan tujuan, dapat mempengaruhi pilihan dari para pimpinan agama dan individu.

Dengan menggunakan pendekatan sistem makna untuk menjelaskan hubungan yang rumit dan kompleks antara agama dan perubahan, maka tujuan perubahan dan cara untuk mencapainya dapat ditafsirkan secara berbeda dalam sistem makna agama yang berbeda. Selain itu, pandangan agama merupakan sistem makna yang kompleks, yang cenderung memasukkan berbagai pesan dan warga agama yang tampaknya kontradiktif mengenai perubahan dan cara yang tepat untuk mencapainya. Dalam menghadapi hal tersebut para pemimpin agama dan

penganutnya memiliki fleksibilitas dalam memilih pesan-pesan agama tertentu dibandingkan yang lain, misalnya mereka lebih suka pesan yang mendukung perubahan versus status quo, tindakan kekerasan atau perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Nimer, Mohammed. "Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding." *Journal of Peace Research* 38, no. 6 (2001).
- Allouni, Tayseer. "A Discussion on the New Crusader Wars: The Unreleased Interview with Usamah Bin Laden," 2001. <https://english.religion.info/2002/07/20/document-the-unreleased-interview-with-usamah-bin-laden/>.
- An-Na'im, Abdllahi Ahmed. "Islamic Fundamentalism and Social Change: Neither the 'End of History' nor a 'Clash of Civilization.'" In *The Freedom to Do God's Will: Religious Fundamentalism and Social Change*, edited by Gerrie ter Haar and James J. Busuttil, 25–48. London: Routledge, 2003.
- Antes, Peter, Armin W. Geertz, and Randi R. Warne, eds. *New Approaches to the Study of Religion: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches*. Vol. 2. Berlin: Water de Gruyter, 2004.
- Appleby, R. Scott. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2000.
- Baldoli, Roberto. "Nonviolence and Religion: Creating a Post-Secular Narrative with Aldo Capitini." *Social Sciences* 7, no. 50 (2018): 1–11.
- Banawiratma, J.B. *Dialog Antarumat Beragama – Gagasan Dan Praktik Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- Boudreau, Thomas E. "When the Killing Begins: An Epistemic Inquiry into Violent Human Conflict, Contested Truths, and Multiplex Methodology." In *Critical Issues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice, and Pedagogy*, edited by Thomas Matyók, Jessica Senehi, and Sean Byrne. Lanham: Rowman & Littlefield, 2011.
- Burrell, David B. *Friendship and Ways to Truth*. Indiana: University of Notre Dame Press, 2000.
- Carmody, Denise Lardner, and John Carmody. *Mysticism: Holiness East and West*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Chowdhury, Nayeefa. "The Quest for Universal Human Rights: A Brief Comparative Study of Universal Declarations of Human

- Rights by the UN and the Islamic Council of Europe.” *The International Journal of Human Rights* 12, no. 3 (2008).
- Eliade, Mircea. *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*. Translated by Willard R. Trask. New York: Harvest, 1987.
- Fachrudin, Azis Anwar, and Linah Khairiyah Pary, eds. *Agama Menggerakkan Perdamaian: Catatan Dari Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antariman*. Yogyakarta: CRCS, 2017.
- Fath, Markus. “Violence and Nonviolence/Peace: Introduction to a Holistic Approach.” In *Religion and Peace: Historical Aspects*, edited by Yvonne Friedman, 7–24. New York: Routledge, 2018.
- Fox, Jonathan. “Are Some Religions More Conflict-Prone Than Others?” *Jewish Political Studies Review* 16, no. 1/2 (2004): 81–100.
- Galtung, Johan. “Peace and Conflict Studies as Political Activity.” In *Critical Issues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice, and Pedagogy*, edited by Thomas Matyók, Jessica Senchi, and Sean Byrne. Lanham: Rowman & Littlefield, 2011.
- . “Peace by Peaceful Conflict Transformation – the TRANSCEND Approach.” In *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge, 2007.
- Galtung, Johan, and Dietrich Fischer. *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*. New York: Springer, 2013.
- Galtung, Johan, and Charles Webel. “Peace and Conflict Studies: Looking Back, Looking Forward.” In *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge, 2007.
- Glücklich, Ariel. “Self and Sacrifice: A Phenomenological Psychology of Sacred Pain.” *The Harvard Theological Review* 92, no. 4 (1999).
- Goodchild, Philip. *Capitalism and Religion: The Price of Piety*. London: Routledge, 2002.
- Gopin, Marc. *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking*. New York: Oxford University Press, 2000.
- . *Holy War, Holy Peace: How Religion Can Bring Peace to the Middle East*. New York: Oxford University Press, 2002.
- . “World Religions, Violence, and Myths of Peace in International Relations.” In *Bridge or Barrier: Religion, Violence and*

- Visions for Peace*, edited by Gerrie ter Haar and James J. Busuttill, 35–56. Leiden: Brill, 2005.
- Gottlieb, Roger S. *Liberating Faith: Religious Voices for Justice, Peace, & Ecological Wisdom*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.
- Groff, L. “Intercultural Communication, Interreligious Dialogue, and Peace.” *Futures* 34 (2002): 701–16.
- Gschwandtner, Christina M. “Philosophical Reflections on the Shaping of Identity in Fundamentalist Religious Communities.” *International Journal of Philosophical Studies* 24, no. 5 (2016).
- HAM, Komnas. *Direktori Penelitian Agama, Konflik Dan Perdamaian*. Jakarta, 2005.
- Hatzopoulos, Pavlos, and Fabio Petito. “The Return from Exile: An Introduction.” In *Religion in International Relations: The Return Form Exile*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Hoffman, Bruce. *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press, 2006.
- Hunsberger, Bruce. “Religion, Meaning, and Prejudice.” *Journal of Social Issues* 61, no. 4 (2005).
- Ichwan, Moch. Nur, and Ahmad Muttaqin, eds. *Agama Dan Perdamaian: Dari Potensi Menuju Aksi*. Yogyakarta: CR-Peace, 2012.
- Iqbal, Imran. “Just Wars, Holy Wars and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges.” *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 1 (2014).
- Izutzu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. Montreal: McGill University Press, 1966.
- Johnstone, Brick, Daniel Cohen, Kelly Konopacki, and Christopher Ghan. “Selflessness as a Foundation of Spiritual Transcendence - Perspectives from the Neurosciences and Religious Studies.” *The International Journal for the Psychology of Religion*, 2015.
- Juergensmeyer, Mark. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Kaldor, Mary. *New and Old Wars: Organised Violence in A Global Era*. Third Edition. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Keddie, Nikki R. “Shi'ism and Revolution.” In *Religion, Rebellion, Revolution: An Interdisciplinary and Cross-Cultural Collection of*

- Essays*, edited by Bruce Lincoln. New York: Palgrave Macmillan, 1985.
- Kvanvig, Jonathan L. "Resurrection, Heaven, and Hell." In *A Companion to Philosophy of Religion*, edited by Charles Taliaferro, Paul Draper, and Philip L. Quinn. United Kingdom: Blackwell Publishing, 2010.
- Lincoln, Bruce, ed. *Religion, Rebellion, Revolution: An Interdisciplinary and Cross-Cultural Collection of Essays*. New York: Palgrave Macmillan, 1985.
- Love, Janice. "Religion in Politics: Reflections on the UN's Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders." *International Studies Perspectives* 2, no. 1 (2001).
- MacQueen, Graeme. "The Spirit of War and The Spirit of Peace: Understanding the Role of Religion." In *Handbook of Peace and Conflict Studies*, edited by Charles Webel and Johan Galtung, 319–32. London: Routledge, 2007.
- Marty, Martin E., and R. Scott Appleby, eds. *Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education*. Vol. 2. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
- , eds. *Fundamentalisms Comprehended*. Vol. 5. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.
- McCutcheon, Russell T. *Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion*. New York: SUNY Press, 2001.
- Miguez, Daniel. "From Open Violence to Symbolic Confrontation: Anthropological Observations of Latin America's Southern Cone." In *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, edited by Gerrie ter Haar and James J. Busuttil, 81–118. Leiden: Brill, 2005.
- Moghaddam, Fathali M. "The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration." *American Psychologist* 60, no. 2 (2005): 161–69.
- Morsink, Johannes. *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Muzaffar, Chandra. "Religious Conflict in Asia: Probing the Causes, Seeking Solutions." In *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, edited by Gerrie ter Haar and James J. Busuttil, 57–79. Leiden: Brill, 2005.



- Newman, Jay. *Foundation of Religious Tolerance*. Toronto: University of Toronto Press, 1982.
- Paden, William E. *Religious Worlds: The Comparative Study of Religion*. Boston: Beacon Press, 1994.
- Pamungkas, Cahyo, and Yogi Setya Permana, eds. *Intoleransi Dan Politik Identitas Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: LIPI, 2020.
- Panggabean, Rizal, and Ihsan Ali-Fauzi. *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama Dan Perdamaian*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Peters, F.E. *The Children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Petrovsky, Vladimir. "An Interreligious Council at The UN UN Charter Possibilities and Constraints." *International Journal on World Peace* 20, no. 4 (2003).
- Pew Research Center. "The Changing Global Religious Landscape," April 5, 2017. <https://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/>.
- Ramadan, Tariq. *Islam, the West and the Challenges of Modernity*. UK: The Islamic Foundation, 2001.
- Ram-Prasad, Chakravarthi. "Being Hindu and/or Governing India? Religion, Social Change and the State." In *The Freedom to Do God's Will: Religious Fundamentalism and Social Change*, edited by Gerrie ter Haar and James J. Busuttil, 159–96. London: Routledge, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Islam Agama Perdamaian*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Scardigli, Fabio, Gerard 't Hooft, Emanuele Severino, and Piero Coda. *Determinism and Free Will: New Insights from Physics, Philosophy, and Theology*. Switzerland: Springer, 2019.
- Selengut, Charles. *Sacred Fury: Understanding Religious Violence*. Lanham: Altamira Press, 2003.
- Silberman, Israella. "Religious Violence, Terrorism, and Peace: A Meaning-System Analysis." In *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*, edited by Raymod F. Paloutzian and Crystal L. Park. New York: The Guilford Press, 2005.
- Stern, Jessica. *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*. New York: HarperCollins, 2003.

- The World Council of Religious Leaders. "About the Summit: The Goal of Religious and Spiritual Leadership," 2000. <http://www.millenniumpeacesummit.org/item1.html>.
- Truong, Thanh\_Dam. "Reflections on Human Security: A Buddhist Contribution." In *Bridge or Barrier: Religion, Violence and Visions for Peace*, edited by Gerrie ter Haar and James J. Busuttil, 275–95. Leiden: Brill, 2005.
- Webel, Charles. "Toward a Philosophy and Metapsychology of Peace." In *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge, 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

# Agama Dalam Pusaran KONFLIK & PERDAMAIAN

Studi konflik dan perdamaian secara ilmiah akademik telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama pada era pasca kolonial. Variabel agama dalam jenis studi ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dibandingkan variabel lain semisal etnis, ras, suku, warna kulit, golongan, atau kelompok. Hal ini dikarenakan agama memiliki konstruk berpikir yang didukung oleh anasir-anasir tertentu yang nilainya sangat fundamental bagi kehidupan manusia, semisal teks kitab suci. Hal yang demikian tidak dimiliki oleh variabel yang lain. Karena itulah, beragamnya anasir-anasir fundamental yang melingkupi agama menjadikan kajian seputar agama dalam pusaran konflik dan perdamaian menjadi sesuatu yang mesti mendapatkan porsi akademik tersendiri. Buku ini berupaya menguak sekaligus menyingkap tiga hal sekaligus, yaitu: jejaring makna agama dalam wacana dan studi konflik dan perdamaian; agama-agama dunia bertindak sebagai organ perdamaian; dan, peran agama sebagai pemelihara dan pengubah tatanan dunia. Urgensi tema ini adalah terutama terkait dengan perkembangan peradaban manusia yang tampaknya rumit dan pelik untuk diprediksi, apalagi bila menyangkut isu agama. Maka diskusi lanjutan tentang wacana konflik dan perdamaian sangatlah diperlukan, mengingat jenis studi ini membutuhkan beragam alternatif sudut pandang dari berbagai pihak karena sifatnya yang begitu multi dimensi dan trans disiplin keilmuan.

**Sanabil**

Puri Bunga Amanah  
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mararam  
Telp. 0370- 7505946  
Mobile: 081-805311362  
Email: sanabilpublishing@gmail.com  
www.sanabilpublishing.com

ISBN 978-623-317-186-1



# Agama dalam pusaran konflik dan perdamaian

---

## ORIGINALITY REPORT

---

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[amelianickarchie.blogspot.com](http://amelianickarchie.blogspot.com)

Internet Source

3%

2

[nanopdf.com](http://nanopdf.com)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%